



BAGIAN ANGGARAN 013

LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA

TAHUN ANGGARAN 2013

AUDITED

**Jl. H.R Rasuna Said Kav 5-6
Kuningan Jakarta Selatan**



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

**Laporan Keuangan
Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2013**

**JL. HR. RASUNA SAID KAV. 6-7
JAKARTA SELATAN**

DAFTAR ISI

	HAL
Kata Pengantar	I
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	iv
Pernyataan Tanggung Jawab	vii
Pernyataan Telah Direviu	viii
Ringkasan	ix
I Laporan Realisasi Anggaran (Perbandingan 30 Juni 2013 dan 2012)	xi
II Neraca	xii
III Ringkasan Catatan Atas Laporan Keuangan	
IV Catatan atas Laporan Keuangan	1
A Penjelasan Umum	1
A.1. Dasar Hukum	1
A.2. Profil dan Kebijakan Teknis Kementerian Hukum dan HAM	1
A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan	4
A.4. Kebijakan Akuntansi	5
B Penjelasan Atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	10
B.1. Pendapatan Negara dan Hibah	10
B.2. Belanja Negara	12
C Penjelasan Atas Pos-Pos Neraca	19
C.1. Aset Lancar	19
C.2. Aset Tetap	36
C.3. Piutang Jangka Panjang	69
C.4. Kewajiban	78
C.5. Ekuitas Dana Lancar	80
C.6. Ekuitas Dana Investasi	82
D Pengungkapan Penting Lainnya	82
D.1. Kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca	82
D.2. Temuan dan Tindaklanjut Temuan BPK RI	83
D.3. Informasi Pendapatan dan Belanja Secara Akrual	83
D.4. Hibah	83
D.5. SKPA	85
D.6. Pengungkapan Lain-lain	88
Laporan-laporan Pendukung :	
LRA Belanja	
LRA Pengembalian Belanja	
LRA Pendapatan	
LRA Pengembalian Pendapatan	
Laporan Barang Pengguna	
Daftar Rekening Pemerintah	
Lain-lain	



MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

**PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang terdiri dari : Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2013 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta, 2 Mei 2014





KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
INSPEKTORAT JENDERAL
Jl. H.R. Rasuna Said Kav 4-5 Kuningan, Jakarta 12940, Po.Box. 3489
Telp. 021-5253004/52565989 Fax. 021-5252975
Website : <http://www.itjen.kemenkumham.go.id>.
E-mail : itjen@kemenkumham.go.id.

PERNYATAAN TELAH DIREVIU
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
TAHUN ANGGARAN 2013

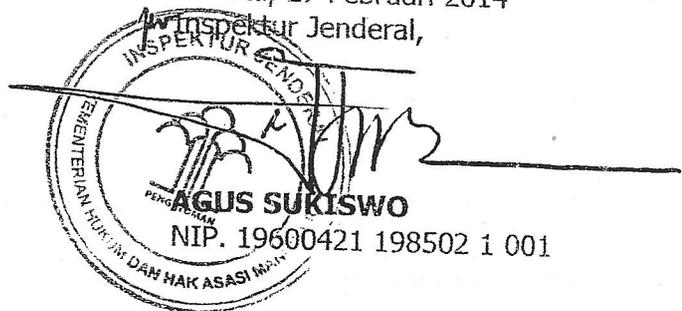
Kami telah mereviu Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk semester II tahun anggaran 2013 berupa Neraca per tanggal 31 Desember 2013, Laporan Realisasi Anggaran, dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Reviu atas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Semua informasi yang dimuat dalam laporan keuangan adalah penyajian manajemen Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi, serta kesesuaian pengakuan, pengukuran, dan pelaporan transaksi dengan SAP. Reviu mempunyai lingkup yang jauh lebih sempit dibandingkan dengan lingkup audit yang dilakukan sesuai dengan peraturan terkait dengan tujuan untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan secara keseluruhan. Oleh karena itu, kami tidak memberi pendapat semacam itu.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat perbedaan yang menjadikan kami yakin bahwa laporan keuangan yang kami sebutkan di atas tidak disajikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, dan peraturan lain yang terkait.

Jakarta, 27 Februari 2014

Inspektur Jenderal,



Berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, Menteri/Pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal, dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan Hak Asai Manusia Tahun 2013 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan, belanja, selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2013.

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2013 adalah berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar **Rp2.969.070.170.904,00** atau mencapai **119,49** persen dari estimasi pendapatan sebesar **Rp2.478.767.956.180,00**.

Realisasi Belanja Negara pada TA 2013 adalah sebesar **Rp6.996.176.085.084,00** atau mencapai **89,80** persen dari alokasi anggaran sebesar **Rp7.791.237.668.000,00**.

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2013 dan 2012 dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 1
Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2013 dan 2012

Uraian	TA 2013			TA 2012
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
PNBP	2.478.767.956.180,00	2.969.070.170.904,00	119,78	2.369.038.381.928,00
Belanja	7.791.237.668.000,00	6.996.176.085.084,00	89,80	6.227.246.372.641,00

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012.

Neraca yang disajikan adalah hasil dari proses Sistem Akuntansi Instansi, sebagaimana yang diwajibkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah

dengan 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Nilai Aset per 31 Desember 2013 dicatat dan disajikan sebesar Rp19.730.986.061.409,00 yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp640.347.582.697,00; Aset Tetap (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp18.725.036.167.992,00; Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya (neto setelah akumulasi penyusutan) masing-masing sebesar Rp18.229.209.532,00 dan Rp347.373.101.188,00.

Nilai Kewajiban seluruhnya tersaji sebesar Rp125.304.825.300,00 yang merupakan Kewajiban Jangka Pendek.

Nilai Ekuitas Dana disajikan sebesar Rp19.605.681.236.109,00, yang terdiri dari Ekuitas Dana Lancar sebesar Rp515.042.757.397,00 dan Ekuitas Dana Investasi sebesar Rp19.090.638.478.712,00.

Ringkasan Neraca per 31 Desember 2013 dan 2012 dapat disajikan sebagai berikut :

**Tabel 2
Ringkasan Neraca 31 Desember 2013 dan 2012**

	31 Des 2013	31 Des 2012	Naik/Turun	
Aset :				
Aset Lancar	640.347.582.697	380.233.910.735	260.113.671.962	68,41
Aset Tetap	18.725.036.167.992	20.619.401.370.243	(1.894.365.202.251)	(9,19)
Piutang Jangka Panjang	18.229.209.532	1.435.272.654	16.793.936.878	1.170,09
Aset Lainnya	347.373.101.188	352.610.419.348	(5.237.318.160)	(1,49)
Jumlah Aset	19.730.986.061.409	21.353.680.972.980	(1.622.694.911.571)	(7,60)
Kewajiban :				
Kewajiban Jangka Pendek	125.304.825.300	70.490.851.884	54.813.973.416	77,76
Jumlah Kewajiban	125.304.825.300	70.490.851.884	54.813.973.416	77,76
Ekuitas Dana :				
Ekuitas Dana Lancar	515.042.757.397	309.743.058.851	205.299.698.546	66,28
Ekuitas Dana Investasi	19.090.638.478.712	20.973.447.062.245	(1.882.808.583.533)	(8,98)
Jumlah Ekuitas Dana	19.605.681.236.109	21.283.190.121.096	(1.677.508.884.987)	(7,88)

3. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau aftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2013, Pendapatan Negara dan Hibah dan Belanja Negara diakui berdasarkan basis kas, yaitu diakui pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara.



Dalam penyajian Neraca untuk periode per tanggal 31 Desember 2013, nilai Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Dana diakui berdasarkan basis akrual, yaitu diakui pada saat diperolehnya hak atas dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara.



LRA
NERACA
31 DESEMBER 2013

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2013 DAN 2012**

(dalam Rupiah)

No	URAIAN	CATATAN	ANGGARAN 2013	REALISASI 2013	(%)	REALISASI 2012
1	<u>PENDAPATAN</u>					
2	PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK	B.1				
3	Pendapatan Negara Sumber Daya Alam		-	-	-	-
4	Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba		-	-	-	-
5	Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	B.1.1	2.484.767.956.180	2.969.070.170.904	119,49	2.369.038.381.928
6	Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak (3 s/d 5)		2.484.767.956.180	2.969.070.170.904	119,49	2.369.038.381.928
7	JUMLAH PENDAPATAN (6)		2.484.767.956.180	2.969.070.170.904	119,49	2.369.038.381.928
8	<u>BELANJA</u>	B.2				
9	BELANJA OPERASI	B.2.1				
10	Belanja Pegawai	B.2.1.1	3.408.419.353.000	3.234.664.542.717	94,90	3.109.077.269.730
11	Belanja Barang	B.2.1.2	3.298.484.460.000	2.856.608.398.251	86,60	2.272.838.710.306
12	Bunga		-	-	-	-
13	Subsidi		-	-	-	-
14	Hibah		-	-	-	-
15	Bantuan Sosial		-	-	-	-
16	Belanja Lain-lain		-	-	-	-
17	Jumlah Belanja Operasi (10 s/d 16)		6.706.903.813.000	6.091.272.940.968	90,82	5.381.915.980.036
18	BELANJA MODAL	B.2.2				
19	Belanja Tanah	B.2.2.1	27.206.143.000	809.225.350	2,97	23.116.502.732
20	Belanja Peralatan dan Mesin	B.2.2.1	595.986.524.000	503.772.028.455	84,53	499.464.238.677
21	Belanja Gedung dan Bangunan	B.2.2.1	439.718.971.000	371.860.607.304	84,57	303.660.238.317
22	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	B.2.2.1	6.732.068.000	6.171.896.286	91,68	4.106.073.098
23	Belanja Aset Tetap Lainnya	B.2.2.1	14.690.149.000	12.535.943.721	85,34	12.378.974.993
24	Belanja Aset Lainnya	B.2.2.1	-	-	-	-
25	Belanja Transaksi Non Kas	B.2.2.1	-	9.753.443.000	-	2.604.364.788
26	Jumlah Belanja Modal (19 s/d 25)		1.084.333.855.000	904.903.144.116	83,45	845.330.392.605
27	JUMLAH BELANJA (17 + 26)		7.791.237.668.000	6.996.176.085.084	89,80	6.227.246.372.641

2. NERACA

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
N E R A C A
PER 31 DESEMBER 2013 DAN 2012

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Catatan	31 DESEMBER 2013	31 DESEMBER 2012
1	ASET			
2	ASET LANCAR	C.1.		
3	Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1.1	2,137,424,659	4,905,638,455
4	Kas di Bendahara Penerimaan	C.1.2	5,739,408,169	5,804,728,975
5	Kas Lainnya dan Setara Kas	C.1.3	10,309,750,010	20,417,269,305
6	Belanja Dibayar Dimuka (<i>prepaid</i>)	C.1.4	10,840,825,002	-
7	Piutang Bukan Pajak	C.1.5	185,252,175,906	37,497,955,959
8	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Bukan Pajak	C.1.6	(1,008,600,437)	(12,670,630,903)
9	<i>Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak (netto)</i>	C.1.7	184,243,575,469	24,827,325,056
10	Bagian Lancar Tagihan TP/TGR	C.1.8	386,254,414	178,837,498
11	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Bagian Lancar Tagihan TP/TGR	C.1.9	(6,054,272)	(894,188)
13	<i>Bagian Lancar Tagihan TP/TGR (netto)</i>	C.1.10	380,200,142	177,943,310
14	Persediaan	C.1.11	426,696,399,246	324,101,005,634
15	Jumlah Aset Lancar		640,347,582,697	380,233,910,735
16	ASET TETAP	C.2		
17	Tanah	C.2.1	12,362,113,598,258	11,715,655,610,505
18	Peralatan dan Mesin	C.2.2	3,026,289,712,192	2,540,006,548,203
19	Gedung dan Bangunan	C.2.3	6,428,886,350,375	5,570,641,029,594
20	Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.2.4	187,832,116,877	161,477,026,260
21	Aset Tetap Lainnya	C.2.5	77,596,821,685	44,614,453,012
22	Konstruksi Dalam Pengerjaan	C.2.6	513,912,932,922	587,006,702,669
23	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.2.7	(3,871,595,364,317)	-
24	Jumlah Aset Tetap		18,725,036,167,992	20,619,401,370,243
25	PIUTANG JANGKA PANJANG	C.3		
26	Tagihan TP/TGR	C.3.1	1,065,108,739	1,512,747,503
27	Penyisihan Tagihan TP/TGR	C.3.2	(89,696,707)	(77,474,849)
28	Tagihan TP/TGR (<i>netto</i>)	C.3.3	975,412,032	1,435,272,654
29	Piutang Jangka Panjang Lainnya	C.3.4	17,340,500,000	-
30	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Jangka Panjang Lainnya	C.3.5	(86,702,500)	-
31	<i>Piutang Jangka Panjang Lainnya (Netto)</i>	C.3.6	17,253,797,500	-
32	Jumlah Piutang Jangka Panjang		18,229,209,532	1,435,272,654
33	ASET LAINNYA			
34	Aset Tak Berwujud	C.3.7	333,848,538,055	288,291,861,880
35	Aset Lain-Lain	C.3.8	84,276,630,562	64,318,557,468
36	Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi Aset Lainnya	C.3.9	(70,752,067,429)	-
37	Jumlah Aset Lainnya		347,373,101,188	352,610,419,348
38	JUMLAH ASET		19,730,986,061,409	21,353,680,972,980
39				
40	KEWAJIBAN			
41	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	C.4		
42	Utang Kepada Pihak Ketiga	C.4.1	53,078,687,737	53,795,140,417
43	Pendapatan diterima dimuka	C.4.2	63,865,505,500	-
44	Uang Muka dari KPPN	C.4.3	2,137,424,659	4,905,638,455
45	Pendapatan yang ditangguhkan	C.4.4	6,223,207,404	11,790,073,012
46	Utang Jangka Pendek Lainnya	C.4.5	-	-
47	Jumlah Kewajiban Jk Pendek		125,304,825,300	70,490,851,884
48	JUMLAH KEWAJIBAN		125,304,825,300	70,490,851,884
49				
50	EKUITAS DANA			
51	EKUITAS DANA LANCAR	C.5		
52	Cadangan Piutang	C.5.1	184,623,775,611	25,005,268,366
53	Cadangan Persediaan	C.5.2	426,696,399,246	324,101,005,634
54	Dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek	C.5.3	(52,785,095,244)	(53,001,421,876)
55	Ekuitas Dana Lancar Lainnya	C.5.4	9,532,358,282	13,638,206,727
56	Barang/Jasa yang masih harus diterima	C.5.5	10,840,825,002	-
57	Barang/Jasa yang masih harus diserahkan	C.5.6	(63,865,505,500)	-
58	Jumlah Ekuitas Dana Lancar		515,042,757,397	309,743,058,851
59	EKUITAS DANA INVESTASI	C.6		
60	Diinvestasikan Dalam Aset Tetap	C.6.1	18,725,036,167,992	20,619,401,370,243
61	Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya	C.6.2	365,602,310,720	354,045,692,002
62	Jumlah Ekuitas Dana Investasi		19,090,638,478,712	20,973,447,062,245
63	JUMLAH EKUITAS DANA		19,605,681,236,109	21,283,190,121,096
64	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA		19,730,986,061,409	21,353,680,972,980



**Catatan atas Laporan
Keuangan
(C a L K)**

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

Dasar Hukum

A.1. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat; dan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-57/PB/Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.

A.2. PROFIL DAN KEBIJAKAN TEKNIS KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

A.2.1. Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai salah satu lembaga Pemerintah mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang hukum dan hak asasi manusia untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara serta menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
2. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
3. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
4. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di daerah; dan
5. Pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional dan pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah.

A.2.2. Visi, Misi, Nilai, Tujuan, dan Sasaran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Visi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ialah “Masyarakat Memperoleh Kepastian Hukum”. Misi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ialah “Melindungi Hak Asasi Manusia”. Tata Nilai:

K : Kepentingan Masyarakat

I : Integritas

R : Responsif

A : Akuntabel

P : Profesional

Tujuan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah:

1. menciptakan supremasi hukum;
2. memberdayakan masyarakat untuk sadar hukum dan hak asasi manusia;
3. memperkuat manajemen dan kelembagaan secara nasional; dan
4. meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Sasaran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah:

1. pembentukan peraturan perundang-undangan yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan perkembangan global secara tepat waktu;
2. seluruh peraturan perundang-undangan di tingkat pusat maupun daerah harmonis dan melindungi kepentingan nasional;
3. seluruh pengawasan dan penindakan dilakukan secara konsisten untuk menjamin kepastian hukum;
4. seluruh desa sadar hukum;
5. seluruh masyarakat, terutama kelompok rentan dan minoritas memperoleh perlindungan dan pemenuhan hak asasinya; dan
6. hak kekayaan intelektual masyarakat menjadi produk bernilai ekonomi yang diakui secara internasional.

A.2.3. Organisasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Organisasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terdiri atas 11 unit pusat dan 33 kantor wilayah.

1. Sekretariat Jenderal

Sekretariat Jenderal merupakan unsur pembantu pimpinan dalam kementerian yang bertanggung jawab langsung kepada Menteri. Sekretariat Jenderal membawahkan 7 (tujuh) unit Eselon II, yaitu 6 (enam) biro dan 1 (satu) pusat, yaitu:

- a. Biro Perencanaan;
- b. Biro Kepegawaian;

LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2013 - AUDITED

- c. Biro Perlengkapan;
- d. Biro Keuangan;
- e. Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri;
- f. Biro Umum; dan
- g. Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan yang merupakan unsur penunjang dalam kementerian dan bertanggung jawab kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal.

2. Inspektorat Jenderal

Inspektorat Jenderal merupakan unsur pengawasan dalam kementerian yang bertanggung jawab langsung kepada Menteri.

3. Direktorat Jenderal

Direktorat Jenderal merupakan unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi kementerian yang bersifat teknis serta bertanggung jawab langsung kepada Menteri. Direktorat Jenderal di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terdiri atas:

- a. Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan;
- b. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;
- c. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan;
- d. Direktorat Jenderal Imigrasi;
- e. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual; dan
- f. Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia.

4. Badan

Badan merupakan unsur penunjang dalam kementerian dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri. Badan di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terdiri atas:

- a. Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN);
- b. Badan Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia (Balitbang HAM); dan
- c. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia (BPSDM).

5. Kantor Wilayah

Kantor Wilayah adalah instansi vertikal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang berkedudukan di propinsi dan berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Menteri untuk melaksanakan tugas dan fungsi berdasarkan kebijakan Menteri sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kantor wilayah membawahkan unit pelaksana teknis (UPT) di lingkungannya dalam hal pengawasan dan jalur koordinasi.

LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2013 - AUDITED

6. Unit Pelaksana Teknis

UPT adalah unit pelaksana pelayanan di bidang masing-masing dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan publik Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. UPT Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terdiri dari:

- a. Kantor Imigrasi;
- b. Rumah Detensi Imigrasi;
- c. Lembaga Pemasyarakatan;
- d. Balai Pemasyarakatan;
- e. Rumah Tahanan Negara;
- f. Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara; dan
- g. Balai Harta Peninggalan (di lima kantor wilayah).

A.3. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2013 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI), yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ini merupakan laporan konsolidasi dari seluruh jenjang struktur di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia seperti eselon I, kantor wilayah, serta satuan kerja (satker) yang bertanggung jawab atas anggaran yang diberikan.

Jumlah satker di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah sebanyak 803 satker. Dari jumlah tersebut, satker yang menyampaikan laporan keuangan dan dikonsolidasikan sejumlah 803 satker (100%). Rincian satuan kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Rekapitulasi Jumlah Satker UAKPA Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

No.	Eselon I	Jumlah Satker
1	Sekretariat Jenderal	791
2	Inspektorat Jenderal	1
3	Ditjen Administrasi Hukum Umum	1
4	Ditjen Pemasyarakatan	1
5	Ditjen Imigrasi	1
6	Ditjen Hak Kekayaan Intelektual	1
7	Ditjen Peraturan Perundang-undangan	1
8	Ditjen Hak Asasi Manusia	1
9	Badan Pembinaan Hukum Nasional	1
10	Balitbang HAM	1
11	Badan Pengembangan SDM	3
Total		803

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Informasi

LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2013 - AUDITED

Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). Sistem Akuntansi Instansi dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satker yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

*Kebijakan
Akuntansi*

A.4. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2013 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP. Di samping itu, dalam penyusunannya telah ditetapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah sebagai berikut:

Pendapatan

1. Kebijakan Akuntansi atas Pendapatan

Pendapatan adalah semua penerimaan yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah pusat dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah pusat. Pendapatan diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN). Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah *netto*-nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

2. Kebijakan Akuntansi atas Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah pusat. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja.

Aset

3. Kebijakan Akuntansi atas Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan

LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2013 - AUDITED

sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah.

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan.

Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.

Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihan atau yang dipersamakan, yang diharapkan diterima pengembaliannya dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan dan disajikan sebagai Bagian Lancar Piutang.

Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan dicatat di neraca berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:

- 1) harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
- 2) harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri; dan
- 3) harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b. Aset Tetap

Aset Tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun. Aset Tetap dilaporkan pada neraca berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.

Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:

- 1) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah

LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2013 - AUDITED

raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- 2) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah); dan
- 3) Pengeluaran yang tidak mencakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak keseniaan.

c. Piutang Jangka Panjang

Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jauh tempo lebih dari satu tahun.

TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.

TP ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian negara/daerah.

TGR merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atau suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung maupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

d. Aset Lainnya

Aset lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain.

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.

Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari

LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2013 - AUDITED

penggunaan operasional pemerintah.

Kewajiban

4. Kebijakan Akuntansi atas Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai Kewajiban Jangka Pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban Jangka Pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai Kewajiban Jangka Panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas Dana

5. Kebijakan Akuntansi atas Ekuitas Dana

Ekuitas Dana merupakan kekayaan bersih pemerintah, yaitu selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.

Ekuitas Dana diklasifikasikan Ekuitas Dana Lancar dan Ekuitas Dana Investasi.

Ekuitas Dana Lancar merupakan selisih antara Aset Lancar dan Utang Jangka Pendek.

Ekuitas Dana Investasi mencerminkan selisih antara Aset Tidak Lancar dan Kewajiban Jangka Panjang.

6. Kebijakan Akuntansi atas Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan perkembangan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah.

Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-masing piutang pada tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.06/2011 tentang Kualitas Piutang Kementerian Negara/Lembaga dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih.

LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2013 - AUDITED

Tabel 2. Penggolongan Kualitas Piutang

No.	Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
1	Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
2	Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
3	Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
4	Macet	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan; Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

Penyusutan Aset Tetap

7. Kebijakan Akuntansi atas Penyusutan Aset Tetap

Penerapan penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada seluruh entitas Pemerintah Pusat dilaksanakan mulai tahun 2013, sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 53/KMK.06/2012 tentang Penerapan Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.

Penyusutan Aset Tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu Aset Tetap. Kebijakan penyusutan Aset Tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.

Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:

- a. Tanah;
- b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP); dan
- c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.

Nilai yang disusutkan pertama kali adalah nilai yang tercatat dalam pembukuan per 31 Desember 2012 untuk aset tetap yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2012. Sedangkan untuk Aset Tetap yang diperoleh setelah 31 Desember 2012, nilai yang disusutkan adalah berdasarkan nilai perolehan.

Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu. Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama masa manfaat.

Masa manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat tersebut tersaji pada

LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2013 - AUDITED

Tabel 3.

Tabel 3. Penggolongan Masa Manfaat Kelompok Aset Tetap

No	Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
1	Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
2	Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
3	Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
4	Alat Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

Penjelasan Realisasi
Anggaran

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Pendapatan
Negara dan
Hibah

B.1. Pendapatan Negara dan Hibah

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada Tahun 2013 adalah sebesar Rp2.969.070.170.904,00 atau mencapai 119,49 % dari estimasi yang ditetapkan sebesar Rp2.484.767.956.180,00. Keseluruhan Pendapatan Negara dan Hibah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berasal dari Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).

**Tabel 4. Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2013**

MAP	Uraian	Estimasi (Rp,00)	Realisasi (Rp,00)	%
4231	Pendapatan Penjualan dan Sewa	336.627.000	10.452.404.282	3.105,04
4232	Pendapatan Jasa	2.484.413.324.180	2.904.250.129.630	116,90
4233	Pendapatan Bunga	-	-	-
4234	Pendapatan Kejaksaan, Peradilan dan Hasil Tindak Pidana Korupsi	-	195.822	-
4236	Pendapatan Gratifikasi dan Uang Sitaan Hasil Korupsi	-	42.446.909	-
4237	Pendapatan Iuran dan Denda	-	2.959.806.763	-
4239	Pendapatan Lain-lain	18.005.000	51.365.187.498	285.282,91
	Jumlah	2.484.767.956.180	2.969.070.170.904	119,49

Berikut adalah perbandingan Realisasi PNBP Tahun 2013 dan 2012:

Tabel 5. Perbandingan Realisasi PNBP Tahun 2013 dan 2012

Tahun 2013 (Rp,00)	Tahun 2012 (Rp,00)	Kenaikan/ (Penurunan)	
		(Rp,00)	%
2.969.070.170.904	2.369.038.381.928	600.031.788.976	25,33

Berdasarkan Tabel 5 di atas, realisasi PNBP Tahun 2013 mengalami kenaikan sebesar Rp600.031.788.976,00 atau 25,33% dibandingkan Tahun 2012.

Rincian estimasi dan realisasi pendapatan penjualan dan sewa disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 6. Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan Penjualan dan Sewa

MAK	Pendapatan Penjualan dan Sewa	Estimasi (Rp,00)	Realisasi (Rp,00)	%
423111	Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan	-	8.854.000	-
423112	Pendapatan Penjualan Hasil Peternakan dan Perikanan	-	-	-
423114	Pendapatan Penjualan Hasil Sitaan/Rampasan dan Harta Peninggalan	-	295.679.740	-
423116	Pendapatan Penjualan Informasi, Penerbitan, Film, Survey, Pemetaan dan Hasil Cetakan Lainnya	-	1.210.500	-

LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2013 - AUDITED

423117	Pendapatan Penjualan Dokumen-dokumen Pelelangan	-	150.000	-
423119	Pendapatan Penjualan Lainnya	32.434.000	637.501.785	1.965,54
423121	Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung dan Bangunan	-	2.513.680	-
423122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	-	131.505.000	-
423124	Pendapatan dari Penjualan Aset Bekas Milik Asing/Cina	-	3.600.000	-
423125	Pendapatan dari Tukar Menukar Tanah, Gedung dan Bangunan	-	287.727.000	-
423126	Pendapatan dari Tukar Menukar Peralatan dan Mesin	-	805.000	-
423129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN	845.000	1.151.746.891	136.301,41
423132	Pendapatan Minyak Mentah	-	-	-
423141	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	242.848.000	4.716.651.209	1.942,22
423142	Pendapatan Sewa Peralatan dan Mesin	41.000.000	834.404.708	2.035,13
423143	Pendapatan Sewa Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	180.000	-
423144	Pendapatan dari Kerja Samaa Pemanfaatan (KSP) Tanah, Gedung dan Bangunan	-	3.093.000	-
423149	Pendapatan dari Pemanfaatan BMN Lainnya	19.500.000	2.376.781.769	12.188,62
Jumlah		336.627.000	10.452.404.282	3.105,04

Rincian estimasi dan realisasi pendapatan jasa disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 7. Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan Jasa

MAK	Pendapatan Jasa	Estimasi (Rp,00)	Realisasi (Rp,00)	%
423211	Pendapatan Rumah Sakit dan Instansi Kesehatan Lainnya	-	1.404.096	-
423213	Pendapatan Surat Keterangan, VISA, Paspor	2.237.820.703.180	2.180.383.623.873	97,43
423214	Pendapatan Hak dan Perijinan	244.096.000.000	720.492.326.706	295,17
423216	Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, Informasi, Pelatihan dan Teknologi Sesuai Dengan Tugas dan Fungsi Kementerian	2.392.590.000	1.844.935.719	77,11
423218	Pendapatan Jasa Bandar Udara, Kepelabuhanan dan Kenavigasian	-	193.185.000	-
423219	Pendapatan Pelayanan Pertanahan	-	214.000	-
423221	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	8.539.000	133.791.390	1.566,83
423226	Pendapatan Uang Pewarganegaraan	-	2.500.000	-
423241	Pendapatan Layanan Jasa Perbankan	-	14.400.000	-
423291	Pendapatan Jasa Lainnya	95.492.000	1.183.748.846	1.239,63
Jumlah		2.484.413.324.180	2.904.250.129.630	116,90

Rincian estimasi dan realisasi pendapatan kejaksaan, peradilan dan hasil tindak pidana korupsi disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 8. Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan Kejaksaan, Peradilan dan Hasil Tindak Pidana Korupsi

MAK	Pendapatan Bunga	Estimasi (Rp,00)	Realisasi (Rp,00)	%
423414	Pendapatan Hasil Denda dan Sebagainya	-	-	-

LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2013 - AUDITED

423419	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	-	195.822	-
Jumlah		-	195.822	-

Rincian estimasi dan realisasi pendapatan gratifikasi dan uang sitaan hasil korupsi disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 9. Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan Gratifikasi dan Uang Sitaan Hasil Korupsi

MAK	Pendapatan Bunga	Estimasi (Rp,00)	Realisasi (Rp,00)	%
423615	Pendapatan Hasil Pengembalian Uang Negara	-	42.446.909	-
Jumlah		-	42.446.909	-

Rincian estimasi dan realisasi pendapatan iuran dan denda disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 10. Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan Iuran dan Denda

MAK	Pendapatan Bunga	Estimasi (Rp,00)	Realisasi (Rp,00)	%
423752	Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	-	2.959.806.763	-
Jumlah		-	2.959.806.763	-

Rincian estimasi dan realisasi pendapatan lain-lain disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 11. Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan Lain-lain

MAK	Pendapatan Lain-lain	Estimasi (Rp,00)	Realisasi (Rp,00)	%
423911	Pendapatan Kembali Belanja Pegawai Pusat TAYL	839.000	7.750.722.839	923.804,87
423913	Pendapatan Kembali Belanja Lainnya TAYL	14.766.000	18.116.584.200	122.691,21
423915	Pendapatan Kembali Belanja Lainnya Hibah TAYL	-	52.104	-
423916	Pendapatan Kembali Belanja Swadana TAYL	-	837.677.241	-
423921	Pendapatan Pelunasan Piutang Non Bendahara	-	16.500.000	-
423922	Pendapatan Pelunasan Ganti Rugi atas Kerugian yang Diderita Oleh Negara (TP/TGR) Bendahara	-	760.123.245	-
423931	Pendapatan dari Penutupan Rekening	-	23.400	-
423991	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	-	47.557.422	-
423992	Penerimaan Premi Penjaminan Perbankan Nasional	-	5.000.000	-
423998	Pendapatan Penyetoran Kelebihan Hasil Bersih Lelang yang Tidak Diambil oleh yang Berhak	-	29.700.000	-
423999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	2.400.000	23.801.247.047	991.718,63
Jumlah		18.005.000	51.365.187.498	285.292,91

Belanja Negara

B.2. Belanja

Realisasi belanja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2013 adalah sebesar Rp6.996.176.085.084,00 atau mencapai 89,80% dari anggaran sebesar Rp7.791.237.668.000,00. Realisasi belanja Tahun 2013 terdiri dari realisasi belanja DIPA sebesar Rp6.986.422.642.084,00 dan belanja non kas sebesar Rp9.753.443.000,00 yang merupakan hibah barang.

1. Realisasi Belanja DIPA sebesar Rp6.986.422.642.084,00

LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2013 - AUDITED

Realisasi belanja negara Tahun 2013 mengalami kenaikan sebesar Rp768.929.712.443,00 atau 12,35% dibandingkan Tahun 2012. Perbandingan realisasi belanja Tahun 2013 dan 2012 disajikan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 12. Perbandingan Realisasi Belanja Negara TA 2013 dan 2012

TA 2013 (Rp,00)	TA 2012 (Rp,00)	Kenaikan/ (Penurunan)	
		(Rp,00)	%
6.986.422.642.084	6.227.246.372.641	768.929.712.443	12,35

Berikut adalah tabel anggaran dan realisasi belanja Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2013 menurut jenis belanja:

Tabel 13. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja

Jenis Belanja	Anggaran (Rp,00)	Realisasi (Rp,00)	%
RM			
Belanja Pegawai	3.408.419.353.000	3.234.664.542.717	94,90
Belanja Barang	3.294.042.733.000	2.853.767.965.621	86,63
Belanja Modal	1.069.160.863.000	888.707.275.466	83,12
Total	7.771.622.949.000	6.977.139.783.804	89,78
Hibah			
Belanja Barang	4.441.727.000	2.840.432.630	63,95
Belanja Modal	15.172.992.000	6.442.425.650	42,46
Total	19.614.719.000	9.282.858.280	47,33
RM dan Hibah			
Belanja Pegawai	3.408.419.353.000	3.234.664.542.717	94,90
Belanja Barang	3.298.484.460.000	2.856.608.398.251	86,60
Belanja Modal	1.084.333.855.000	895.149.701.116	82,55
Total	7.791.237.668.000	6.986.422.642.084	89,67

Berikut rincian anggaran dan realisasi belanja DIPA Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2013 menurut Organisasi (Unit Eselon I):

Tabel 14. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Menurut Unit Eselon I (Organisasi)

No.	Eselon 1	Anggaran (Rp,00)	Realisasi (Rp,00)	%
1	Setjen	6.032.705.013.000	5.513.668.950.537	91,40
2	Itjen	29.744.554.000	28.395.975.224	95,47
3	Ditjen AHU	357.388.970.000	267.417.543.988	74,83
4	Ditjen PAS	70.416.249.000	62.716.777.560	89,07
5	Ditjen Imigrasi	922.109.810.000	832.303.421.939	90,26
6	Ditjen HKI	99.345.071.000	75.520.340.239	76,02
7	Ditjen PP	53.949.333.000	36.585.900.372	67,82
8	Ditjen HAM	31.949.586.000	28.639.736.186	89,64
9	B P H N	89.313.057.000	48.085.311.016	53,84
10	BALITBANG HAM	23.659.117.000	21.372.329.747	90,33
11	B P S D M	80.656.908.000	71.716.355.276	88,92
	Jumlah	7.791.237.668.000	6.986.422.642.084	89,67

Berikut rincian anggaran dan realisasi belanja DIPA Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2013 menurut fungsi:

Tabel 15. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Menurut Fungsi

No.	Fungsi	Anggaran (Rp,00)	Realisasi (Rp,00)	%
1	Pelayanan Umum	6.266.429.287.000	5.629.769.450.011	89,84
2	Ketertiban Keamanan	1.498.294.465.000	1.334.746.167.617	89,08
3	Pendidikan	26.513.916.000	21.907.024.456	82,62
	Jumlah	7.791.237.668.000	6.986.422.642.084	89,67

LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2013 - AUDITED

2. Realisasi Belanja Transaksi Non Kas sebesar Rp9.753.443.000,00

Realisasi belanja transaksi non kas merupakan hibah berupa barang dengan rincian dapat dilihat pada tabel 31.

Bila dibandingkan realisasi belanja Tahun 2012 sebesar Rp6.227.246.372.641,00, realisasi Tahun 2013 mengalami kenaikan sebesar Rp768.929.712.443,00 atau 12,35%. Perbandingan realisasi belanja Tahun 2013 dan 2012 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 16. Perbandingan Realisasi Belanja TA 2013 vs 2012

No	Jenis Belanja	Tahun 2013 (Rp,00)	Tahun 2012 (Rp,00)	Naik/Turun (Rp,00)	%
1	Belanja Pegawai	3.234.664.542.717	3.109.077.269.730	125.587.272.987	4,04
2	Belanja Barang	2.856.608.398.251	2.272.838.710.306	583.769.687.945	25,68
3	Belanja Modal	895.149.701.116	845.330.392.605	59.572.751.511	7,05
	Total	6.986.422.642.084	6.227.246.372.641	768.929.712.443	12,35

Belanja Operasi

B.2.1. Belanja Operasi

Realisasi belanja operasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2013 adalah sebesar Rp6.091.272.940.968,00 atau mencapai 90,02 persen dari anggarannya sebesar Rp6.706.903.813.000,00. Bila dibandingkan realisasi pada periode yang sama Tahun 2012 sebesar Rp5.381.915.980.036,00, maka terdapat kenaikan sebesar Rp709.356.960.932,00.

Belanja Pegawai

B.2.1.1. Belanja Pegawai

Realisasi belanja pegawai Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2013 adalah sebesar Rp3.234.664.542.717,00 atau mencapai 94,90% dari anggarannya sebesar Rp3.408.419.353.000,00. Bila dibandingkan realisasi pada periode yang sama Tahun 2012 sebesar Rp3.109.075.595.384,00, maka terdapat kenaikan sebesar Rp125.588.947.333,00 atau 4,04%. Kenaikan realisasi belanja pegawai ini disebabkan karena Tahun 2013 lalu Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia membuka penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Rincian belanja pegawai disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 17. Rincian Realisasi Anggaran Belanja Pegawai Tahun 2013

Kode	Rincian Belanja	Anggaran (Rp,00)	Realisasi Bruto (Rp,00)	Pengembalian (Rp,00)	Realisasi Netto (Rp,00)	%
5111	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	2.254.202.423.000	2.128.807.164.477	(1.289.989.579)	2.127.517.174.898	94,38
5121	Belanja Honorarium	-	-	-	-	-
5122	Belanja Lembur	51.087.189.000	43.849.065.900	(98.979.650)	43.750.086.250	85,64
5123	Belanja Vakasi	329.948.000	319.702.000	-	319.702.000	96,89
5124	Belanja Tunjangan Khusus	1.102.799.793.000	1.071.247.634.852	(8.170.055.283)	1.063.077.579.569	96,40
	Jumlah	3.408.419.353.000	3.244.223.567.229	(9.559.024.512)	3.234.664.542.717	94,90

Belanja Barang

B.2.1.2. Belanja Barang

Realisasi belanja barang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2013 adalah sebesar Rp2.856.608.398.251,00 atau mencapai 86,60% dari anggarannya sebesar Rp3.298.484.460.000,00. Bila dibandingkan realisasi pada periode yang sama Tahun 2012 sebesar Rp2.272.851.807.806,00, maka terdapat kenaikan sebesar Rp583.756.590.445,00 atau 25,68%. Kenaikan realisasi belanja barang ini disebabkan

LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2013 - AUDITED

karena adanya kenaikan belanja perjalanan dinas. Rincian anggaran dan realisasi belanja barang disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 18. Rincian Realisasi Anggaran Belanja Barang TA 2013

Kode	Rincian Belanja	Anggaran (Rp,00)	Realisasi Bruto (Rp,00)	Pengembalian (Rp,00)	Realisasi Netto (Rp,00)	%
5211	Belanja Barang Operasional	1.165.525.963.496	1.079.407.332.494	(900.524.194)	1.078.506.808.300	92,53
5212	Belanja Barang Non Operasional	1.027.466.353.605	880.246.979.294	(501.929.098)	879.745.050.196	85,62
5221	Belanja Jasa	336.068.306.699	265.074.911.819	(116.045.310)	264.958.866.509	78,84
5231	Belanja Pemeliharaan	328.089.278.800	289.368.048.402	(222.682.561)	289.145.365.841	88,13
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri	393.470.337.400	321.683.548.956	(10.233.485.179)	311.450.063.777	79,15
5242	Belanja Perjalanan Luar Negeri	47.864.220.000	36.398.854.886	(3.596.611.258)	32.802.243.628	68,53
Total Belanja		3.298.484.460.000	2.872.179.675.851	(15.571.277.600)	2.856.608.398.251	86,60

Rincian anggaran dan realisasi belanja barang operasional disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 19. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang Berdasarkan Belanja Barang Operasional Tahun 2013

MAK	Belanja Barang	Anggaran (Rp,00)	Realisasi (Rp,00)	%
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	128.070.267.896	117.071.880.389	91,41
521112	Belanja Pengadaan Bahan Makanan	725.292.944.000	693.872.308.669	95,67
521113	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	34.657.060.000	30.045.532.886	86,69
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	14.534.087.700	10.648.797.767	73,27
521115	Belanja Honor Operasional Satker	42.185.288.000	37.818.743.208	89,65
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	220.786.315.900	189.049.545.381	85,63
Jumlah		1.165.525.963.496	1.078.506.808.300	92,53

Rincian anggaran dan realisasi belanja barang non operasional disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 20. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang Berdasarkan Belanja Barang Non Operasional Tahun 2013

MAK	Belanja Barang Non Operasional	Anggaran (Rp,00)	Realisasi (Rp,00)	%
521211	Belanja Bahan	141.350.696.100	115.562.078.018	81,76
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	54.042.155.505	46.115.588.208	85,33
521214	Belanja Karena Rugi Selisih Kurs Uang Persediaan pada Perwakilan RI/Atase Teknis	10.000.000	-	-
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	832.063.502.000	718.067.383.970	86,30
Jumlah		1.027.466.353.605	879.745.050.196	85,62

Rincian anggaran dan realisasi belanja jasa disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 21. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Jasa Tahun 2013

MAK	Belanja Jasa	Anggaran (Rp,00)	Realisasi (Rp,00)	%
522111	Belanja Langganan Listrik	98.667.263.405	85.437.817.225	86,59
522112	Belanja Langganan Telepon	17.006.954.294	8.720.072.264	51,27
522113	Belanja Langganan Air	14.743.644.000	10.286.559.846	69,77

LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2013 - AUDITED

522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	4.116.338.000	3.080.964.877	74,85
522121	Belanja Jasa Pos dan Giro	1.649.794.000	942.888.708	57,15
522131	Belanja Jasa Konsultan	3.076.657.000	1.858.673.900	60,41
522141	Belanja Sewa	88.387.381.000	73.972.996.467	83,69
522151	Belanja Jasa Profesi	41.048.259.000	31.246.706.828	76,12
522191	Belanja Jasa Lainnya	67.372.016.000	49.412.186.394	73,34
	Jumlah	336.068.306.699	264.958.866.509	78,84

Rincian anggaran dan realisasi belanja barang pemeliharaan disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 22. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pemeliharaan Tahun 2013

MAK	Belanja Pemeliharaan	Anggaran (Rp,00)	Realisasi (Rp,00)	%
523111	Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	131.155.838.000	122.310.135.228	93,26
523119	Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	4.556.582.000	4.099.679.181	89,97
523121	Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	171.510.812.000	146.578.093.665	85,46
523129	Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20.143.667.000	15.535.339.142	77,12
523133	Belanja Biaya Pemeliharaan Jaringan	372.210.000	294.932.625	79,24
523199	Belanja Biaya Pemeliharaan Lainnya	350.169.000	327.186.000	93,44
	Jumlah	328.089.278.000	289.145.365.841	88,13

Rincian anggaran dan realisasi belanja barang perjalanan biasa disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 23. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang Perjalanan Biasa Tahun 2013

MAK	Belanja Perjalanan	Anggaran (Rp,00)	Realisasi (Rp,00)	%
524111	Belanja Perjalanan Biasa	99.674.399.000	84.494.120.704	84,77
524112	Belanja Perjalanan Tetap	3.300.000	-	-
524113	Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota	23.967.270.000	15.433.535.502	64,39
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	47.767.916.000	38.384.028.167	80,36
524119	Belanja Perjalanan Lainnya	222.057.452.400	173.138.379.404	77,97
	Jumlah	393.470.337.400	311.450.063.777	79,15

Rincian anggaran dan realisasi belanja barang perjalanan biasa – luar negeri disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 24. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang Perjalanan Biasa – Luar Negeri Tahun 2013

MAK	Belanja Perjalanan	Anggaran (Rp,00)	Realisasi (Rp,00)	%
524211	Belanja Perjalanan Biasa - Luar Negeri	29.118.678.000	20.032.108.221	68,79
524219	Belanja Perjalanan Lainnya - Luar Negeri	18.745.542.000	12.770.135.407	68,12
	Jumlah	47.864.220.000	32.802.243.628	45,92

Belanja Modal

B.2.2. Belanja Modal

Realisasi belanja modal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2013 adalah sebesar Rp895.149.701.116,00 atau mencapai 82,55% dari anggaran sebesar Rp1.084.333.855.000,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 25. Rincian Realisasi Belanja Modal Tahun 2013

Kode	Rincian Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi Bruto (Rp)	Pengembalian (Rp)	Realisasi Netto (Rp)	%
5311	Belanja Tanah	27.206.143.000	809.225.350	-	809.225.350	2,97

LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2013 - AUDITED

5321	Belanja Peralatan dan Mesin	595.986.524.000	503.861.501.403	(89.472.948)	503.772.028.455	84,53
5331	Belanja Gedung dan Bangunan	439.718.971.000	372.007.947.545	(147.340.241)	371.860.607.304	84,57
5341	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	6.732.068.000	6.178.838.386	(6.942.100)	6.171.896.286	91,68
5361	Belanja Aset Tetap Lainnya	14.690.149.000	12.543.943.721	(8.000.000)	12.535.943.721	85,34
Jumlah		1.084.333.855.000	895.401.456.405	(251.755.289)	895.149.701.116	82,55

Rincian anggaran dan realisasi belanja modal tanah disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 26. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tanah Tahun 2013

MAK	Belanja Tanah	Anggaran (Rp,00)	Realisasi (Rp,00)	%
531111	Belanja Tanah	17.135.245.000	620.708.000	3,62
531112	Belanja Pembebasan Tanah	7.345.251.000	-	-
531114	Belanja Pembuatan Sertifikat Tanah	44.000.000	3.143.350	7,14
531115	Belanja Pengukuran dan Pematangan Tanah	2.681.647.000	185.374.000	6,91
Jumlah		27.206.143.000	809.225.350	2,97

Rincian anggaran dan realisasi belanja modal peralatan dan mesin disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 27. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2013

MAK	Belanja Peralatan dan Mesin	Anggaran (Rp,00)	Realisasi (Rp,00)	%
532111	Belanja Peralatan dan Mesin	585.411.089.000	498.027.361.191	85,07
532112	Belanja Bahan Baku Peralatan dan Mesin	2.500.000	-	-
532113	Belanja Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Peralatan dan Mesin	59.230.000	44.120.000	74,49
532114	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	1.000.000	-	-
532115	Belanja Perencanaan dan Pengawasan Peralatan dan Mesin	6.376.074.000	2.113.745.139	33,15
532116	Belanja Perijinan Peralatan dan Mesin	2.000.000.000	1.872.550.900	93,63
532117	Belanja Pemasangan Peralatan dan Mesin	206.095.000	200.213.750	97,15
532118	Belanja Perjalanan Peralatan dan Mesin	406.112.000	341.983.100	84,21
532121	Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin	1.524.424.000	1.172.054.375	76,89
Jumlah		595.986.524.000	503.772.028.455	84,53

Rincian anggaran dan realisasi belanja modal gedung dan bangunan disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 28. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2013

MAK	Belanja Gedung dan Bangunan	Anggaran (Rp,00)	Realisasi (Rp,00)	%
533111	Belanja Gedung dan Bangunan	375.460.331.000	322.499.601.056	85,89
533113	Belanja Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Gedung dan Bangunan	486.683.000	52.840.000	10,86

LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2013 - AUDITED

533115	Belanja Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan	1.825.100.000	619.384.000	33,94
533118	Belanja Perjalanan Gedung dan Bangunan	1.100.000	-	-
533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	61.945.757.000	48.688.782.248	78,60
	Jumlah	439.718.971.000	371.860.607.304	84,57

Rincian anggaran dan realisasi belanja modal jalan, jembatan dan jaringan disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 29. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Jalan, Jembatan dan Jaringan Tahun 2013

MAK	Belanja Jalan, Jembatan dan Jaringan	Anggaran (Rp,00)	Realisasi (Rp,00)	%
534111	Belanja Jalan dan Jembatan	337.484.000	334.584.000	99,14
534131	Belanja Irigasi	2.544.128.000	2.466.290.300	96,94
534133	Belanja Jaringan	3.384.563.000	3.017.779.701	89,16
534161	Belanja Penambahan Nilai Jaringan	465.893.000	353.242.285	75,82
	Jumlah	6.732.068.000	6.171.896.286	91,68

Rincian anggaran dan realisasi belanja modal aset tetap lainnya disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 30. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun 2013

MAK	Belanja Lainnya	Anggaran (Rp,00)	Realisasi (Rp,00)	%
536111	Belanja Lainnya	14.312.799.000	12.162.929.721	84,98
536121	Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya dan/atau Aset Lainnya	377.350.000	373.014.000	98,85
	Jumlah	14.690.149.000	12.535.943.721	

Rincian realisasi belanja non kas disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 31. Rincian Realisasi Belanja Non Kas Tahun 2013

No	Satker	Donor	Jenis Barang	Register		Nilai
				Nomor	Tanggal	
1	Sekretariat Jenderal	PT.Holcim Indonesia, Tbk	Kapal Penyeberangan	73752601	02/07/2013	9.322.500.000
2	Lapas Semarang	PT. BRI	Peralatan dan Mesin	74429501	06/11/2013	83.850.000
		PT. BRI	Peralatan dan Mesin	74419501	06/11/2013	123.870.000
		Yayasan RS. Islam	Peralatan dan Mesin	73922601	14/08/2013	73.255.800
		Yayasan RS. Islam	Peralatan dan Mesin	74420201	06/11/2013	98.465.000
3	Kanim Tungkal	PT.LPPI, PT. Petrochina Int, PT.Huabei Petroleum Service	Peralatan dan Mesin	74761901	31/12/2013	18.000.000
4	Ditjen Pemasarakatan	International Criminal Investigative Training Assistance Program (ICITAP)	Peralatan dan Mesin, Aset Tak Berwujud	73720201	12/06/2013	33.502.200
Total						9.753.443.000

LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2013 - AUDITED

Penjelasan Neraca **Pos C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA**

Aset Lancar

C.1 ASET LANCAR

Nilai Aset Lancar per 31 Desember 2013 dan 2012 adalah masing-masing sebesar Rp640.347.582.697,00 dan Rp380.233.910.735,00. Aset Lancar merupakan aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Rincian Aset Lancar pada Neraca Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia per 31 Desember 2013 dan 2012 tersaji pada tabel berikut ini:

Tabel 32. Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2013 dan 2012

No	Aset Lancar	Tahun 2013 (Rp,00)	Tahun 2012 (Rp,00)
1	Kas di Bendahara Pengeluaran	2.137.424.659	4.905.638.455
2	Kas di Bendahara Penerimaan	5.739.408.169	5.804.728.975
3	Kas Lainnya dan Setara Kas	10.309.750.010	20.417.269.305
4	Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	10.840.825.002	-
5	Piutang PNPB	185.252.175.906	37.497.955.959
6	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Bukan Pajak	(1.008.600.437)	(12.670.630.903)
7	Piutang PNPB – (netto)	184.243.575.469	24.827.325.056
8	Bagian Lancar Tagihan TP/TGR	386.254.414	178.837.498
9	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Bagian Lancar Tagihan TP/TGR	(6.054.272)	(894.188)
10	Bagian Lancar Tagihan TP/TGR (netto)	380.200.142	177.943.310
11	Persediaan	426.696.399.246	324.101.005.634
Jumlah		640.347.582.697	380.233.910.735

Kas di Bendahara Pengeluaran

C.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang dikuasai dan dikelola Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau disetorkan kembali ke Kas Negara per tanggal neraca.

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia per 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp2.137.424.659,00, sedang saldo per 31 Desember 2012 sebesar Rp4.905.638.455,00 terjadi penurunan sebesar minus Rp2.768.213.796,00 atau turun minus 56,43%. Berikut rincian unit eselon I di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang masih memiliki saldo Kas di Bendahara Pengeluaran.

Tabel 33. Kas di Bendahara Pengeluaran Berdasarkan Unit Eselon I

No	Kanwil/Eselon I	Saldo (Rp,00)	Keterangan
1.	Setjen , dengan rincian:	1.488.946.046	Kelebihan setor pengembalian uang makan, pengembalian UP/TUP kantor wilayah dan satker dibawah koordinasi Setjen, dengan rincian sebagai berikut :
	DKI Jakarta	213.728.452	
	Jawa Barat	689.492	
	Jawa Timur	5.128.089	
	Aceh	12.518.250	
	Sumatera Utara	15.850.250	
	Sumatera Barat	60.141.124	
	Riau	50.832.008	
	Jambi	21.998.966	
	Sumatera Selatan	12.103.760	
	Lampung	18.635.000	
	Kalimantan Barat	7.715.600	
	Kalimantan Tengah	36.439.000	
	Kalimantan Timur	640.600	

LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2013 - AUDITED

	Sulawesi Utara	20.222.528	
	Sulawesi Tenggara	22.551.876	
	NTB	3.991.358	
	NTT	28.955.269	
	Papua	23.218.552	
	Gorontalo	9.680.693	
	Kepulauan Riau	384.248	
	Papua Barat	10.368.199	
	Sulawesi Barat	13.243.001	
	Perwakilan LN	866.963.481	
	Setjen (satker)	32.946.250	
2.	Ditjen Imigrasi	600.248.812	Merupakan Uang Persediaan (UP) maupun Tambahan Uang Persediaan (TUP) satker Ditjen Imigrasi yang belum disetor pada tanggal 31 Desember 2013 dan baru disetor tanggal 7 Januari 2014.
3.	BPSDM	48.229.801	Sisa UP/TUP satuan kerja : <ul style="list-style-type: none"> · BPSDM yang baru disetor pada tanggal 8 dan 10 Januari 2014 total sebesar Rp215.801,00; dan · AKIP yang baru disetor pada tanggal 2 Januari 2014 sebesar Rp48.014.000,00.
Jumlah		2.137.424.659	

Penyetoran atas saldo kas di bendahara pengeluaran per tanggal 31 Desember 2013 sebagai berikut:

Tabel 34. Rincian Penyetoran Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran

No	Nama Satker	NTPN	Tanggal Setor	Rincian (Rp,00)	Nilai (Rp,00)	Keterangan	Lebih/Kurang Setor
1	Kanim Jaktim	412081215090809	07-Jan-14	122.177.575	213.061.225	Sisa UP	
		1003150709111010	07-Jan-14	90.162.625		Sisa UP	
		215080701110005	07-Jan-14	721.025		Sisa UP	
2	Kanwil DKI Jakarta	280389	02-Jan-14	667.227	667.227	Sisa UP	
3	Bapas Bogor	100401151010000	06-Jan-14	689.492	689.492	Sisa UP	
4	BHP Surabaya	509141105150708	02-Jan-14	112.089	5.128.089	Sisa GU	
		501100802000810	02-Jan-14	5.016.000			
5	Lapas Bukit Tinggi	501041313051102	07-Jan-14	5.344	5.344	Sisa UP	
6	Rutan Batu Sangkar	7091410081207	06-Jan-14	4.094.325	4.094.325	Sisa UP	
7	Rupbasan Padang	410130115051104	02-Jan-14	6.486.231	6.486.231	Sisa UP	
8	Lapas Pariaman	411020211110600	02-Jan-14	24.039.000	24.039.000	Sisa UP	
9	Kanim Bukit Tinggi	608020109110415	02-Jan-14	25.516.224	25.516.224	Sisa UP	
10	Rutan Medan	5021303060204	07-Jan-14	275.000	275.000	Sisa UP	
11	Rutan Humbang Hasundutan	615061112081409	20-Jan-14	17.400.000	17.400.000	Sisa UP	
12	Lapas Wnt Medan			-1.824.750	-1.824.750	Kelebihan setor pengembalian Uang makan	
13	Rutan Janthoi	514120605080809	02-Jan-14	102.250	102.250	Sisa UP	
14	Lapas Banda Aceh	308001503140609	02-Jan-14	12.416.000	12.416.000	Sisa UP	
15	Rupbasan Jambi	1302010512060900	13-Jan-14	6.966	6.966	Sisa UP	
16	Lapas Sarolangun	1041011060312	03-Jan-14	21.992.000	21.992.000	Sisa UP	
17	Kanwil Kepri	1505100106110500	08-Jan-14	384.248	384.248	Pengembalian sisa UP	
18	Kanwil Riau	515111215110101	03-Jan-14	260.000	260.000	Sisa TUP	
19	Kanim Dumai	1503031007060900	08-Jan-14	20.572.008	20.572.008	sisa UP RM	

LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2013 - AUDITED

20	Rutan Rengat	8100815081305	03-Jan-14	30.000.000	30.000.000	Sisa UP	
21	Bapas Bandar Lampung	1009000700081410	02-Jan-14	18.635.000	18.635.000	Sisa UP	
22	Rupbasan Palembang	311111115150411	10-Jan-14	12.103.760	12.103.760	Sisa UP	
23	Kanim Bitung	105071206101103	03-Jan-14	27.293	27.293	Sisa UP	
24	Rupbasan Manado	1400000109070400	03-Jan-14	3.821.172	3.821.172	Sisa UP	
25	Lapas Anak Tomohon	207110403030210	24-Jan-14	16.374.063	16.374.063	Sisa UP	
26	Bapas Kupang	503010905080909	06-Jan-14	13.963.000	23.239.269	Sisa TUP TA 2013	
		1510010605140510	09-Jan-14	8.979.269		Sisa UP	
		1101081505090000	22-Jan-14	297.000		Sisa UP	
27	Kanim Kupang	1513021314010710	03-Jan-14	5.716.000	5.716.000	Setoran kembali TUP UM pegawai	
28	Rutan Raba/Bima	1202010004150610	08-Jan-14	3.991.358	3.991.358	Sisa TU	
29	Cabrut Mamasa	1202040300050110	09-Jan-14	13.243.001	13.243.001		
30	Lapas Boalemo	413070208100009	03-Jan-14	5.319.693	9.680.693	Sisa UP	
		913051000031004	03-Jan-14	4.361.000		Sisa UP	
31	Bapas Bau-Bau	906001103150602	10-Jan-14	22.551.876	22.551.876	Sisa UP	
32	Rutan Bengkayang	315000812051108	06-Jan-14	7.715.600	7.715.600	Sisa UP	
33	Rutan Samarinda	1102000202080310	07-Jan-14	510.950	640.600	Sisa UP	
		1102000202080310	09-Jan-14	129.650		Sisa UP	
34	Rutan Tanah Grogot	SP2D : 00122	31-Des-13	13.090.000	30.000.000	Sisa UP	
		SP2D : 00123	31-Des-13	16.910.000			
35	Rutan Tamiyang Layang	1302040504070100	13-Jan-14	11.683.000	11.683.000	Sisa UP	
36	Rutan Kuala Kapuas	10030912050607	13-Jan-14	24.756.000	24.756.000	Sisa UP	
37	Kanim Manokwari	1206208007110900	06-Jan-14	10.368.199	10.368.199	Sisa UP	
38	Kanim Merauke	1206100114040310	06-Jan-14	1.177.552	1.177.552	Sisa UP	
39	Kanim Jayapura	909110413030115	07-Jan-14	2.041.000	2.041.000	Sisa UP	
40	Bapas Jayapura	205050003020307	02-Jan-14	20.000.000	20.000.000	Sisa UP	
41	Setjen	606000515110415	02-Jan-14	185.000	185.000	Sisa UP	
42	BPSDM	115140807000206	08-Jan-14	85.800	215.801	Sisa UP	
		1413000707020400	10-Jan-14	130.001		Sisa UP	
43	Pusjianbang	315051201011212	17-Jan-14	32.761.250	32.761.250		
44	AKIP	11000411020909	02-Jan-14	1.000.000	48.014.000	Sisa UP	
		904070209091315	02-Jan-14	5.760.000		Sisa UP	
		1010091104130500	02-Jan-14	10.000.000		Sisa UP	
		1508130413060100	02-Jan-14	8.180.000		Sisa UP	
		1209090101070410	02-Jan-14	6.600.000		Sisa UP	
		1210020008020300	02-Jan-14	15.787.000		Sisa UP	
		0701010213130108	02-Jan-14	687.000		Sisa UP	
45	Ditjen Imigrasi	1511030101120910	07-Jan-14	40.010.116	600.248.812	Sisa UP	
		1110000909071100		560.238.696		Sisa UP	
46	Kuching	1511011411150600	16-Jan-14	36.634.997	36.996.775	Sisa UP/TUP	361.778
47	Tokyo	1415000402100600	09-Jan-14	43.015.378	40.058.548	Sisa UP/TUP	(2.956.830)
48	Davao	206110810040111	09-Jan-14	136.354	53.717.422	Sisa UP/TUP	53.581.068
		602031405080102	16-Jan-14	131.539		Sisa UP/TUP	53.449.529
49	Beijing	207001206090113	02-Jan-14	92.742.240	90.975.980	Sisa UP/TUP	(1.766.260)

LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2013 - AUDITED

50	Singapura	303000609121005	31-Des-13	96.153.175	92.729.636	Sisa UP/TUP	(3.423.539)
51	Guangzhou	1104060312100710	10-Jan-14	101.742.342	99.481.478	Sisa UP/TUP	(2.260.864)
52	Tawao	1502060404050210	16-Jan-14	76.523.051	107.746.324	Sisa UP/TUP	31.223.273
53	Den Haag	603041109070410	16-Jan-14	400.619.076	396.661.305	Sisa UP/TUP	(3.957.771)
54	Hongkong	411030409091102	30-Jul-13	9.446.220	13.028.803	Sisa UP/TUP	3.582.583
		1405010204090600	07-Jan-14	10.536.003		Sisa UP/TUP	6.953.420
55	Los Angeles	1214130102011100	09-Jan-14	808.696	6.596.196	Sisa UP/TUP	5.787.500
		600131213110008	09-Jan-14	2.933		Sisa UP/TUP	5.784.567
56	Johor Bahru	1513101500140610	16-Jan-14	3.417.359	3.367.613	Sisa UP/TUP	(49.746)
57	Kuala Lumpur	209000614030204	07-Jan-14	10.711.392	9.947.201	Sisa UP/TUP	(764.191)
58	Berlin	1400071211130510	30-Agust-13	708.180	11.289.977	Sisa UP/TUP	10.581.797
		510111005010701	21-Okt-13	197.107		Sisa UP/TUP	10.384.690
		508001305100508	09-Jan-14	12.304.318		Sisa UP/TUP	(1.919.628)
59	Penang	110091209020403	07-Jan-14	22.235.341	19.507.809	Sisa UP/TUP	(2.727.532)
60	Jeddah	110060306130803	31-Des-13	-12.435.166	-12.450.179	Sisa UP/TUP	(15.013)
61	Sidney	815080705100214	30-Des-13	-5.713.521	-5.713.521	Sisa UP/TUP	
62	Bangkok	1212030714151300	31-Des-13	-2.911.178	-2.911.178	Sisa UP/TUP	
63	Dili Timor Leste	106080905070611	17-Jul-13	-96.751	-96.751	Sisa UP/TUP	
Jumlah				2.137.424.659			

Terdapat reklasifikasi karena ada selisih kurs dalam pengembalian UP pada Perwakilan Imigrasi di Luar Negeri sebesar Rp44.881.492,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 35. Selisih Kurs yang Timbul Saat Penyetoran Ke Kas Negara pada Perwakilan Imigrasi di Luar Negeri

No	Satker	Selisih Kurs (Rp,00)
1.	Davao	325.802
2.	Bangkok	150.018
3.	Denhaag	26.749.313
4.	Berlin	11.977.916
5.	Tawao	3.839.904
6.	Jeddah	1.838.539
Jumlah		44.881.492

Kas di Bendahara Penerimaan

C.1.2. Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan mencakup seluruh kas, baik saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai, yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas fungsional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terkait PNBPN. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBPN yang berlaku pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. Saldo kas ini mencerminkan saldo yang berasal dari pungutan yang sudah diterima oleh Bendahara Penerimaan dan belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca.

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia per 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp5.739.408.169,00 dan per 31 Desember 2012 sebesar Rp5.804.728.975,00. Jika dilihat dari saldo 2012, maka saldo per 31 Desember 2013

LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2013 - AUDITED

terjadi penurunan sebesar minus Rp65.320.806,00 atau turun minus 1,13%. Berikut rincian unit eselon I di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang masih memiliki saldo Kas di Bendahara Penerimaan periode 31 Desember 2013 dan status penyetorannya ke Kas Negara.

Tabel 36. Rincian Kas di Bendahara Penerimaan Berdasarkan Unit Eselon I

No	Kanwil/Eselon I	Saldo (Rp,00)	Keterangan
1.	Setjen, dengan rincian:	1.074.955.670	Merupakan sisa tunjangan kinerja, pendapatan visa dan paspor, pengembalian atas belanja BAMA, jasa giro pada kantor wilayah dan satker setjen, dengan rincian sebagai berikut :
	Jawa Barat	5.375.000	
	Jawa Timur	34.864.052	
	Sumatera Barat	3.605.000	
	Riau	48.406.759	
	Jambi	23.533.620	
	Lampung	860.828	
	Kalimantan Selatan	1.950.000	
	Kalimantan Timur	255.000	
	Sulawesi Utara	6.885.216	
	Bali	70.105.000	
	NTB	15.540.000	
	Kepulauan Riau	100.020.000	
	Setjen (satker)	763.555.195	
2.	Ditjen AHU	280.810.000	Pendapatan yang diterima per 31 Desember 2013, telah disetor 2 Januari 2014.
3.	Ditjen Imigrasi	4.037.800.844	Pendapatan Visa On Arrival (VOA) tahun 2013 yang sampai dengan 31 Desember 2013 belum disetor ke kas negara dan telah disetor ke kas Negara pada 2 Januari 2014.
4.	Ditjen HKI	345.841.655	Merupakan saldo bank yang dikarenakan berkas pendaftaran HKI belum diterima oleh Ditjen HKI sebesar Rp342.981.655,00 sehingga belum tercatat sebagai penerimaan negara. Sisanya sebesar Rp2.860.000,00 merupakan kelebihan pembayaran permohonan paten dan merek yang belum dapat disetorkan.
Jumlah		5.739.408.169	

Penyetoran atas saldo kas di bendahara pengeluaran per tanggal 31 Desember 2013 sebagai berikut:

Tabel 37. Rincian Penyetoran Saldo Kas di Bendahara Penerimaan

No	Nama Satker	NTPN	Tanggal Setor	Nilai (Rp,00)	Rincian	Keterangan
1	Kanim Bandung			1.965.000		Pendapatan e-pasport dikembalikan ke pihak ketiga
2	Kanim Tasikmalaya	305010106050011	02-Jan-14	3.410.000		Pendapatan pasport
3	Bhp Surabaya	1104150401140000	09-Jan-14	34.804.777		sewa
4	Kanim Pamekasan	1514030607031200	13-Jan-14	6.422		jasa giro
5	Kanim Tg. Perak	1415020201050700	07-Jan-14	52.853		jasa giro
6	Kanim Ngurah Rai	1000110202101100	02-Jan-14	70.105.000		PNPB yang belum d setor ke kas negara
7	Kanim Tembilahan	101414011120215	02-Jan-14	1.121		jasa giro
8	Kanim Bengkalis	Setor ke rekening penampungan penerimaan layanan keimigrasian (BNI)		1.785.000		

LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2013 - AUDITED

9	Kanim Siak Sri Indrapura	202120302010007	02-Jan-14	4.845.000		penerimaan dokim
10	Kanim Pekanbaru	1114070112101200	03-Jan-14	19.380.000		penerimaan dokim
11	Lapas Bangkinang	2030303152106	06-Feb-14	22.395.638	20.194.188	pembayaran kelebihan bama
		1212010313080110	06-Feb-14		1.817.750	kurang bayar sewa rumah dinas
		121301000901211	06-Feb-14		383.700	kelebihan pembayaran lemari arsip
12	Lapas Sarolangun	312151410100903	10-Jan-14	68.620		jasa giro bank
13	Kanim Jambi	1102010806120400	06-Jan-14	23.465.000		pendapatan keimigrasian
14	Kanim Bukit Tinggi	1301000213131000	05-Jan-14	1.005.000	250.000	Pendapatan paspor
		Setor ke BRI	04-Feb-14		755.000	Pendapatan paspor
15	Kanim Padang	1104071210110500	03-Jan-14	2.600.000		Pendapatan paspor
16	Kanim Kotabumi	108100315010708	02-Jan-14	860.828	828	jasa giro
		410111003080007	09-Jan-14		455.000	pengganti paspor rusak
		1550155058110190	09-Jan-14		405.000	setoran non paspor
17	Kanim Tg. Balai Karimun	Setor ke rekening penampungan penerimaan layanan keimigrasian (BNI)	27-Jan-14	16.845.000		Pendapatan surat keterangan, visa dan paspor
18	Kanim Dabo Singkep	511070014020015	02-Jan-14	9.480.000	1.980.000	Pendapatan surat keterangan, visa dan paspor
		801061510100701	02-Jan-14		7.500.000	Pendapatan surat keterangan, visa dan paspor
19	Kanim Batam	1201030903031400	03-Jan-14	73.695.000	11.165.000	Pendapatan surat keterangan, visa dan paspor
		415041411090808	03-Jan-14		41.500.000	Pendapatan surat keterangan, visa dan paspor
		114021503090202	06-Jan-14		18.535.000	Pendapatan surat keterangan, visa dan paspor
		Setor ke rekening penampungan penerimaan layanan keimigrasian (BNI)	27-Jan-14		2.495.000	Pendapatan surat keterangan, visa dan paspor
		801061510100701	02-Jan-14		7.500.000	Pendapatan surat keterangan, visa dan paspor
20	Kanim Tarakan	1010011211130000	07-Jan-14	255.000		Pendapatan surat keterangan, visa dan paspor
21	Kanim Banjarmasin	206050010080903	02-Jan-14	1.950.000		Pendapatan Jasa Visa/paspor yang belum disetorkan
22	Kanim Bitung	1105000900130110	03-Feb-14	6.885.216		Pendapatan Jasa Visa/paspor yang belum disetorkan
23	Kanim Mataram	601150304071405	02-Jan-14	15.540.000	13.010.000	pendapatan jasa paspor
			31-Dec-13		2.530.000	retur selisih dengan BNI
24	Ditjen AHU	1312001408060500	02-Jan-14	280.810.000		Pelayanan Jasa Hukum
25	Ditjen HKI			345.841.655		saldo bank yang dikarenakan berkas pendaftaran HKI belum diterima oleh Ditjen HKI sebesar Rp343.041.655,00 sehingga belum tercatat sebagai penerimaan negara sisanya sebesar Rp2.800.000,00 merupakan kelebihan pembayaran permohonan paten dan merek yang belum dapat disetorkan.
26	Setjen	707151309061408	22-Jan-14	763.555.195		pengembalian tuncker
27	Ditjen Imigrasi	101020407151202	02-Jan-14	4.037.800.844		VOA

LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2013 - AUDITED

*Lainnya
Setara Kas*

dan

	Jumlah		5.739.408.169
--	---------------	--	----------------------

C.1.3. Kas Lainnya dan Setara Kas

Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas yang berada di bawah tanggung jawab bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari sisa UP/TUP, baik saldo rekening di bank maupun uang tunai per tanggal neraca.

Akun Kas Lainnya dan Setara Kas di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia memiliki beberapa kontra akun yaitu Pendapatan yang Ditangguhkan, Utang Kepada Pihak Ketiga dan Ekuitas Dana Lancar Lainnya. Hal ini sesuai dengan Surat Edaran Dirjen Perbendaharaan Nomor S.4080/PB/2009 tanggal 28 Juli 2009.

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia per 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp10.309.750.010,00 dan per 31 Desember 2012 sebesar Rp20.417.269.305,00. Jika dilihat dari saldo 2012, maka saldo per 31 Desember 2013 terjadi penurunan sebesar minus Rp10.107.519.295,00 atau turun minus 49,50%.

Tabel 38. Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas Unit Eselon I/ Kanwil

No.	Eselon I/ Kanwil	Saldo (Rp,00)	Keterangan
1	Setjen	92.742.240	Terdapat dana dari Perwakilan Beijing pada tanggal 31 Desember 2013 jam 16.00 WIB.
2	Ditjen AHU	85.318.667	Belanja perjalanan dinas keluar negeri yang dibatalkan dan telah dikembalikan ke kas negara tanggal 3 Februari 2014.
3	Ditjen PAS	62.011.532	Hibah
4	BPSDM	1.534.320	Sisa Tunjangan Kinerja TA 2013 pada satker AKIP yang baru disetor pada Januari 2014.
5	DKI Jakarta	19.413.186	Pengembalian Tunjangan Kinerja ke rekening Bendahara Penerimaan Sekjen Tanggal 6 Januari 2014.
6	Jawa Barat	164.111.124	Pengembalian BAMA Desember 2013.
7	Jawa Timur	238.600.948	Pengembalian BAMA Desember 2013 dan Utang Pihak Ketiga.
8	Sumatera Utara	40.116	Pendapatan jasa giro, telah disetor ke kas negara tanggal 6 Januari 2014.
9	Riau	4.593.000	Honor yang belum dibayarkan.
10	Lampung	84.594.948	Uang tunjangan kinerja sebesar Rp73.961.850 periode Desember 2013 yang belum dibagikan kepada PNS, dan pajak yang belum disetor ke kas negara sebesar Rp10.633.098.
11	Kalimantan Barat	1.195	Pendapatan Jasa Giro per 31 Desember 2013 pada Kanim Sanggau, telah disetor ke Kas Negara pada tanggal 2 Januari 2014.
12	Kalimantan Timur	8.753.306.750	Merupakan Dana Hibah TA 2013 yang belum terealisasi pada Rutan Klas IIA Samarinda sebesar Rp2,629,572,900 dan Lapas Narkotika Samarinda senilai Rp6.123.733.850,00.
13	Sulawesi Utara	20.000	Sisa dana tunjangan kinerja yang disetor di bulan Januari 2014
14	Sulawesi Tengah	10.760.567	Disetor ke Kas Negara tanggal 07 Januari 2014 sebesar Rp2.757.167,00 dan pada tanggal 09 Januari 2014 sebesar Rp8.003.400,00.
15	Maluku	2.269.350	Sisa uang tunjangan kinerja Cabrut Wonreli yang baru disetor pada Januari 2014.
16	Bali	1.091.850	Sisa uang tunjangan kinerja Cabrut Wonreli yang baru disetor pada Januari 2014.
17	NTB	758.458	Sisa tunjangan kinerja dan kelebihan pengembalian tunker.
18	Papua	5.207.274	Lapas Merauke sebesar Rp3.273.774,00 dan pada Lapas Narkotika sebesar Rp1.933.500,00
19	Bengkulu	4.600	Sisa uang tunjangan kinerja Cabrut Wonreli yang baru disetor pada Januari 2014.
20	Maluku Utara	100.030	Biaya Adm. Buku Rupbasan Ternate, uangnya masih ada dalam rekening.

LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2013 - AUDITED

21	Banten	769.205.198	Sisa Uang Makan dan Pengembalian BAMA Desember 2013 sebesar Rp52.165.198 dan sisa dana pada rekening Hibah sebesar Rp717.040.000
22	Kepulauan Riau	9.366.357	Sisa pengembalian BAMA 2013, telah disetor ke kas negara Januari 2014.
23	Papua Barat	3.736.300	Sisa pengembalian tunjangan kinerja Des Cabrutan Teminabuhan. Telah disetor ke kas negara Januari 2014
24	Sulawesi Barat	962.000	Pengembalian uang makan.
	Jumlah	10.309.750.010	

Akun Kas Lainnya dan Setara Kas di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia memiliki beberapa kontra akun yaitu Pendapatan yang Ditangguhkan, Utang Kepada Pihak Ketiga dan Ekuitas Dana Lancar Lainnya. Hal ini sesuai dengan Surat Edaran Dirjen Perbendaharaan Nomor S.4080/PB/2009 tanggal 28 Juli 2009. Penjelasan kontra akun Kas Lainnya dan Setara Kas dapat dilihat sebagaimana tabel berikut:

Tabel 39. Kontra Akun Kas Lainnya dan Setara Kas

Nama Akun	Debit (Rp,00)	Kredit (Rp,00)
Kas Lainnya Setara Kas	10.309.750.010	
Pendapatan Yang Ditangguhkan		483.799.235
Utang Kepada Pihak Ketiga		293.592.493
Ekuitas Dana Lancar lainnya		9.532.358.282
Total	10.309.750.010	10.309.750.010

Akun Kas Lainnya dan Setara Kas pada Pendapatan yang Ditangguhkan digunakan untuk mencatat sisa Belanja Bahan Makanan (Bama), Jasa Giro dan sisa Belanja Pegawai yang belum disetorkan ke Kas Negara per 31 Desember 2013. Akun Kas Lainnya dan Setara Kas pada Utang Kepada Pihak Ketiga digunakan untuk mencatat sisa Pengembalian Tunjangan Kinerja Tahun 2013 yang masih berada di tangan Bendahara Penerimaan Setjen dan di Bendahara Pengeluaran Satker per 31 Desember 2013. Sedangkan akun Kas Lainnya dan Setara Kas pada Ekuitas Dana Lancar Lainnya digunakan untuk mencatat sisa hibah yang belum dibelanjakan per 31 Desember 2013.

Penjelasan mekanisme hibah berupa uang di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor SEK.KU.03.03-155, sebagaimana terlampir.

C.1.4. Belanja Dibayar Dimuka (*prepaid*)

Saldo Belanja Dibayar Dimuka Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia per 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp10.840.825.002,00 dan per 31 Desember 2012 sebesar Rp0,00. Saldo belanja dibayar dimuka sebesar Rp10.840.825.002,00 dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 40. Rincian Belanja Dibayar Dimuka

No	Unit Kerja	Saldo (Rp)
1.	Ditjen AHU	521.842.449
2.	Lapas Wamena	150.000
3.	Kanim Jakarta Selatan	909.865.071
4.	Kanim Jakarta Utara	9.408.967.482
	Jumlah	10.840.825.002

LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2013 - AUDITED

**Piutang
Penerimaan
Negara Bukan
Pajak**

C.1.5. Piutang Bukan Pajak

Piutang PNBPN merupakan hak yang akan diterima dalam jangka waktu 12 bulan setelah tanggal neraca. Saldo Piutang PNBPN Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia per 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp185.252.175.906,00 dan per 31 Desember 2012 sebesar Rp37.497.955.959,00. Jika dilihat dari saldo tahun 2012, maka per 31 Desember 2013 terjadi peningkatan sebesar Rp147.754.219.947,00 atau naik 394,03%.

Tabel 41. Rincian Piutang Bukan Pajak

No	Eselon I/Kanwil	Saldo (Rp,00)	Keterangan
1.	Jawa Barat	168.366.360	Surat Perjanjian Koperasi dengan Kanwil Jawa Barat, Klaim Jaminan Bank.
2.	Jawa Tengah	1.089.272.348	LHP BPK Tahun 2012.
3.	Sumatera Barat	8.665.954	Temuan Itjen Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atas kelebihan bayar sprints pada satker Kanwil Sumatera Barat
4.	Riau	79.281.604	LHP BPK dan Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atas kelebihan pembayaran : - CV. Panca Mandiri Konsultas (2009), nilai kontrak Rp64.586.604,00; - PT. Rizki Maulana Consultan (2008), nilai kontrak Rp11.000.000,00; - CV. Scala Maulana Pratama, nilai kontrak Rp9.775.000,00; - CV. Batera Indah, nilai kontrak Rp22.425.000,00.
5.	Jambi	36.940.750	Denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan pembangunan tiga unit pos jaga atas pada LP Narkotika Muara Sabak oleh CV. Sinebangan selaku kontraktor
6.	Sumatera Selatan	1.264.248.006	LHP temuan BPK tahun 2013
7.	Kalimantan Barat	15.000.000	Piutang Rp15.000.000,00 berasal dari Lapas Klas II B Singkawang yang merupakan rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan Itjen Tahun 2013 untuk pengembalian keuntungan rekanan CV. Wali Perdana Sakti atas kegiatan pengadaan Bahan makanan Narapidana dan Tahanan yang belum disetor pada akhir periode neraca. Dana tersebut sudah disetor pada kas negara melalui Bank Negara Indonesia Cabang Singkawang tanggal 03/01/2014.
8.	Kalimantan Selatan	44.752.460	Rekomendasi temuan pemeriksaan BPK
9.	Sulawesi Tenggara	361.704.672	LHP temuan BPK tahun 2012
10.	Maluku	183.493.156	Tindak lanjut temuan pemeriksaan atas kelebihan bayar
11.	Papua	177.047.247	Tindak Lanjut temuan BPK, BPKP dan Itjen : • Bapas Jayapura a/n Bodowin Rumbiak sebesar Rp4.764.500,00 (LHP Itjen 2013) • Lapas Wamena a/n CV. Citra Daya Bina Konsultan Rp44.750.000,00; PT. Alam Raya Timika Rp41.989.481,00; PT. Topas Papua Rp16.557.775,00; PT. Topas Papua Rp34.374.107,00 (LHP BPK 2008) • Kanwil Papua a/n CV. Casuarina Rp7.351.000,00 (LHP BPK 2013); CV. Kautsar Rp3.465.384,00 (LHP BPKP 2000) • Rupbasan a/n CV. Media Architecths Rp23.795.000,00 (LHP BPK 2008)
12.	Bengkulu	444.768.293	LHP temuan BPK TA 2012 atas kelebihan bayar pekerjaan
13.	BPHN	140.482.246	LHP temuan BPK 2012
14.	Ditjen Imigrasi	2.272.661.500	Tindak lanjut temuan BPK atas kelebihan bayar pekerjaan atas nama : • PT. Indo Mukti Nusantara Rp822.661.500,00 • PT. Central Auto Comperindo Rp150.000.000,00

LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2013 - AUDITED

			<ul style="list-style-type: none"> PT. Gagasan AdiNusa Rp1.300.000.000,00
15.	Ditjen HKI	176.230.493.075	<ul style="list-style-type: none"> Temuan BPK atas paten berstatus BDH sebesar Rp130.492.480.000,00; Piutang Keterlambatan biaya pemeliharaan Paten yang lewat jatuh tempo kurang dari 3 tahun sebesar Rp35.112.001.325,00. PAPS (Pembatalan Atas Permintaan Sendiri) adalah putang atas paten yang diajukan pembatalannya oleh pemohon tapi masih ada biaya pemeliharaan yang belum dibayar sebesar Rp10.626.011.750,00. <p>BDH (Batal Demi Hukum) atau paten yang dibatalkan demi hukum karena selama 3 tahun berturut-turut tidak membayar biaya pemeliharaan sehingga patennya menjadi <i>public domain</i> dan tidak dilindungi lagi.</p>
16.	Sekretariat Jenderal	2.734.998.235	<ul style="list-style-type: none"> sewa tanah oleh PT. Paramita Bangun sebesar Rp2.720.500.000,00 untuk masa sewa Tahun 2013 yang baru dibayar di Bulan April 2014 kurang bayar sewa aset oleh Pewaralaba <i>Double Dips Coffee</i> di Gedung Sekretariat Jenderal sebesar Rp14.498.235,00 yang baru dibayar di Bulan Maret 2014
Jumlah		185.252.175.906	

Tabel 42. Rincian Piutang Bukan Pajak Per Transaksi

No	Rincian	Saldo (Rp,00)
1.	Surat Perjanjian Koperasi	168.366.360
2.	Temuan BPK	124.641.818.517
3.	Temuan Itjen	23.665.954
4.	Denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan	36.940.750
5.	Piutang	60.381.384.325
Jumlah		185.252.175.906

Atas nilai piutang bukan pajak tersebut belum menunjukkan potensi PNBPN yang dikelola oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Hal ini karena Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia belum selesai melaksanakan penatausahaan dan penagihan atas PNBPN terutang biaya pemeliharaan tahunan paten, kekurangan bayar atas permintaan pendaftaran merek sebesar pada Ditjen HKI, dan PNBPN terutang dari persetujuan pemakaian nama pada Ditjen AHU. Penatausahaan piutang bukan pajak terkendala karena Ditjen HKI harus melakukan validasi paten terhadap dokumen PAPS, alamat pemegang paten yang tidak dikenali, dan sedang masa migrasi database paten dari aplikasi lama ke aplikasi IPAS. Ditjen AHU belum selesai melaksanakan penatausahaan piutang bukan pajak karena tidak adanya modul pembayaran pada aplikasi Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) dan harus memverifikasi bukti pembayaran PNBPN dengan notaris. Potensi piutang bukan pajak dari biaya pemeliharaan paten yang belum ditatausahakan diperkirakan atas 3.462 nomor identitas paten yang seharusnya dapat diberikan status Batal Demi Hukum (BDH), dengan rincian:

a. Sebanyak 1.849 paten yang Surat Pemberitahuan Pemenuhan Kewajiban (SPPK) nya

LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2013 - AUDITED

terkirim kembali ke Ditjen HKI;

- b. Sebanyak 1.504 paten dari hasil validasi dan inventarisasi Ditjen HKI;
- c. Sebanyak 66 paten merupakan pemegang paten dalam negeri; dan
- d. Sebanyak 43 paten telah berstatus public domain namun masih memiliki tunggakan kewajiban pembayaran biaya pemeliharaan selama 3 tahun berturut-turut.

Potensi piutang bukan pajak dari kekurangan pembayaran atas permohonan pendaftaran merek dari Tahun 2012 s.d 2014 sebesar Rp1.657.900.000,00, dengan rincian permohonan yang sudah disurati tahun 2012 s.d 2014 Rp1.210.000.000,00 dan permohonan yang akan disurati bulan Januari 2013 s.d Juli 2013 sebesar Rp447.900.000,00.

Potensi piutang bukan pajak dari persetujuan pemakaian nama perseroan yang belum selesai ditagih dan ditatausahakan sebesar Rp7.356.400.000,00 dengan rincian:

- a. Sisa tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK atas tunggakan persetujuan pemakaian nama perseroan dari Tahun 2009 s.d. 2012 sebanyak 6.637 nama perseroan senilai Rp1.327.400.000,00; dan
- b. Pemakaian nama perseroan selama Tahun 2013 yang telah diberikan persetujuan oleh Ditjen AHU sebanyak 29.178 nama perseroan yang belum dilakukan pembayaran PNPB oleh notaris senilai Rp5.835.600.000,00.

C.1.6. Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang PNPB

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang jangka pendek yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang sehingga dapat diketahui Nilai Piutang Bersih yang Dapat Direalisasikan (NRV). Penyisihan piutang tidak tertagih dilakukan sesuai dengan Peraturan Dirjen Perbendaharaan Negara Nomor PER-82/PB/2011 tanggal 30 November 2011 tentang Pedoman Akuntansi Penyisihan Piutang Tak Tertagih dan formula penghitungan sesuai Surat Edaran Sekjen Nomor SEK.KU.03.03-156 tentang Kualitas Piutang PNPB dan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih tanggal 7 November 2012. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia baru melakukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih mulai Tahun 2012.

Saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang PNPB Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia per 31 Desember 2013 adalah sebesar minus Rp1.008.600.437,00 sedangkan per 31 Desember 2012 adalah minus Rp12.670.630.903,00. Berikut adalah rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang PNPB pada satuan kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia :

**Tabel 43. Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-
Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak**

No	Uraian	Nilai Piutang (Rp,00)	Nilai Penyisihan (Rp,00)
1	Ditjen HKI	176.230.493.075	(881.152.465)
2	Setjen (satker)	2.734.998.235	(13.674.992)

LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2013 - AUDITED

3	Ditjen Imigrasi	2.272.661.500	(11.363.308)
4	Sumatera Selatan	1.264.248.006	(6.321.240)
5	Jawa Tengah	1.089.272.348	(5.446.362)
6	Bengkulu	444.768.293	(2.223.841)
7	Sulawesi Tenggara	361.704.672	(1.808.522)
8	Maluku	183.493.156	(917.466)
9	Papua	177.047.247	(83.224.794)
10	Jawa Barat	168.366.360	(841.832)
11	B P H N	140.482.246	(702.411)
12	Riau	79.281.604	(396.408)
13	Kalimantan Selatan	44.752.460	(223.762)
14	Jambi	36.940.750	(184.704)
15	Kalimantan Barat	15.000.000	(75.000)
16	Sumatera Barat	8.665.954	(43.330)
	Jumlah	185.252.175.906	(1.008.600.437)

**Piutang
Penerimaan
Negara Bukan
Pajak (Netto)**

C.1.7. Piutang Bukan Pajak (*Netto*)

Saldo Piutang Bukan Pajak (*Netto*) Kementerian Hukum dan Hak asasi Manusia per 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp184.243.575.469,00 dan per 31 Desember 2012 sebesar Rp24.827.325.056,00. Jika dilihat dari saldo 2012, maka per 31 Desember 2013 terjadi peningkatan sebesar Rp159.416.250.415,00 atau naik 642,10%. Berikut adalah rincian Piutang PNBPN *Netto* pada satuan kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia per 31 Desember 2013 :

Tabel 44. Rincian Piutang PNBPN *Netto*

Uraian	Nilai (Rp,00)
Piutang Bukan Pajak	185.252.175.906
Penyisihan Piutang Bukan Pajak	(1.008.600.437)
Piutang Bukan Pajak (<i>Netto</i>)	184.243.575.469

Perhitungan Piutang PNBPN *Netto* adalah sebagai berikut:

Tabel 45. Perhitungan Piutang PNBPN *Netto* per Satuan Kerja

No	Uraian	Piutang (Rp)	Penyisihan (Rp)	Piutang (<i>Netto</i>) Rp
1	Ditjen HKI	176.230.493.075	(881.152.465)	175.349.340.610
2	Setjen (satker)	2.734.998.235	(13.674.992)	2.721.323.243
3	Ditjen Imigrasi	2.272.661.500	(11.363.308)	2.261.298.192
4	Sumatera Selatan	1.264.248.006	(6.321.240)	1.257.926.766
5	Jawa Tengah	1.089.272.348	(5.446.362)	1.083.825.986
6	Bengkulu	444.768.293	(2.223.841)	442.544.452
7	Sulawesi Tenggara	361.704.672	(1.808.522)	359.896.150
8	Maluku	183.493.156	(917.466)	182.575.690
9	Jawa Barat	168.366.360	(841.832)	167.524.528
10	B P H N	140.482.246	(702.411)	139.779.835
11	Papua	177.047.247	(83.224.794)	93.822.453
12	Riau	79.281.604	(396.408)	78.885.196
13	Kalimantan Selatan	44.752.460	(223.762)	44.528.698
14	Jambi	36.940.750	(184.704)	36.756.046
15	Kalimantan Barat	15.000.000	(75.000)	14.925.000
16	Sumatera Barat	8.665.954	(43.330)	8.622.624
	Jumlah	185.252.175.906	(1.109.479.300)	184.243.575.469

**Bagian Lancar
Tagihan Tuntutan**

C.1.8 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2013 - AUDITED

**Perbendaharaan/
Tuntutan Ganti
Kerugian
(TP/TGR)**

merupakan hak atau klaim terhadap pihak lain yang belum diselesaikan per tanggal neraca yang akan jatuh tempo dalam 12 bulan atau kurang. Klaim tersebut didasarkan pada Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) yang dibuat pihak yang telah menyebabkan kerugian keuangan negara.

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia per 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp386.254.414,00 dan per 31 Desember 2012 sebesar Rp178.837.498,00. Jika dilihat dari saldo tahun 2012, maka per 31 Desember 2013 terjadi peningkatan sebesar Rp207.416.916,00 atau naik 115,98%. Berikut adalah rincian Bagian Lancar TP/TGR pada satuan kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia :

Tabel 46. Rincian Bagian Lancar Tagihan TP/TGR

No	Eselon I/Kanwil	Saldo (Rp,00)	Keterangan
1.	Setjen	7.400.000	TGR atas nama Sorta Rp5.000.000,00 dan Budiman Rp2.400.000,00
2.	Ditjen AHU	7.529.000	TP/TGR atas nama Dedy A. Kusnadi sebesar Rp2.000.000,00 (telah meninggal dunia, saat ini dalam proses penghapusan oleh Bag. Perbendaharaan), Rizah sebesar Rp279.000,00 serta Fajar Ari Saputra sebesar Rp5.250.000,00
3.	Ditjen Imigrasi	13.752.000	TP/TGR a/n Sahala Pasaribu pada satker Ditjen Imigrasi
4.	BPHN	2.400.000	TP/TGR a/n Suhandha
5.	DKI Jakarta	12.513.000	TP/TGR atas nama Zulfikar pada Satker Kanim Jakarta Utara.
6.	Jawa Barat	8.749.992	TP/TGR atas nama Zulfikar pada Satker Kanwil Jawa Barat dan TP/TGR atas nama Aditya Nugraha pada Satker Kanim Sukabumi.
7.	Jawa Timur	30.000.000	TP/TGR atas nama Darwanto pada Satker Kanim Surabaya.
8.	Jambi	88.300.000	TP/TGR a/n Drs. Ruslan, MM pada satker Kanwil Jambi.
9.	Sumatera Selatan	23.314.284	TP/TGR a/n Kepala Divisi Imigrasi.
10.	Maluku	31.919.388	TP/TGR pada satker Kanwil a/n Alex Matulapelwa sebesar Rp9.419.388,00; Gani Makatita sebesar Rp4.500.000,00; dan Sugianto Basir Rp18.000.000,00
11.	NTT	33.250.000	TP/TGR a/n Servasius P. Suni Rp12.000.000, Zony Ndapa Rp4.250.000, Ferizal, S.Sos Rp3.800.000, dan I Gusti Ngurah Kadek Susila Rp13.200.000,
12.	Papua	46.800.000	TP/TGR a/n Demianus Rumbiak pada satker Kanwil sebesar Rp46,800,000,00
13.	Maluku Utara	68.326.750	TP/TGR atas nama Husen Sepa (dahulu Kabapas Ambon) saat ini Kabapas Ternate sebesar Rp44.326.750,00 dan a/n Aisyah Arsad, bendahara Kanim Ternate sebesar Rp24.000.000,00
14.	Banten	12.000.000	TP/TGR atas nama Saraswati dan Walpen Sipayung pada Satker Kanim Serang dan Nasarudin Kanim Tangerang
Jumlah		386.254.414	

LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2013 - AUDITED

**Penyisihan
Piutang Tidak
Tertagih – Bagian
Lancar TP/TGR**

C.1.9. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Bagian Lancar Tagihan TP/TGR

Penyisihan piutang tidak tertagih dilakukan sesuai dengan Peraturan Dirjen Perbendaharaan Negara Nomor PER-82/PB/2011 tanggal 30 November 2011 tentang Pedoman Akuntansi Penyisihan Piutang Tak Tertagih dan formula penghitungan sesuai Surat Edaran Sekjen No.SEK.KU.03.03-156 tentang Kualitas Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih tanggal 7 November 2012. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia baru melakukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih mulai Tahun 2012.

Saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Bagian Lancar Tagihan TP/TGR Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia per 31 Desember 2013 sebesar minus Rp6.054.272,00. Sedangkan per 31 Desember 2012 adalah minus Rp894.188,00. Berikut adalah rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Bagian Lancar Tagihan TP/TGR pada satker di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia:

Tabel 47. Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan TP/TGR

No	Uraian	Bagian Lancar TP/TGR (Rp,00)	Penyisihan TP/TGR (Rp,00)	Keterangan
1.	Setjen	7.400.000	(37.000)	Penyisihan piutang atas nama Sorta (Rp25.000,00) dan Budiman (Rp 12.000,00).
2.	Ditjen AHU	7.529.000	(37.645)	Penyisihan piutang atas nama Dedy A. Kusnadi sebesar (Rp10.000,00) - telah meninggal dunia, saat ini dalam proses penghapusan oleh Bag. Perbendaharaan), Rizah sebesar (Rp1.395,00) serta Fajar Ari Saputra sebesar (Rp26.250,00).
3.	Ditjen Imigrasi	13.752.000	(68.760)	TP/TGR a/n Sahala Pasaribu pada satker Ditjen Imigrasi.
4.	BPHN	2.400.000	(12.000)	Penyisihan piutang a/n Suhandha
5.	DKI Jakarta	12.513.000	(62.565)	Penyisihan piutang atas nama Zulfikar pada Satker Kanim Jakarta Utara.
6.	Jawa Barat	8.749.992	(43.750)	Penyisihan piutang atas nama Zulfikar pada Satker Kanwil Jawa Barat dan TP/TGR atas nama Aditya Nugraha pada Satker Kanim Sukabumi.
7.	Jawa Timur	30.000.000	(150.000)	Penyisihan piutang atas nama Darwanto pada Satker Kanim Surabaya.
8.	Jambi	88.300.000	(4.564.500)	Penyisihan piutang a/n Drs. Ruslan, MM pada satker Kanwil Jambi
9.	Sumatera Selatan	23.314.284	(116.571)	Penyisihan piutang a/n Kepala Divisi Imigrasi
10.	Maluku	31.919.388	(159.597)	TP/TGR pada satker Kanwil a/n Alex Matulapelwa sebesar (Rp47.097,00); Gani Makatita sebesar (Rp22.500,00); dan Sugianto Basir (Rp90.000,00).
11.	NTT	33.250.000	(166.250)	TP/TGR a/n Servasius P. Suni (Rp60.000,00), Zony Ndapa (Rp21.250,00), Ferizal, S.Sos (Rp19.000,00), I Gusti Ngurah Kadek Susila (Rp66.000,00).
12.	Papua	46.800.000	(234.000)	TP/TGR a/n Demianus Rumbiak pada satker Kanwil.
13.	Maluku Utara	68.326.750	(341.634)	TP/TGR atas nama Husen Sepa (dahulu Kabapas Ambon) saat ini Kabapas Ternate sebesar (Rp221.634,00) dan a/n Aisyah Arsad, bendahara Kanim Ternate sebesar (Rp120.000,00)
14.	Banten	12.000.000	(60.000)	TP/TGR atas nama Saraswati dan Walpen Sipayung pada Satker Kanim Serang dan Nasarudin Kanim Tangerang
Jumlah		386.254.414	(6.054.272)	

LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2013 - AUDITED

Bagian Lancar TP/TGR (Netto) C.1.10. Bagian Lancar Tagihan TP/TGR (*Netto*)

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Kerugian (*Netto*) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia per 31 Desember 2013 sebesar Rp380.200.142,00 sedangkan per 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp177.943.310,00. Terjadi peningkatan sebesar Rp202.256.832,00 atau 113,66%. Berikut adalah rincian Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) *Netto* pada satuan kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia:

Tabel 48. Rincian Bagian Lancar Tagihan TP/TGR (*Netto*)

No	Uraian	Bagian Lancar TP/TGR (Rp,00)	Penyisihan TP/TGR (Rp,00)	Bagian Lancar TP/TGR Netto (Rp,00)	Keterangan
1.	Setjen	7.400.000	(37.000)	7.363.000	Bagian lancar TP/TGR atas nama Sorta Rp4.975.000,00 dan Budiman Rp2.388.000,00
2.	Ditjen AHU	7.529.000	(37.645)	7.491.355	Bagian lancar TP/TGR atas nama Dedy A. Kusnadi sebesar Rp1.990.000,00 (meninggal dunia, saat ini dalam proses penghapusan oleh Bag. Perbendaharaan), Rizah sebesar Rp277.605,00 serta Fajar Ari Saputra sebesar Rp5.223.750,00
3.	Ditjen Imigrasi	13.752.000	(68.760)	13.683.240	Bagian lancar TP/TGR a/n Sahala Pasaribu pada satker Ditjen Imigrasi.
4.	BPHN	2.400.000	(12.000)	2.388.000	Bagian lancar TP/TGR a/n Suhandi.
5.	DKI Jakarta	12.513.000	(62.565)	12.450.435	Bagian lancar TP/TGR atas nama Zulfikar pada Satker Kanim Jakarta Utara.
6.	Jawa Barat	8.749.992	(43.750)	8.706.242	Bagian lancar TP/TGR atas nama Zulfikar pada Satker Kanwil Jawa Barat dan TP/TGR atas nama Aditya Nugraha pada Satker Kanim Sukabumi.
7.	Jawa Timur	30.000.000	(150.000)	29.850.000	Bagian lancar TP/TGR atas nama Darwanto pada Satker Kanim Surabaya.
8.	Jambi	88.300.000	(4.564.500)	83.735.500	Bagian lancar TP/TGR a/n Drs. Ruslan, MM pada satker Kanwil Jambi.
9.	Sumatera Selatan	23.314.284	(116.571)	23.197.713	Bagian lancar TP/TGR a/n Kepala Divisi Imigrasi.
10.	Maluku	31.919.388	(159.597)	31.759.791	Bagian lancar TP/TGR pada satker Kanwil a/n Alex Matulapelwa sebesar Rp9.372.291,00; Gani Makatita sebesar Rp4.477.500,00; dan pada satker Cabrutan Namlea a/n Sugianto Basir sebesar Rp17.910.000,00.
11.	NTT	33.250.000	(166.250)	33.083.750	Bagian lancar TP/TGR a/n Servasius P. Suni Rp11.940.000,00; Zony Ndapa Rp4.228.750,00; Ferizal, S.Sos Rp3.781.000,00; I Gusti Ngurah Kadek Susila Rp13.134.000,00

LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2013 - AUDITED

12.	Papua	46.800.000	(234.000)	46.566.000	Bagian lancar TP/TGR a/n Demianus Rumbiak pada satker Kanwil dengan kualitas Lancar.
13.	Maluku Utara	68.326.750	(341.634)	67.985.116	Bagian lancar TP/TGR atas nama Husen Sepa (dahulu Kabapas Ambon) saat ini Kabapas Ternate sebesar Rp44.105.116,00 dan a/n Aisyah Arsad, bendahara Kanim Ternate sebesar Rp23.880.000,00
14.	Banten	12.000.000	(60.000)	11.940.000	Bagian lancar TP/TGR atas nama Saraswati dan Walpen Sipayung pada Satker Kanim Serang dan Nasarudin Kanim Tangerang.
Jumlah		386.254.414	(6.054.272)	380.200.142	

Persediaan

C.1.11 Persediaan

Saldo Persediaan per 31 Desember 2013 sebesar Rp426.696.399.246,00 dibandingkan dengan tahun 2012 sebesar Rp324.101.005.634,00 terjadi kenaikan sebesar Rp102.595.393.612,00 atau naik 31,66% dari tahun 2012. Rincian Persediaan per Kelompok Barang Periode 31 Desember 2013 dan 2012 sebagai berikut:

Tabel 49. Perbandingan Nilai Persediaan Per Kelompok Barang Periode 31 Desember TA 2013 dan 2012

No	Uraian	31 Desember 2013 (Rp,00)	31 Desember 2012 (Rp,00)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp,00)
1	Barang Konsumsi	83.053.514.688	68.377.218.345	14.676.296.343
2	Amunisi	3.816.827.038	3.795.272.846	21.554.192
3	Bahan Untuk Pemeliharaan	9.238.664.377	5.720.023.277	3.518.641.100
4	Suku Cadang	760.455.147	838.694.442	(78.239.295)
5	Pita, Cukai, Materai dan Leges	282.035.375	1.933.041.015	(1.651.005.640)
6	Tanah Bangunan untuk dijual kepada masyarakat	-	4.500.000	(4.500.000)
7	Hewan & Tanaman untuk dijual kepada masyarakat	100.123.688	89.897.306	10.226.382
8	Peralatan & Mesin untuk dijual kepada masyarakat	349.524.555	16.344.450	333.180.105
9	Aset Tetap Lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat	432.375.217	763.930.595	(331.555.378)
10	Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada masyarakat	47.600.000	1.700.000	45.900.000
11	Barang Persediaan Lainnya untuk dijual kepada masyarakat	311.165.147.886	228.584.788.737	82.580.359.149
12	Bahan Baku	2.214.126.849	5.347.070.260	(3.132.943.411)
13	Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga	7.173.251.657	1.051.849.213	6.121.402.444
14	Persediaan Lainnya	8.062.752.769	7.576.675.148	486.077.621
Jumlah		426.696.399.246	324.101.005.634	102.595.393.612

Rincian Persediaan per wilayah dan eselon I adalah sebagai berikut:

Tabel 50. Perbandingan Nilai Persediaan Per Wilayah/Eselon I Periode 31 Desember TA 2013 dan 2012

No	Kanwil/Eselon I	31 Desember 2013 (Rp,00)	31 Desember 2012 (Rp,00)	Kenaikan / (Penurunan) (Rp,00)
1	DKI Jakarta	16.200.330.367	22.179.523.267	(5.979.192.900)
2	Jawa Barat	17.688.041.438	17.614.712.158	73.329.280

LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2013 - AUDITED

3	Jawa Tengah	8.711.752.555	8.580.727.920	131.024.635
4	Yogyakarta	2.575.383.955	2.048.685.247	526.698.708
5	Jawa Timur	9.386.306.159	9.807.169.767	(420.863.608)
6	Aceh	2.682.189.077	2.329.343.642	352.845.435
7	Sumatera Utara	12.044.978.467	9.522.577.003	2.522.401.464
8	Sumatera Barat	2.824.831.736	1.298.762.760	1.526.068.976
9	Riau	2.998.860.468	4.644.044.130	(1.645.183.662)
10	Jambi	1.078.742.088	1.198.082.316	(119.340.228)
11	Sumatera Selatan	2.277.494.373	2.204.740.088	72.754.285
12	Lampung	3.034.296.517	2.062.493.412	971.803.105
13	Kalimantan Barat	3.880.741.896	2.782.500.556	1.098.241.340
14	Kalimantan Tengah	910.391.903	757.492.697	152.899.206
15	Kalimantan Selatan	1.529.248.502	2.127.168.392	(597.919.890)
16	Kalimantan Timur	5.607.622.211	5.925.545.487	(317.923.276)
17	Sulawesi Utara	1.187.202.773	2.087.737.074	(900.534.301)
18	Sulawesi Tengah	1.067.990.683	988.107.669	79.883.014
19	Sulawesi Selatan	3.278.991.454	3.017.846.011	261.145.443
20	Sulawesi Tenggara	980.542.978	551.527.056	429.015.922
21	Maluku	1.246.786.196	750.134.842	496.651.354
22	Bali	3.974.691.909	3.033.503.256	941.188.653
23	Nusa Tenggara Barat	2.631.230.403	1.039.211.075	1.592.019.328
24	Nusa Tenggara Timur	2.224.301.951	1.936.886.709	287.415.242
25	Papua	1.221.560.956	1.303.242.548	(81.681.592)
26	Bengkulu	479.959.239	338.717.775	141.241.464
27	Maluku Utara	317.818.072	293.736.124	24.081.948
28	Banten	7.756.123.447	5.411.683.957	2.344.439.490
29	Bangka Belitung	1.157.844.731	1.113.348.480	44.496.251
30	Gorontalo	771.689.954	718.342.652	53.347.302
31	Kepulauan Riau	6.177.254.756	3.991.071.311	2.186.183.445
32	Papua Barat	359.126.217	474.577.081	(115.450.864)
33	Sulawesi Barat	778.534.743	792.977.305	(14.442.562)
34	Perwakilan Imigrasi di Luar Negeri	213.615.497	-	213.615.497
35	Setjen (Biro Umum & Pusjianbang)	4.918.092.165	3.568.312.064	1.349.780.101
36	Inspektorat Jenderal	54.861.840	25.476.300	29.385.540
37	Ditjen Administrasi Hukum Umum	4.256.487.584	3.065.259.888	1.191.227.696
38	Ditjen Pemasyarakatan	2.200.418.060	1.236.434.128	963.983.932
39	Ditjen Imigrasi	280.889.522.523	188.751.301.245	92.138.221.278
40	Ditjen HKI	3.236.694.505	2.833.092.669	403.601.836
41	Ditjen PP	1.209.775.125	1.088.542.567	121.232.558
42	Ditjen HAM	418.386.154	435.881.716	(17.495.562)
43	BPHN	56.480.915	40.340.900	16.140.015
44	Balitbang HAM	25.552.000	38.349.707	(12.797.707)
45	BPSDM	173.650.704	91.794.683	81.856.021
	JUMLAH	426.696.399.246	324.101.005.634	102.595.393.612

Penjelasan akun persediaan:

Nilai persediaan berupa barang persediaan lainnya untuk dijual kepada masyarakat sebesar Rp311.165.147.886,00, di antaranya sebesar Rp298.981.206.580,00 (96,08%) terdapat pada Ditjen Imigrasi berupa dokumen PNBK keimigrasian seperti paspor 24 dan 48 halaman, paspor elektronik 48 halaman, dan stiker visa VKSK (rincian seperti dalam lampiran). Dan sebesar Rp7.345.773.935,00 terdapat pada Ditjen AHU berupa dokumen PNBK fidusia seperti stop map buku dan cover sertifikat jaminan fidusia. Per tanggal

LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2013 - AUDITED

5 Maret 2013 Ditjen AHU telah menerapkan sistem fidusia online, sehingga persediaan dokumen PNBP fidusia sudah tidak digunakan lagi/dianggap usang. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia akan menghapus dokumen PNBP fidusia tersebut dalam pencatatan aplikasi persediaan setelah menunggu keputusan penghapusan.

C.2. ASET TETAP

Aset Tetap

Aset Tetap merupakan Aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan yang digunakan untuk kegiatan operasional Satker Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat maupun aset Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang digunakan masyarakat umum seperti gedung pertemuan.

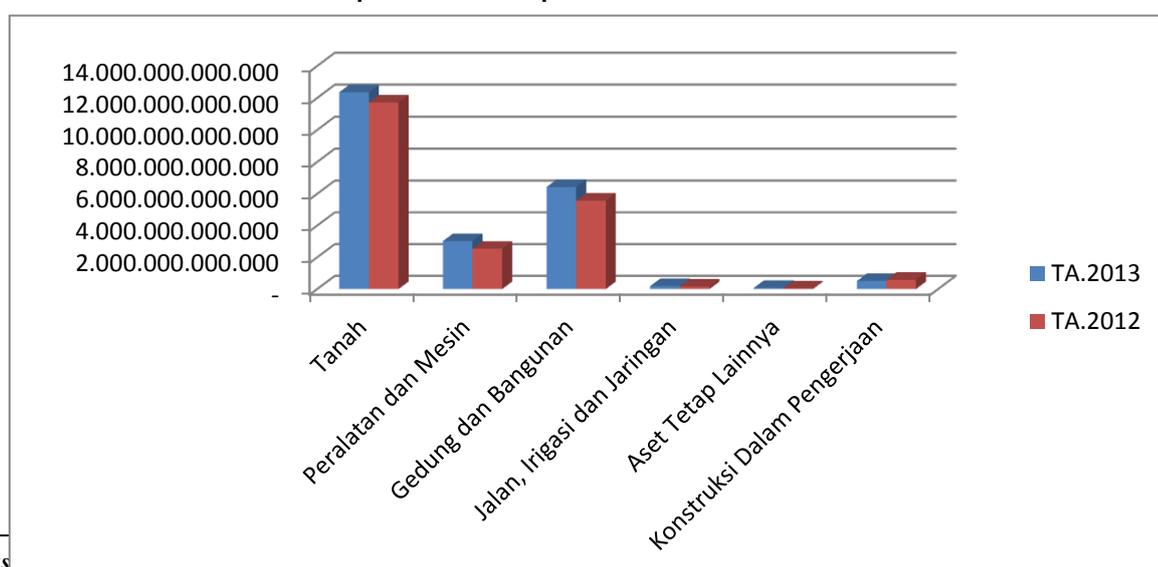
Nilai Aset Tetap Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia per 31 Desember 2013 sebelum penyusutan sebesar Rp22.596.631.532.309,00 sedangkan tahun 2012 sebesar Rp20.619.401.370.243,00 terjadi kenaikan nilai aset tetap sebesar Rp1.977.230.162.066,00 atau naik 9,59% dari tahun 2012. Posisi aset tetap dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 51. Perbandingan Aset Tetap per 31 Desember 2013 dan 2012

No.	Uraian	Per 31 Desember 2013 (Rp,00)	Per 31 Desember 2012 (Rp,00)	Kenaikan / (penurunan) (Rp,00)
1	Tanah	12.362.113.598.258	11.715.655.610.505	646.457.987.753
2	Peralatan dan Mesin	3.026.289.712.192	2.540.006.548.203	486.283.163.989
3	Gedung dan Bangunan	6.428.886.350.375	5.570.641.029.594	858.245.320.781
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	187.832.116.877	161.477.026.260	26.355.090.617
5	Aset Tetap Lainnya	77.596.821.685	44.614.453.012	32.982.368.673
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	513.912.932.922	587.006.702.669	(73.093.769.747)
Jumlah		22.596.631.532.309	20.619.401.370.243	1.977.230.162.066
Akumulasi Penyusutan		3.871.595.364.317	-	3.871.595.364.317
Nilai Buku Aset tetap		18.725.036.167.992	20.619.401.370.243	1.894.365.202.251

Penurunan ini terjadi karena per 1 Januari 2013 telah diberlakukan nilai penyusutan pada aplikasi SIMAK BMN.

Grafik 1. Komposisi Aset Tetap Periode 31 Desember 2013 dan 2012



Catatan atas
Merupakan Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan Keuangan

LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2013 - AUDITED

Tanah

C.2.1 Tanah

Saldo Tanah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia per 31 Desember 2013 sebesar Rp12.362.113.598.258,00 jika dibandingkan dengan saldo tanah per 31 Desember 2012 sebesar Rp11.715.655.610.505,00 terjadi kenaikan sebesar Rp646.457.987.753,00 atau naik 5,52% dari tahun 2012. Perbandingan nilai Tanah per 31 Desember 2013 dengan periode sebelumnya per wilayah dan Eselon I sebagai berikut:

**Tabel 52. Perbandingan Nilai Tanah per 31 Desember 2013
pada Kanwil dan Unit Eselon I**

No	Kanwil/Eselon I	31 Desember 2013 (Rp,00)	31 Desember 2012 (Rp,00)	Perubahan (Rp,00)
1	DKI Jakarta	1.039.991.168.683	1.039.991.168.683	-
2	Jawa Barat	698.143.686.831	686.058.321.831	12.085.365.000
3	Jawa Tengah	963.844.724.916	963.127.252.916	717.472.000
4	Yogyakarta	57.448.559.450	51.458.003.450	5.990.556.000
5	Jawa Timur	701.878.088.557	701.673.842.557	204.246.000
6	Aceh	147.229.716.685	147.846.987.678	(617.270.993)
7	Sumatera Utara	243.098.693.178	243.073.221.658	25.471.520
8	Sumatera Barat	117.237.992.910	126.671.803.910	(9.433.811.000)
9	Riau	174.024.048.000	174.024.048.000	-
10	Jambi	22.618.320.600	22.929.878.122	(311.557.522)
11	Sumatera Selatan	135.486.643.203	135.486.643.203	-
12	Lampung	42.546.077.750	43.350.542.750	(804.465.000)
13	Kalimantan Barat	114.443.759.074	114.443.759.074	-
14	Kalimantan Tengah	98.717.158.100	98.717.158.100	-
15	Kalimantan Selatan	89.714.683.515	89.714.683.515	-
16	Kalimantan Timur	428.676.039.957	427.558.198.607	1.117.841.350
17	Sulawesi Utara	50.437.408.640	51.482.530.640	(1.045.122.000)
18	Sulawesi Tengah	34.721.414.708	34.721.414.708	-
19	Sulawesi Selatan	215.759.962.574	215.059.572.824	700.389.750
20	Sulawesi Tenggara	11.865.737.500	10.843.192.054	1.022.545.446
21	Maluku	21.309.709.450	21.309.709.450	-
22	Bali	207.288.606.400	207.418.318.400	(129.712.000)
23	Nusa Tenggara Barat	67.326.110.338	67.326.110.338	-
24	Nusa Tenggara Timur	156.771.299.074	157.758.089.074	(986.790.000)
25	Papua	49.466.102.250	51.287.686.250	(1.821.584.000)
26	Bengkulu	13.014.716.897	12.680.743.600	333.973.297
27	Maluku Utara	18.215.609.518	17.515.609.518	700.000.000
28	Banten	71.434.191.684	71.584.191.684	(150.000.000)
29	Bangka Belitung	28.334.979.270	28.332.478.920	2.500.350
30	Gorontalo	4.032.076.070	4.032.076.070	-
31	Kepulauan Riau	70.895.931.851	70.895.931.851	-
32	Papua Barat	38.097.479.668	38.097.479.668	-
33	Sulawesi Barat	6.927.094.000	6.927.094.000	-
34	Perwakilan Imigrasi di Luar Negeri	-	-	-
35	Setjen (Biro Umum & Pusjianbang)	4.545.843.805.850	4.620.182.150.950	(74.338.345.100)
36	Inspektorat Jenderal	-	-	-
37	Ditjen Administrasi Hukum Umum	20.223.700.000	20.223.700.000	-
38	Ditjen Pemasarakatan	751.128.380.000	37.932.095.345	713.196.284.655
39	Ditjen Imigrasi	669.662.936.750	669.662.936.750	-
40	Ditjen HKI	-	-	-
41	Ditjen PP	-	-	-
42	Ditjen HAM	-	-	-
43	BPHN	62.980.084.357	62.980.084.357	-

LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2013 - AUDITED

44	Balitbang HAM	-	-	-
45	BPSDM	171.276.900.000	171.276.900.000	-
Jumlah		12.362.113.598.258	11.715.655.610.505	646.457.987.753

Penambahan saldo Tanah sebesar Rp646.457.987.753,00 karena beberapa transaksi sebagai berikut:

Tabel 53. Rincian Mutasi Akun Tanah Per Jenis Transaksi Tahun 2013

Keterangan	Jumlah (Rp,00)
Saldo per 31 Desember 2012	11.715.655.610.505
A. Mutasi Tambah	
Penambahan saldo awal	35.310.484.350
Pembelian	894.017.000
Transfer Masuk	84.426.074.760
Hibah Masuk	762.981.000
Penyelesaian Pembangunan dengan KDP	72.210.000
Reklasifikasi Masuk	159.271.960.821
Pertukaran	5.990.556.000
Pengembangan Nilai Aset	1.699.030.250
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas (+)	852.940.159.445
Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset	14.871.923.000
Pengembangan Melalui KDP	710.035.200
Transaksi Normalisasi BMN Aset Tetap	372.505.816
Jumlah Mutasi Tambah	1.157.321.937.642
B. Mutasi Kurang	
Transaksi Normalisasi BMN Aset Tetap	36.712.091.500
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas (-)	30.418.864.152
Penghapusan	152.247.000.000
Transfer Keluar	114.371.162.842
Hibah Keluar	45.500.000
Reklasifikasi Keluar	127.788.445.050
Koreksi Pencatatan	49.280.886.345
Jumlah Mutasi Kurang	510.863.949.889
Jumlah Mutasi	646.457.987.753
Saldo per 31 Desember 2013	12.362.113.598.258
Akumulasi Penyusutan	-
Nilai Buku per 31 Desember 2013	12.362.113.598.258

Penjelasan Transaksi:

Mutasi Tambah

- Penambahan Saldo Awal sebesar Rp35.310.484.350,00 diantaranya terdapat pada satker Kanwil Jawa Timur sebesar Rp32.463.100.000,00 berupa Tanah Bangunan Kantor Pemerintah yang disebabkan normalisasi aset dengan nomor sertifikat AD 770666 dan nomor 12.01.07.01.4.00014, satker kanwil Kalimantan Timur sebesar Rp1.114.698.000,00 berupa Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I, Lapas Ulu Siau Sulawesi Tengah sebesar Rp774.620.000,00 berupa Tanah Bangunan Kantor Pemerintah, Lapas Jailolo Maluku Utara sebesar Rp700.000.000,00 berupa Tanah Bangunan Kantor Pemerintah, satker Kanwil Papua sebesar Rp247.121.000,00 berupa Tanah Lapangan Parkir Konblok, dan lain-lain;
- Pembelian sebesar Rp894.017.000,00 terdapat pada dua satker yaitu Kanim Pemalang

LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2013 - AUDITED

sebesar Rp546.317.000,00 berupa Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I seluas 2500 m² dan Rutan Gunung Sindur sebesar Rp347.700.000,00 berupa Tanah Bangunan Rumah Tahanan/Rutan seluas 1159 m²;

- Transfer Masuk sebesar Rp84.426.074.760,00 diantaranya terdapat pada Lapas Kayu Agung Sumatera Selatan sebesar Rp28.036.160.422,00 berupa Tanah Bangunan Rumah Lapas, Kanim Semarang sebesar Rp19.040.000.000,00 berupa Tanah Bangunan Kantor Pemerintah, Cabang Rutan Bintuni sebesar Rp12.549.012.010,00 berupa Tanah Bangunan Kantor Pemerintah, Lapas Cilegon sebesar Rp7.278.491.684,00 berupa Tanah Bangunan Rumah Tahanan, Lapas Bekasi sebesar Rp5.140.264.837,00 berupa Tanah Bangunan Kantor Pemerintah, dan lain-lain;
- Hibah Masuk sebesar Rp762.981.000,00 terdapat pada Rutan Cirebon sebesar Rp675.000.000,00 berupa Tanah Bangunan Rumah Tahanan dan Rutan Kraksaan Jawa Timur sebesar Rp87.981.000,00 berupa Tanah Persil lainnya;
- Penyelesaian Pembangunan dengan KDP sebesar Rp72.210.000 terdapat pada Lapas Gunung Sindur Jawa Barat berupa Tanah Bangunan Rumah Lapas;
- Reklasifikasi Masuk sebesar Rp159.271.960.821,00 diantaranya terdapat pada satker Kanwil Jawa Barat sebesar Rp34.386.820.440,00 berupa Tanah Bangunan Kantor Pemerintah, Lapas Denpasar sebesar Rp33.772.725.000,00 berupa Tanah Bangunan Kantor Pemerintah, Lapas Blitar sebesar Rp29.258.400.000,00 berupa Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I yang disebabkan perubahan golongan rumah sebagai tindak lanjut Surat Edaran Sekretaris Jenderal Nomor A.PL.06.06-124 tahun 1997, Kanim Karawang sebesar Rp11.021.721.000,00 berupa Tanah Bangunan Kantor Pemerintah, Rutan Surabaya sebesar Rp9.680.016.000,00 berupa Tanah Bangunan Rumah Tahanan, dan lain-lain;
- Pertukaran sebesar Rp5.990.556.000,00 terdapat pada Kanim Yogyakarta sebesar Rp5.262.889.000,00 berupa Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I dan pada satker Kanwil Yogyakarta sebesar Rp727.667.000,00 berupa Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II;
- Pengembangan Nilai Aset sebesar Rp1.699.030.250,00 diantaranya terdapat pada satker Sekretariat Jenderal sebesar Rp1.524.731.900,00 berupa Tanah Bangunan Peristirahatan/*Bungalow*, Kanim Pati Jawa Tengah sebesar Rp168.974.000,00 berupa Tanah Bangunan Kantor Pemerintah, Rupbasan Samarinda sebesar Rp2.503.350,00 berupa Tanah Bangunan Fasilitas Tempat Tinggal lainnya, Kanim Pemalang sebesar Rp2.181.000,00 berupa Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I, Rupbasan Samarinda sebesar Rp640.000,00 berupa Tanah Bangunan Fasilitas Tempat Tinggal lainnya;
- Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas bertambah sebesar Rp852.940.159.445,00

LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2013 - AUDITED

diantaranya terdapat pada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan sebesar Rp713.196.284.655,00 berupa Tanah Bangunan Kantor Pemerintah dimana sesuai Berita Acara Inventarisasi Barang Milik Negara Nomor BA-01/WKN.07/KNL.04/2013 tanggal 12 Juni 2013 telah dilakukan koreksi nilai luasan tanah semula 210.000.000 m² menjadi 21.000.000 m² dengan nilai perolehan semula Rp5.938.315.345 menjadi Rp719.134.600.000,00, satker Sekretariat Jenderal sebesar Rp61.512.000.000,00 berupa Tanah Bangunan Kantor Pemerintah, Lapas Anak Blitar sebesar Rp45.000.000.000,00 berupa Tanah Kering lainnya yang disebabkan penambahan nilai dari tanah basah lainnya, Rutan Banda Aceh sebesar Rp28.210.918.560,00 berupa Tanah Bangunan Kantor Pemerintah dan Tanah Basah lainnya;

- Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset bertambah sebesar Rp14.871.923.000 terdapat pada satker Sekretariat Jenderal berupa Tanah Bangunan Kantor Pemerintah;
- Pengembangan Melalui KDP sebesar Rp710.035.200,00 terdapat pada Lapas Makasar berupa Tanah Bangunan Kantor Pemerintah; dan
- Transaksi Normalisasi BMN Aset Tetap bertambah sebesar Rp372.505.816,00 terdapat pada Cabang Rutan Sinabang Aceh sebesar Rp256.240.816,00 dan Kanim Jember sebesar Rp116.265.000,00 berupa Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II.

Mutasi Kurang

- Transaksi Normalisasi BMN Aset Tetap berkurang sebesar Rp36.712.091.500,00 diantaranya terdapat pada satker Kanwil Jawa Timur sebesar Rp32.463.100.000,00 berupa Tanah Bangunan Kantor Pemerintah, Kanim Padang sebesar Rp2.520.000.000,00 berupa Tanah Bangunan Kantor Pemerintah, Lapas Ulu Siau Sulawesi Tengah sebesar Rp774.620.000,00 berupa Tanah Bangunan Kantor Pemerintah, Bapas Polewali Sulawesi Barat sebesar Rp588.500.500,00 berupa Tanah Bangunan Kantor Pemerintah, satker Kanwil Papua sebesar Rp247.121.000,00 berupa Tanah Lapangan Parkir Konblok, dan lain-lain;
- Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas berkurang sebesar Rp30.418.864.152,00 diantaranya terdapat pada Rutan Surabaya sebesar Rp17.854.789.512,00 berupa Tanah Bangunan Rumah Tahanan, Lapas Terbuka Pasaman Sumatera Barat sebesar Rp9.352.091.000,00 berupa Tanah Bangunan Rumah Lapas sebagai tindak lanjut dari penyesuaian harga aset sesuai dengan nilai aset yang tertulis dalam Berita Acara Hibah dari Pemda Pasaman, Rudenim Pasuruan sebesar Rp2.576.350.000,00 berupa Tanah Bangunan Kantor Pemerintah berdasarkan Berita Acara Pemutakhiran Inventarisasi dan Penilaian, Rutan Gianyar Bali sebesar Rp558.836.364,00 berupa Tanah Bangunan Kantor Pemerintah, satker Kanwil Sumatera Barat sebesar

LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2013 - AUDITED

Rp36.260.000,00 berupa Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I sebagai tindak lanjut dari penyesuaian harga aset sesuai Berita Acara Inventarisasi dan Penilaian Mahkamah Agung, dan lain-lain;

- Penghapusan sebesar Rp152.247.000.000,00 terjadi pada satker Sekretariat Jenderal karena terdapat pencatatan ganda di SIMAK BMN atas tanah di lokasi Gedung Sentra Mulia. Terdapat kesalahan operator dalam menginput transaksi di aplikasi SIMAK BMN dari yang seharusnya transaksi koreksi pencatatan namun diinput sebagai transaksi penghapusan aset;
- Transfer Keluar sebesar Rp114.371.162.842,00 diantaranya terdapat pada Lapas Banda Aceh sebesar Rp29.386.030.560,00 berupa Tanah Kering dan Tanah Basah lainnya, satker kantor Wilayah Sumatera Selatan sebesar Rp28.036.160.422,00 ke Lapas Kayu Agung dan Lapas Banyuasin berupa Tanah Bangunan Rumah Lapas, satker Kanwil Jateng sebesar Rp19.040.000.000,00 berupa Tanah Bangunan Kantor Pemerintah, satker Kanwil Papua Barat sebesar Rp12.549.012.010,00 berupa Tanah Bangunan Kantor Pemerintah, dan lain-lain;
- Hibah Keluar sebesar Rp45.500.000,00 terdapat pada Lapas Sijunjung Sumatera Barat berupa Tanah Bangunan Rumah Tahanan;
- Reklasifikasi Keluar sebesar Rp127.788.445.050,00 diantaranya terdapat pada satker Kantor Wilayah Jawa Barat sebesar Rp42.000.000.000 berupa Tanah Bangunan Kantor Pemerintah, Lapas Denpasar sebesar Rp33.772.725.000,00 berupa Tanah Bangunan Garasi dan Tanah Bangunan untuk Gereja, Lapas Blitar sebesar Rp29.258.400.000,00 berupa Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II, Lapas Bengkalis Riau sebesar Rp3.641.100.000,00 berupa Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II, dan lain-lain; dan
- Koreksi Pencatatan sebesar Rp49.280.886.345,00 diantaranya terdapat pada Lapas Anak Blitar sebesar Rp45.000.000.000,00 yang seharusnya dicatat dalam tanah kering lainnya, Lapas Narkotika Jayapura sebesar Rp1.008.178.000,00, Lapas Bandar Lampung sebesar Rp706.965.000,00, Lapas Manado sebesar Rp390.000.000,00, dan lain-lain.

Tanah pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI per 31 Desember 2013 seluas 111.022.348 m², terdiri dari seluas 84.853.611 m² sudah bersertifikat dan seluas 26.168.737 m² belum bersertifikat dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 54. Rincian Tanah Yang Dikuasai Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia per 31 Desember 2013

No	Satker	Luas Tanah (M ²)		Luas Seluruhnya (M ²)
		Bersertifikat	Blm Sertifikat	
	Kantor Wilayah			
1	Aceh	2.605.243	75.057	2.680.300

LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2013 - AUDITED

2	Sumatera Utara	734.000	124.346	858.346
3	Sumatera Barat	539.400	2.123.736	2.663.136
4	Riau	794.806	60.505	855.311
5	Sumatera Selatan	435.806	184.080	619.886
6	Lampung	276.200	30.764	306.964
7	DKI Jakarta	163.656	14.718	178.374
8	Jawa Barat	601.910	74.014	675.924
9	Jawa Tengah	1.946.582	429.682	2.376.264
10	Jawa Timur	1.566.489	249.290	1.815.779
11	Kalimantan Barat	305.077	793.217	1.098.294
12	Kalimantan Selatan	297.123	25.560	322.683
13	Kalimantan Timur	421.331	2.250	423.581
14	Sulawesi Utara	144.959	5.215	150.174
15	Sulawesi Selatan	952.218	107.332	1.059.550
16	Bali	169.531	52.520	222.051
17	Nusa Tenggara Timur	16.603.267	21.786	16.625.053
18	Maluku	66.407	257.819	324.226
19	Papua	283.997	7.433	291.430
20	Jambi	201.401	130.126	331.527
21	Bengkulu	409.256	20.956	430.212
22	D.I Yogyakarta	29.225	2.938	32.163
23	Kalimantan Tengah	662.331	5.970	668.301
24	Nusa Tenggara Barat	1.186.420	-	1.186.420
25	Sulawesi Tenggara	185.232	6.220	191.452
26	Sulawesi Tengah	447.124	2.299	449.423
27	Kepulauan Riau	311.428	124.027	435.455
28	Maluku Utara	184.879	13.420	198.299
29	Banten	142.149	1.000	143.149
30	Bangka Belitung	296.486	-	296.486
31	Gorontalo	135.117	30.000	165.117
32	Sulawesi Barat	81.652	135.670	217.322
33	Papua Barat	83.492	3.619	87.111
	Jumlah Kantor Wilayah	33.264.194	5.115.569	38.379.763
	Unit Eselon I :			
1	Setjen	1.455.621	-	1.455.621
2	Itjen	-	-	-
3	Ditjen PP	-	-	-
4	Ditjen AHU	3.099	200	3.299
5	Ditjen Pemasarakatan	5.961	21.001.814	21.007.775
6	Ditjen Imigrasi	50.006.082	51.154	50.057.236
7	Ditjen HKI	-	-	-
8	Ditjen HAM	-	-	-
9	BPHN	11.464	-	11.464
10	Balitbang HAM	-	-	-
11	BPSDM	107.190	-	107.190

LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2013 - AUDITED

	Jumlah Unit Eselon I	51.589.417	21.053.168	72.642.585
	Jumlah Keseluruhan	84.853.611	26.168.737	111.022.348

*Data Simantap per Desember 2013

Peralatan Mesin

dan C.2.2. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin merupakan peralatan yang digunakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam kegiatan sehari-hari yang disesuaikan dengan tugas pokok Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Peralatan mesin yang dicatat dalam saldo peralatan dan mesin adalah peralatan mesin dalam kondisi layak untuk digunakan. Saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2013 sebesar Rp3.026.289.712.192,00 bila dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2012 sebesar Rp2.540.006.548.203,00 atau mengalami kenaikan sebesar Rp486.283.163.989,00 atau naik 19,14% dari tahun 2012. Nilai akumulasi penyusutan peralatan dan mesin per 31 Desember 2013 sebesar Rp1.846.849.675.041,00 sehingga nilai buku peralatan dan mesin per 31 Desember 2013 sebesar Rp1.179.440.037.151,00. Nilai peralatan dan mesin per 31 Desember 2013 per jenis barang disajikan sebagai berikut:

Tabel 55. Nilai Peralatan dan Mesin Per Jenis Barang per 31 Desember 2013

No	Kode	Uraian	Volume		Nilai (Rp,00)
			Kuantitas	Satuan	
1	3.01.01	Alat Besar Darat	143	Unit	5.275.445.904
2	3.01.02	Alat Besar Apung	1	Unit	2.380.000
3	3.01.03	Alat Bantu	1.647	Unit	135.652.767.896
4	3.02.01	Alat Angkutan Darat Bermotor	6.318	Unit	581.310.784.271
5	3.02.02	Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	647	Unit	1.086.648.283
6	3.02.03	Alat Angkutan Apung Bermotor	28	Unit	45.911.957.958
7	3.02.04	Alat Angkutan Apung Tak Bermotor	1	Unit	16.650.000
8	3.03.01	Alat Bengkel Bermesin	6.088	Unit	39.636.237.780
9	3.03.02	Alat Bengkel Tak Bermesin	3.297	Unit	5.034.140.778
10	3.03.03	Alat Ukur	2.957	Unit	84.192.707.855
11	3.04.01	Alat Pengolahan	1.945	Unit	6.731.348.893
12	3.05.01	Alat Kantor	66.686	Unit	294.624.739.929
13	3.05.02	Alat Rumah Tangga	209.211	Unit	406.770.379.974
14	3.06.01	Alat Studio	10.972	Unit	77.720.095.093
15	3.06.02	Alat Komunikasi	16.575	Unit	115.306.761.761
16	3.06.03	Peralatan Pemancar	747	Unit	21.308.251.819
17	3.06.04	Peralatan Komunikasi Navigasi	27	Unit	7.574.201.260
18	3.07.01	Alat Kedokteran	12.211	Unit	49.467.601.259
19	3.07.02	Alat Kesehatan Umum	307	Unit	1.746.874.281
20	3.08.01	Unit Alat Laboratorium	7.832	Unit	47.307.295.874
21	3.08.02	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	212	Unit	4.775.305.676
22	3.08.03	Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	2.320	Unit	18.186.248.100

LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2013 - AUDITED

24	3.08.04	Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan	36	Unit	179.342.225
25	3.08.05	Radiation Application & Non Destructive Testing Laboratory	4	Unit	7.796.500
26	3.08.06	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	276	Unit	632.840.425
27	3.08.07	Peralatan Laboratorium Hydrodinamica	258	Unit	1.449.896.431
28	3.08.08	Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi & Instrumentasi	94	Unit	829.039.782
29	3.09.01	Senjata Api	5.992	Unit	26.242.265.929
30	3.09.02	Persenjataan Non Senjata Api	19.990	Unit	44.546.052.950
31	3.09.04	Alat Khusus Kepolisian	2.383	Unit	23.206.912.003
32	3.10.01	Komputer Unit	26.168	Unit	330.009.908.755
33	3.10.02	Peralatan Komputer	25.485	Unit	588.485.700.712
34	3.11.01	Alat Eksplorasi Topografi	2	Unit	2.620.000
35	3.11.02	Alat Eksplorasi Geofisika	31	Unit	513.714.526
36	3.12.01	Alat Pengeboran Mesin	9	Unit	12.505.900
37	3.12.02	Alat Pengeboran Non Mesin	27	Unit	314.468.510
38	3.13.01	Sumur	37	Unit	2.172.188.107
39	3.13.02	Produksi	12	Unit	5.921.000
40	3.13.03	Pengolahan Dan Pemurnian	195	Unit	8.119.360.675
41	3.14.01	Alat Bantu Eksplorasi	3	Unit	7.623.000
42	3.14.02	Alat Bantu Produksi	17	Unit	43.150.000
43	3.15.01	Alat Deteksi	1	Unit	750.000
44	3.15.02	Alat Pelindung	1.575	Unit	10.935.208.347
45	3.15.03	Alat Sar	313	Unit	1.237.717.260
46	3.15.04	Alat Kerja Penerbangan	563	Unit	9.292.352.689
47	3.16.01	Alat Peraga Pelatihan Dan Percontohan	17	Unit	156.577.760
48	3.17.01	Unit Peralatan Proses/Produksi	533	Unit	2.779.126.171
49	3.18.01	Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	82	Unit	331.942.888
50	3.18.02	Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	6	Unit	40.623.000
51	3.19.01	Peralatan Olah Raga	33.036	Unit	25.037.854.754
52	6.02.03	Tanda Penghargaan Bidang Olah Raga	465	Unit	57.427.249
Jumlah			467.782		3.026.289.712.192

Perbandingan Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2013 dengan periode sebelumnya per wilayah dan eselon I sebagai berikut:

Tabel 56. Nilai Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2013 pada Kanwil dan Unit Eselon I

No	Kanwil/ Eselon I	31 Desember 2013 (Rp,00)	31 Desember 2012 (Rp,00)	Kenaikan / (Penurunan) (Rp,00)
1	DKI Jakarta	220.353.072.086	197.110.305.435	23.242.766.651
2	Jawa Barat	139.074.139.636	125.449.207.762	13.624.931.874
3	Jawa Tengah	141.253.162.389	131.484.946.338	9.768.216.051
4	Yogyakarta	36.465.702.469	33.369.873.396	3.095.829.073
5	Jawa Timur	162.496.312.507	138.678.015.907	23.818.296.600
6	Aceh	40.209.226.224	36.326.424.739	3.882.801.485

LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2013 - AUDITED

7	Sumatera Utara	85.662.558.692	77.057.672.727	8.604.885.965
8	Sumatera Barat	33.558.442.898	29.529.518.369	4.028.924.529
9	Riau	46.157.521.949	39.520.050.712	6.637.471.237
10	Jambi	26.785.646.829	22.937.572.897	3.848.073.932
11	Sumatera Selatan	57.111.683.020	51.904.703.811	5.206.979.209
12	Lampung	51.213.909.296	44.615.649.877	6.598.259.419
13	Kalimantan Barat	46.996.880.633	41.720.280.710	5.276.599.923
14	Kalimantan Tengah	20.098.160.239	19.474.574.385	623.585.854
15	Kalimantan Selatan	24.775.622.752	21.600.598.083	3.175.024.669
16	Kalimantan Timur	48.544.278.137	38.707.621.217	9.836.656.920
17	Sulawesi Utara	29.014.749.576	25.768.650.683	3.246.098.893
18	Sulawesi Tengah	18.999.707.778	16.816.891.812	2.182.815.966
19	Sulawesi Selatan	56.411.172.929	50.007.758.817	6.403.414.112
20	Sulawesi Tenggara	17.835.328.736	17.688.199.626	147.129.110
21	Maluku	22.265.077.991	21.033.169.890	1.231.908.101
22	Bali	54.343.407.701	41.416.852.482	12.926.555.219
23	Nusa Tenggara Barat	28.971.228.698	25.481.984.070	3.489.244.628
24	Nusa Tenggara Timur	40.632.781.599	37.951.451.797	2.681.329.802
25	Papua	27.148.995.128	24.691.296.255	2.457.698.873
26	Bengkulu	12.495.821.388	11.853.612.349	642.209.039
27	Maluku Utara	14.427.190.869	15.106.823.250	(679.632.381)
28	Banten	56.581.297.625	51.796.787.828	4.784.509.797
29	Bangka Belitung	17.067.477.486	15.381.733.392	1.685.744.094
30	Gorontalo	9.022.232.427	8.587.654.961	434.577.466
31	Kepulauan Riau	77.244.783.738	42.212.305.918	35.032.477.820
32	Papua Barat	16.238.577.225	15.682.311.725	556.265.500
33	Sulawesi Barat	12.464.354.439	11.573.106.057	891.248.382
34	Perwakilan Imigrasi di Luar Negeri	10.499.028.213	9.709.197.222	789.830.991
35	Setjen (Biro Umum & Pusjianbang)	284.415.339.035	159.388.145.854	125.027.193.181
36	Inspektorat Jenderal	8.706.848.084	8.662.550.509	44.297.575
37	Ditjen Administrasi Hukum Umum	132.380.260.988	111.714.302.457	20.665.958.531
38	Ditjen Pemasarakatan	40.323.576.133	37.514.218.962	2.809.357.171
39	Ditjen Imigrasi	700.799.127.106	591.177.176.482	109.621.950.624
40	Ditjen HKI	59.477.590.962	52.187.479.989	7.290.110.973
41	Ditjen PP	21.371.428.981	19.259.313.581	2.112.115.400
42	Ditjen HAM	12.423.392.005	11.043.355.400	1.380.036.605
43	BPHN	16.628.232.585	13.465.411.922	3.162.820.663
44	Balitbang HAM	8.757.595.660	8.000.324.800	757.270.860
45	BPSDM	38.586.787.351	35.347.463.748	3.239.323.603
Jumlah		3.026.289.712.192	2.540.006.548.203	486.283.163.989

Penambahan saldo Peralatan dan Mesin sebesar Rp486.283.163.989,00 karena beberapa transaksi sebagai berikut:

Tabel 57. Rincian Mutasi Akun Peralatan dan Mesin Per Jenis Transaksi Tahun 2013

Keterangan	Jumlah (Rp,00)
Saldo per 31 Desember 2012	2.540.006.548.203
Mutasi tambah:	
Penambahan Saldo Awal	177.585.731.236
Pembelian	439.797.644.194
Transfer Masuk	68.551.515.904
Hibah Masuk	10.551.897.935

LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2013 - AUDITED

Penyelesaian Pembangunan dengan KDP	40.381.755.025
Pembatalan Penghapusan	351.162.500
Reklasifikasi Masuk	12.369.573.024
Perolehan Lainnya	1.005.650.015
Penyelesaian Pembangunan Langsung	159.760.200
Reklasifikasi dari aset lainnya ke aset tetap	956.222.369
Perolehan reklas dari intra ke ekstra	51.745.170
Pengembangan Nilai Aset	11.145.660.043
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	17.238.677.216
Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset	4.467.621.551
Penerimaan Aset Tetap Renovasi	24.640.000
Transaksi Normalisasi BMN Aset Tetap	3.113.267.589
Total Mutasi Tambah :	787.752.523.971
Mutasi Kurang:	
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	7.538.714.030
Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset	108.143.291.325
Transaksi Normalisasi BMN Aset Tetap	4.617.145.897
Penghapusan	1.694.627.217
Transfer Keluar	108.968.869.819
Hibah Keluar	45.590.000
Reklasifikasi Keluar	23.824.215.652
Koreksi Pencatatan	2.996.191.124
Usulan Barang Rusak Berat ke Pengelola	168.188.654
Usulan Barang Hilang ke Pengelola	32.534.000
Penghapusan semu karena reklasifikasi	4.424.400
Penghentian Aset dari Penggunaan	43.435.567.864
Total Mutasi Kurang :	301.469.359.982
Total Mutasi Nett	486.283.163.989
Saldo per 31 Desember 2013	3.026.289.712.192
Akumulasi Penyusutan Per 31 Des 2013	1.846.849.675.041
Nilai Buku per 31 Des 2013	1.179.440.037.151

Penjelasan Transaksi:

Mutasi Tambah

- Penambahan Saldo Awal sebesar Rp177.585.731.236,00 diantaranya terdapat pada satker Sekretariat Jenderal sebesar Rp154.871.898.121,00 berupa *Chiller, Elevator/Lift* dan barang lainnya yang disebabkan serah terima aset Gedung Sentra Mulia, pada Ditjen Imigrasi sebesar Rp10.418.654.000,00, Kanim Jakarta Pusat sebesar Rp3.903.450.500,00, Ditjen Pemasarakatan sebesar Rp525.791.925,00, dan Rudenim Jakarta sebesar Rp535.361.000,00, dan lain-lain;
- Pembelian sebesar Rp439.797.644.194,00 diantaranya terdapat pada satker Ditjen Imigrasi sebesar Rp85.456.883.897,00 berupa empat buah server dan barang lainnya, Ditjen Administrasi Hukum Umum sebesar Rp33.427.317.657,00, Kanim Denpasar sebesar Rp5.784.902.000,00, Ditjen Pemasarakatan sebesar Rp5.087.408.960,00, dan Kanim Tanjung Perak sebesar Rp3.326.390.000,00, dan lain-lain;
- Transfer Masuk sebesar Rp68.551.515.904,00 diantaranya terdapat pada satker Kanwil Kepulauan Riau sebesar Rp26.898.293.966,00 berupa lima buah *Speed Boat* dari Ditjen Imigrasi dan barang lainnya, Kanim Ngurah Rai sebesar Rp3.780.934.203,00, Ditjen Imigrasi sebesar Rp2.273.861.000,00, Kanim Bekasi

LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2013 - AUDITED

sebesar Rp1.026.481.845,00, dan satker Sekretariat Jenderal sebesar Rp757.660.000,00, dan lain-lain;

- Hibah Masuk sebesar Rp10.551.897.935,00 diantaranya terdapat pada satker Sekretariat Jenderal sebesar Rp9.322.500.000,00 berupa Kapal Passanger (Kapal Penumpang) dari PT Holcim, Lapas Semarang sebesar Rp368.220.000,00, Rudenim Pekanbaru sebesar Rp261.500.000,00, Rutan Batang sebesar Rp246.330.835,00, dan pada Lapas Bojonegoro sebesar Rp68.150.000,00,
- Pembatalan Penghapusan sebesar Rp351.162.500,00 diantaranya terdapat pada Kanim Yogyakarta sebesar Rp244.820.500,00 berupa Mini Bus (Penumpang 14 Orang Ke bawah) dan pada Rutan Gianyar sebesar Rp106.342.000,00 berupa Perkakas Kantor Lainnya;
- Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP sebesar Rp40.381.755.025,00 diantaranya terdapat pada satker Ditjen Imigrasi sebesar Rp37.257.053.500,00 berupa penyelesaian pengadaan *Speed Boat*, Kanim Mataram sebesar Rp1.448.862.000,00, satker Kanwil Kalimantan Selatan sebesar Rp600.002.000,00, Kanim Cilegon sebesar Rp570.850.900,00, dan pada satker Pusjianbang sebesar Rp270.202.075,00;
- Penyelesaian Pembangunan Langsung sebesar Rp159.760.200,00, diantaranya terdapat pada Lapas Timika sebesar Rp125.927.200,00 berupa Peralatan Jaringan Lainnya, Lapas Palu sebesar Rp20.250.000,00, dan pada Kanim Tanjung Priok sebesar Rp13.583.000,00;
- Reklasifikasi Masuk sebesar Rp12.369.573.024,00 diantaranya terdapat pada satker Kanwil Yogyakarta sebesar Rp1.574.524.000,00 berupa empat buah Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah) dan tiga buah mobil tahanan, Rutan Surakarta sebesar Rp1.904.971.200,00, satker Kanwil Kalimantan Selatan sebesar Rp367.242.700,00, Kanim Tembagapura Papua sebesar Rp350.000.000,00, dan pada Kanim Tanjung Balai Karimun Kepulauan Riau sebesar Rp317.350.000,00;
- Pengembangan Nilai Aset sebesar Rp11.145.660.043,00 diantaranya terdapat pada Ditjen Hak Kekayaan Intelektual sebesar Rp2.773.493.745,00 berupa *Server* dan *Storage Modul Disk* (Peralatan Mainframe), Ditjen Imigrasi sebesar Rp4.884.224.788,00, satker Sekretariat Jenderal sebesar Rp1.055.936.206,00, Ditjen AHU sebesar Rp307.813.000,00, dan Kanim Tarakan Kalimantan Timur sebesar Rp230.780.000,00;
- Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas (+) sebesar Rp17.238.677.216,00 diantaranya terdapat pada Ditjen Imigrasi sebesar Rp16.647.284.810,00 berupa enam buah *scanner* dan *server*, Lapas Besi Nusakambangan sebesar Rp141.802.000,00, Kanim Mataram sebesar Rp102.300.000,00, Rudenim Jakarta sebesar Rp50.055.000,00, dan Lapas Batu Nusakambangan sebesar Rp49.000.000,00;

LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2013 - AUDITED

- Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset sebesar Rp4.467.621.551,00 diantaranya terdapat pada satker Sekretariat Jenderal sebesar Rp 4.325.534.000,00 berupa *Capasitor Bank*, Kanim Jakarta Pusat sebesar Rp47.224.000,00, Akademi Ilmu Keimigrasian (AIM) sebesar Rp29.854.500,00, Kanim Singaraja sebesar Rp25.052.000,00, dan Cabang Rutan Alahan Panjang sebesar Rp14.883.094,00;
- Perolehan Lainnya sebesar Rp1.005.650.015,00 diantaranya terdapat pada satker Kanwil Sumatera Barat sebesar Rp337.550.000,00 berupa dua buah Mini Bus (Penumpang 14 Orang Ke bawah), Cabang Rutan Martapura Kalimantan Selatan sebesar Rp176.000.000,00, Lapas Sarolangun Jambi sebesar Rp99.642.000,00, Kanim Pematang Siantar sebesar Rp35.400.000,00, dan satker Kanwil Kalimantan Timur sebesar Rp30.702.000,00;
- Reklas dari Aset Lainnya ke Aset Tetap sebesar Rp956.222.369,00 diantaranya terdapat pada Lapas Pekanbaru sebesar Rp183.955.644,00 berupa barang *Gastro Instestinal Set* dan *Handy Talky*, Kanim Jakarta Pusat sebesar Rp179.053.700,00, Rutan Kendari sebesar Rp136.400.000,00, Akademi Ilmu Pemasarakatan sebesar Rp107.707.000,00, dan Rutan Surakarta sebesar Rp48.527.172,00;
- Perolehan Reklas dari Intra Ke Ekstra/Sebaliknya sebesar Rp51.745.170,00 diantaranya terdapat pada Kanim Malang Rp26.160.000 berupa *Sice* dan barang lainnya, Kanim Bandung sebesar Rp17.935.170,00, Lapas Watampone sebesar Rp4.900.000,00, Ditjen Imigrasi sebesar Rp2.000.000,00, dan Lapas Batu sebesar Rp750.000,00;
- Penerimaan Aset Tetap Renovasi sebesar Rp24.640.000,00 terdapat pada Lapas Sidoardjo berupa *Station Wagon*; dan
- Transaksi Normalisasi BMN Aset Tetap bertambah sebesar Rp3.113.267.589,00 diantaranya terdapat pada Ditjen Imigrasi sebesar Rp1.605.507.000,00 berupa A.C sentral, Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah) dan barang lainnya, Ditjen Pemasarakatan sebesar Rp225.931.511,00, Lapas Pamekasan sebesar Rp176.986.727,00, Akademi Ilmu Imigrasi sebesar Rp111.455.500,00, dan Lapas Pamekasan sebesar Rp49.845.600,00.

Mutasi Kurang

- Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas berkurang sebesar Rp7.538.714.030,00 diantaranya terdapat pada Kanim Jakarta Pusat sebesar Rp1.075.690.000,00 berupa Televisi, sebesar Rp1.069.986.500,00 berupa Laptop, sebesar Rp978.670.000,00 berupa Lemari Penyimpanan, sebesar Rp394.152.000,00 berupa Mesin *Photo Copy* dan Rutan Unaaha Sulawesi Tenggara sebesar Rp707.292.708,00 berupa kursi besi/Metal, dan lain-lain;
- Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset berkurang sebesar Rp108.143.291.325,00

LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2013 - AUDITED

diantaranya terdapat pada satker Sekretariat Jenderal sebesar Rp22.286.071.214,00 berupa *chiller*, sebesar Rp58.674.980.000,00 berupa *elevator/lift*, sebesar Rp5.073.339.000,00 berupa alat kebakaran, sebesar Rp9.666.478.000,00 berupa *Stationary Generating Set*, dan sebesar Rp663.955.300,00 berupa peralatan fasilitas bantu pelayanan dan pengamanan bandar udara lainnya;

- Penghapusan sebesar Rp1.694.627.217,00 diantaranya terdapat pada Rutan Sidrap sebesar Rp99.950.000,00 berupa Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah), Lapas Bulu Kumba sebesar Rp90.603.000,00 berupa station wagon, Lapas Pekanbaru sebesar Rp86.021.000,00 berupa Mobil *Ambulance*, Lapas Medan sebesar Rp50.060.000,00 berupa Mobil *Ambulance*, dan Kanim Tembilahan sebesar Rp37.900.000,00 berupa Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah), dan lain-lain;
- Transfer Keluar sebesar Rp108.968.869.819,00 diantaranya terdapat pada Ditjen Imigrasi sebesar Rp 26.838.399.500,00 berupa *speed boat*, satker Sekretariat Jenderal sebesar Rp19.203.441.000,00 berupa *chiller*, sebesar Rp2.273.861.000,00 berupa Alat pemadam kebakaran, sebesar Rp2.221.725.000,00 berupa alat Pembersih lainnya, sebesar Rp1.822.269.200,00 berupa CCTV, dan lain-lain;
- Hibah Keluar sebesar Rp45.590.000,00 terdapat pada satker Kanim Jakarta Selatan berupa PC Unit;
- Reklasifikasi Keluar sebesar Rp23.824.215.652,00 diantaranya terdapat pada satker Ditjen Imigrasi sebesar Rp5.692.599.000,00 berupa *Stationary Generating Set*, sebesar Rp4.726.055.000,00 berupa *Micro bus* (Penumpang 15 s/d 29 orang), Lapas Denpasar sebesar Rp1.274.400.000,00 berupa Alat Kantor Lainnya, Kanim Mataram sebesar Rp374.102.192,00 berupa Peralatan Komputer lainnya, Kanim Tembagaapura sebesar Rp350.000.000,00 berupa Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah), dan lain-lain;
- Koreksi Pencatatan berkurang sebesar Rp2.996.191.124,00 diantaranya terdapat pada Ditjen Imigrasi sebesar Rp1.450.938.619,00 berupa server, Kanim Yogyakarta sebesar Rp286.000.000,00 berupa Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah), Rutan Ternate sebesar Rp189.500.000,00 berupa Kendaraan bermotor khusus lainnya, Kanim Pati Jawa Tengah sebesar Rp182.842.000,00 berupa *Generator Set*, Lapas Batu Nusakambangan sebesar Rp175.000.000,00 berupa Perahu Penyeberangan, dan lain-lain;
- Usulan Barang Rusak Berat ke Pengelola sebesar Rp168.188.654,00 diantaranya terdapat pada Kanim Karawang sebesar Rp28.000.000,00 berupa Mesin Fotocopy Double Folio, Kanim Pemalang sebesar Rp16.050.000,00 berupa CPU, sebesar Rp7.781.120,00 berupa AC Split, Lapas Narkotika Muara Beliti sebesar Rp5.300.000,00 berupa Laptop, dan sebesar Rp2.517.500,00 berupa *Facsimile*, dan

LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2013 - AUDITED

lain-lain;

- Usulan Barang Hilang ke Pengelola sebesar Rp32.534.000,00 terdapat pada Bapas Jakarta Pusat berupa Sepeda Motor;
- Penghentian Aset Dari Penggunaan sebesar Rp43.435.567.864,00 terdapat pada Ditjen AHU sebesar Rp3.745.164.000,00 berupa *Fire Alarm System*, sebesar Rp3.624.519.000,00 berupa *Concrete Lift*, sebesar Rp482.229.000,00 berupa *server*, pada Lapas Denpasar sebesar Rp800.000.000,00 berupa alat *detector* barang terlarang, dan lain-lain;
- Penghapusan semu karena Reklasifikasi sebesar Rp4.424.400,00 terdapat pada Kanim Surakarta sebesar Rp2.730.000,00 berupa Kursi metal, sebesar Rp574.400,00 berupa *Microphone*, sebesar Rp380.000,00 berupa kipas angin, pada Kanim Padang sebesar Rp500.000,00 berupa dispenser, pada Rutan Mamuju Sulawesi Barat sebesar Rp190.000,00 berupa kipas angin, dan lain-lain;
- Transaksi Normalisasi BMN Aset Tetap berkurang sebesar Rp4.617.145.897,00 diantaranya terdapat pada satker Sekretariat Jenderal sebesar 1.698.063.500,00, Lapas Denpasar sebesar Rp201.300.000,00 berupa *Ambulance*, Rutan Palembang sebesar Rp120.460.000,00 berupa Bus (penumpang 30 ke atas), Kanim Pontianak sebesar Rp93.499.999,00 berupa *station Wagon*, Kanim Jakarta Pusat sebesar Rp83.124.000,00 berupa Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah), dan lain-lain; dan
- Pada tahun 2013 terdapat kejadian kebakaran pada satker-satker antara lain pada Lapas Tanjung Gusta Medan, Lapas Labuhan Ruku, Lapas Palopo Sulawesi Selatan, dan pada Februari 2014 di Lapas Lhokseumawe, aset peralatan dan mesin yang terbakar telah diinventarisir namun terhadap penghapusan barang dilakukan pada tahun 2014. Untuk Lapas Tanjung Gusta, Kakanwil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumut telah mengajukan permohonan penghapusan aset Lapas Tanjung Gusta pada tanggal 17 Desember 2013. KPKNL Medan telah memberikan persetujuan penghapusan BMN selain tanah dan/atau gedung dan bangunan pada Lapas Tanjung Gusta Medan berdasarkan Surat Kepala KPKNL Medan Nomor 5-14/MK.6/NKN.02/KNL.01/2014 tanggal 5 Maret 2014. Sebanyak 5.436 buah peralatan dan mesin dan 1 buah jaringan dengan nilai perolehan Rp3.075.563.126,00 dan memiliki nilai buku Rp482.423.512,00 telah dihapuskan dari SIMAK BMN.

C.2.3. Gedung dan Bangunan

**Gedung
dan
Bangunan**

dan

Saldo Gedung dan Bangunan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia per 31 Desember 2013 sebesar Rp6.428.886.350.375,00 bila dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2012 sebesar Rp5.570.641.029.594,00 terjadi kenaikan sebesar Rp858.245.320.781,00 atau naik 15,41% dari tahun 2012. Nilai akumulasi penyusutan

LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2013 - AUDITED

gedung dan bangunan per 31 Desember 2013 sebesar Rp1.953.548.474.012,00 sehingga nilai buku gedung dan bangunan per 31 Desember 2013 sebesar Rp4.475.337.876.363,00. Perbandingan gedung dan bangunan per 31 Desember 2013 dengan periode sebelumnya per wilayah dan eselon I sebagai berikut:

**Tabel 58. Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2013
pada Kanwil dan Unit Eselon I**

No	Kanwil/ Eselon I	31 Desember 2013 (Rp,00)	31 Desember 2012 (Rp,00)	Kenaikan / (Penurunan) (Rp,00)
1	DKI Jakarta	566.159.091.778	562.492.265.836	3.666.825.942
2	Jawa Barat	431.991.219.338	414.376.480.430	17.614.738.908
3	Jawa Tengah	332.441.713.454	322.664.680.765	9.777.032.689
4	Yogyakarta	111.022.828.928	104.705.988.046	6.316.840.882
5	Jawa Timur	255.271.683.246	244.707.068.890	10.564.614.356
6	Aceh	157.051.755.980	164.163.533.448	(7.111.777.468)
7	Sumatera Utara	370.732.096.412	344.654.127.922	26.077.968.490
8	Sumatera Barat	113.953.034.263	112.265.646.868	1.687.387.395
9	Riau	165.594.340.127	153.865.881.177	11.728.458.950
10	Jambi	97.523.519.815	72.275.420.768	25.248.099.047
11	Sumatera Selatan	272.835.015.616	225.976.428.621	46.858.586.995
12	Lampung	150.881.883.713	148.378.483.713	2.503.400.000
13	Kalimantan Barat	122.740.819.596	121.305.931.522	1.434.888.074
14	Kalimantan Tengah	101.267.169.263	56.900.061.817	44.367.107.446
15	Kalimantan Selatan	67.735.713.571	64.878.086.721	2.857.626.850
16	Kalimantan Timur	201.969.207.772	136.196.850.008	65.772.357.764
17	Sulawesi Utara	100.793.373.512	98.389.847.107	2.403.526.405
18	Sulawesi Tengah	94.924.806.405	80.164.702.290	14.760.104.115
19	Sulawesi Selatan	195.904.545.678	177.508.985.774	18.395.559.904
20	Sulawesi Tenggara	67.472.164.574	66.722.203.824	749.960.750
21	Maluku	95.607.055.596	95.740.408.596	(133.353.000)
22	Bali	71.296.651.586	65.682.741.856	5.613.909.730
23	Nusa Tenggara Barat	67.827.415.276	62.463.742.290	5.363.672.986
24	Nusa Tenggara Timur	153.221.586.675	153.129.989.207	91.597.468
25	Papua	212.554.560.735	202.981.440.529	9.573.120.206
26	Bengkulu	42.645.950.882	36.093.318.591	6.552.632.291
27	Maluku Utara	100.063.798.035	99.533.166.035	530.632.000
28	Banten	176.584.234.443	118.897.089.726	57.687.144.717
29	Bangka Belitung	70.494.264.117	69.495.980.915	998.283.202
30	Gorontalo	37.685.259.706	36.318.110.706	1.367.149.000
31	Kepulauan Riau	122.651.845.243	120.566.941.028	2.084.904.215
32	Papua Barat	176.499.544.782	172.828.218.782	3.671.326.000
33	Sulawesi Barat	74.786.873.815	69.352.753.491	5.434.120.324
34	Perwakilan Imigrasi di Luar Negeri	-	-	-
35	Setjen (Biro Umum & Pusjianbang)	190.873.715.209	195.186.221.208	(4.312.505.999)
36	Inspektorat Jenderal	1.326.884.427	2.274.392.127	(947.507.700)
37	Ditjen Administrasi Hukum Umum	60.341.897.119	60.208.171.119	133.726.000

LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2013 - AUDITED

38	Ditjen Pemasyarakatan	49.132.354.162	42.946.889.262	6.185.464.900
39	Ditjen Imigrasi	542.695.732.632	97.251.738.302	445.443.994.330
40	Ditjen HKI	36.764.544.336	36.517.598.336	246.946.000
41	Ditjen PP	23.173.517.920	23.034.879.920	138.638.000
42	Ditjen HAM	6.949.672.429	6.412.381.854	537.290.575
43	BPHN	28.876.612.176	23.845.031.712	5.031.580.464
44	Balitbang HAM	-	-	-
45	BPSDM	108.566.396.033	107.287.148.455	1.279.247.578
Jumlah		6.428.886.350.375	5.570.641.029.594	858.245.320.781

Penambahan saldo Gedung dan Bangunan sebesar Rp858.245.320.781,00 karena beberapa transaksi sebagai berikut:

Tabel 59. Rincian Mutasi Akun Gedung dan Bangunan Per Jenis Transaksi Tahun 2013

Keterangan	Jumlah (Rp,00)
Saldo per 31 Desember 2012	5.570.641.029.594
A. Mutasi Tambah	
Penambahan saldo awal	90.581.035.751
Pembelian	1.288.525.218
Transfer Masuk	933.941.435.046
Hibah (Masuk)	2.625.538.430
Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	189.176.010.867
Reklasifikasi Masuk	130.108.518.655
Bangun Guna Serah	22.600.000
Pertukaran	3.738.925.000
Penyelesaian Pembangunan Langsung	955.272.184
Pengembangan Nilai Aset	60.384.091.678
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas (+)	378.499.607.205
Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset (+)	100.184.008.907
Perolehan Lainnya	9.443.779.369
Reklas dari Aset Lainnya ke Aset Tetap	1.716.317.000
Perolehan Reklas dari Intra ke Ekstra	399.351.563
Penerimaan Aset Tetap Renovasi	4.901.349.500
Pengembangan Melalui KDP	85.796.700.975
Transaksi Normalisasi BMN Aset Tetap (+)	1.014.860.415
Jumlah Mutasi Tambah	1.994.777.927.763
B. Mutasi Kurang	
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas (-)	64.128.647.235
Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset (-)	70.163.000
Penghapusan	3.084.631.700
Transfer Keluar	901.019.941.357
Reklasifikasi Keluar	131.789.553.484
Koreksi Pencatatan	21.667.782.523
Penghentian aset dari penggunaan	2.892.726.198
Transaksi Normalisasi BMN Aset Tetap (-)	11.879.161.485
Jumlah Mutasi Kurang	1.136.532.606.982
Jumlah Mutasi	858.245.320.781

LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2013 - AUDITED

Saldo per 31 Desember 2013	6.428.886.350.375
Akumulasi Penyusutan	1.953.548.474.012
Nilai Buku per 31 Desember 2013	4.475.337.876.363

Penjelasan Transaksi:

Mutasi Tambah

- Penambahan Saldo Awal sebesar Rp90.581.035.751,00 diantaranya terdapat pada satker kanwil Kalimantan Tengah sebesar Rp42.845.854.446,00 berupa Bangunan Gedung Lapas dan Bangunan Gedung Rutan, satker Sekretariat Jenderal sebesar Rp35.694.389.000,00 berupa Bangunan Parkir Tertutup Permanen, Lapas Wamena Papua sebesar Rp781.921.276,00 berupa Bangunan Gedung Lapas, Bapas Palembang sebesar Rp628.696.000,00 berupa Bangunan Gedung Kantor Permanen, dan lain-lain;
- Pembelian sebesar Rp1.288.525.218,00 diantaranya terdapat pada Kanim Balikpapan sebesar Rp186.179.000,00 berupa Pagar Permanen, Kanim Pamekasan sebesar Rp182.984.000,00 berupa Pagar Permanen, Lapas Malang sebesar Rp172.888.000,00 berupa Bangunan Parkir lainnya, Kanim Jakarta Timur sebesar Rp156.596.880,00 dan Kanim Dumai Riau sebesar Rp119.996.300,00 berupa Pagar Permanen, dan lain-lain;
- Transfer Masuk sebesar Rp933.941.435.046,00 diantaranya terdapat pada satker Ditjen Imigrasi sebesar Rp476.230.898.000,00 berupa Bangunan Gedung Kantor Permanen dari Sekretariat Jenderal (Gedung Sentra Mulia), Lapas Banjar Jawa Barat sebesar Rp40.224.777.592,00 berupa Bangunan Gedung Kantor Permanen, Lapas Narkotika Langkat Sumatera Utara sebesar Rp36.878.045.436,00 berupa Bangunan Gedung Lapas, Rutan Pekanbaru sebesar Rp27.324.843.000,00 berupa Bangunan Gedung Kantor Permanen, Rutan Tamiang Layang Kalimantan Tengah sebesar Rp22.697.907.900,00 berupa Bangunan Gedung Lapas, dan lain-lain;
- Hibah Masuk sebesar Rp2.625.538.430,00 terdapat pada satker Sekretariat Jenderal sebesar Rp2.476.122.430,00 berupa Bangunan Gedung untuk pos jaga lainnya dan Lapas Sijunjung Sumatera Barat sebesar Rp149.416.000,00 berupa dua unit Rumah Negara Golongan I Tipe E Permanen;
- Penyelesaian Pembangunan dengan KDP sebesar Rp189.176.010.867,00 diantaranya terdapat pada Lapas Cilegon sebesar Rp51.913.449.683,00, Rutan Pinrang Sulawesi Selatan sebesar Rp11.520.902.624,00, Lapas Palu sebesar Rp10.440.460.879,00, dan lain-lain;
- Reklasifikasi Masuk sebesar Rp130.108.518.655,00, diantaranya terdapat pada Lapas Cilegon sebesar Rp51.913.449.683,00, Rutan Pinrang Sulawesi Selatan sebesar Rp11.520.902.624, Lapas Palu sebesar Rp10.440.460.879,00, satker Kanwil Bengkulu sebesar Rp7.173.000.000,00, Kanim Ngurah Rai sebesar Rp6.490.633.000; dan lain-lain;

LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2013 - AUDITED

- Bangun Guna Serah sebesar Rp22.600.000,00 terdapat pada Lapas Madiun berupa Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar lainnya;
- Pertukaran sebesar Rp3.738.925.000,00 terdapat pada Kanim Yogyakarta sebesar Rp2.342.247.000,00 dan satker Kanwil Yogyakarta sebesar Rp1.396.678.000,00,
- Penyelesaian Pembangunan Langsung sebesar Rp955.272.184,00 diantaranya terdapat pada Kanim Tanjung Perak sebesar Rp209.398.000,00 berupa Bangunan Tempat Parkir, Lapas Narkotika Karang Intan sebesar Rp208.000.000,00 berupa Bangunan Rumah Tahanan, Kanim Kediri sebesar Rp183.511.000,00, Kanim Kuala Tungkal Jambi sebesar Rp140.695.000,00, Lapas Dompur NTB sebesar Rp73.800.000,00 yang masing-masing berupa Bangunan Gedung Kantor Permanen, dan lain-lain;
- Pengembangan Nilai Aset sebesar Rp60.384.091.678,00 diantaranya terdapat pada Ditjen Imigrasi sebesar Rp21.759.310.571,00 berupa Bangunan Gedung Kantor Permanen, Lapas Medan sebesar Rp1.628.843.000,00 berupa Bangunan Gedung Lapas, Kanim Yogyakarta sebesar Rp1.133.778.000,00 dan satker Sekretariat Jenderal sebesar Rp1.072.574.200,00 masing-masing berupa Bangunan Gedung Kantor Permanen, BPSDM sebesar Rp979.902.400,00 berupa Asrama Permanen, dan lain-lain;
- Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas (+) sebesar Rp378.499.607.205,00 diantaranya terdapat pada satker Sekretariat Jenderal sebesar Rp324.864.288.864,00 berupa Bangunan Gedung Kantor Permanen, Lapas Narkotika Samarinda sebesar Rp21.064.953.050,00 berupa Bangunan Gedung Lapas dan Pagar Permanen, Kanim Pemalang sebesar Rp3.199.635.800,00 berupa Bangunan Gedung Kantor Permanen, Lapas Bau-Bau Sulawesi Tenggara sebesar Rp3.194.083.000,00 berupa Bangunan Gedung Lapas, dan lain-lain;
- Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset (+) sebesar Rp100.184.008.907,00 terdapat pada satker Sekretariat Jenderal sebesar Rp100.115.867.907,00 dan Kanim Singaraja Bali sebesar Rp68.141.000,00 masing-masing berupa Bangunan Gedung Kantor Permanen yang disebabkan hasil penilaian kembali asset;
- Perolehan Lainnya sebesar Rp9.443.779.369,00 diantaranya terdapat pada satker Kanwil Sumatera Selatan sebesar Rp2.649.206.237,00 dan pada Ditjen Pemasarakatan sebesar Rp639.810.000,00, dan lain-lain;
- Reklas dari aset lainnya ke aset tetap sebesar Rp1.716.317.000,00 terdapat pada Lapas Gunung Sitoli Sumatera Utara sebesar Rp998.710.000,00, Kanim Merauke sebesar Rp602.872.000,00, Lapas Narkotika Cirebon sebesar Rp66.120.000,00, dan Rutan Kefamenanu NTT sebesar Rp48.615.000,00,
- Perolehan Reklas dari Intra ke Ekstra sebesar Rp399.351.563,00 terdapat pada Kanim

LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2013 - AUDITED

Jakarta Timur sebesar Rp172.557.024,00, Rutan Gianyar sebesar Rp168.214.000,00, Bapas Jambi sebesar Rp35.324.539,00, dan Rutan Siak Sri Indrapura Riau sebesar Rp23.256.000,00,

- Penerimaan Aset Tetap Renovasi sebesar Rp4.901.349.500,00 terdapat pada Badan Pembinaan Hukum Nasional Jakarta (BPHN) sebesar Rp4.597.202.000,00, Ditjen HAM sebesar Rp274.227.500,00, dan Lapas Sidoarjo sebesar Rp29.920.000,00 yang masing-masing berupa Bangunan Gedung Kantor Permanen;
- Pengembangan Melalui KDP sebesar Rp85.796.700.975,00 diantaranya terdapat pada satker Kanwil Kalimantan Timur sebesar Rp14.761.423.300,00 berupa Bangunan Gedung Lapas, Kanim Medan sebesar Rp4.104.350.000,00, satker Kanwil Jawa Timur sebesar Rp3.915.066.000,00, Kanwil Sumatera Utara sebesar Rp3.074.823.500,00, Rutan Surabaya sebesar Rp2.972.990.000,00 masing-masing berupa Bangunan Gedung Kantor Permanen, dan lain-lain; dan
- Transaksi Normalisasi BMN Aset Tetap sebesar Rp1.014.860.415,00 diantaranya terdapat pada Kanim Singaraja sebesar Rp328.553.000,00, Lapas Arga Makmur Bengkulu sebesar Rp106.995.300,00, Lapas Manokwari Papua Barat sebesar Rp60.100.000,00, satker Kanwil Kalimantan Selatan sebesar Rp32.991.887,00, dan lain-lain.

Mutasi Kurang

- Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas berkurang sebesar Rp64.128.647.235,00 diantaranya terdapat pada Ditjen Imigrasi sebesar Rp54.297.497.592,00 berupa Bangunan Gedung Kantor Permanen, Kanwil Sumatera Selatan sebesar Rp3.720.110.307,00 berupa Bangunan Klinik/Puskesmas, Lapas Sarolangun Jambi sebesar Rp2.918.781.896,00 berupa Rumah Negara Golongan I Tipe D Permanen, Bapas Pontianak sebesar Rp745.543.000,00 berupa Rumah Negara Golongan I Tipe C Semi Permanen, satker Kanwil Sulawesi Utara sebesar Rp550.419.204,00 berupa Bangunan Gedung Kantor Permanen, dan lain-lain;
- Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset berkurang sebesar Rp70.163.000,00 terdapat pada satker Sekretariat Jenderal berupa Bangunan Gedung Pos Jaga;
- Penghapusan sebesar Rp3.084.631.700,00 diantaranya terdapat pada Kanim Ngurah Rai sebesar Rp894.855.000,00 berupa Bangunan Gedung Kantor Permanen dan Gedung Tahanan Karantina, Kanim Batam sebesar Rp613.900.000,00 berupa Bangunan Gedung Kantor Permanen, Rumah Detensi Imigrasi Balikpapan sebesar Rp367.064.000,00 berupa Rumah Negara Golongan II Tipe C Permanen, Kanim Medan sebesar Rp133.000.000,00 berupa Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen, dan lain-lain;
- Transfer Keluar sebesar Rp901.019.941.357,00 diantaranya terdapat pada satker

LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2013 - AUDITED

Sekretariat Jenderal sebesar Rp476.230.898.000,00 berupa Bangunan Gedung Kantor Permanen ke Direktorat Jenderal Imigrasi, Lapas Ciamis sebesar Rp40.224.777.592,00 dan Rutan Tanjung Pura sebesar Rp36.878.045.436,00 masing-masing berupa Bangunan Gedung Lapas, Lapas Pekanbaru sebesar Rp27.324.843.000,00 berupa Bangunan Gedung Kantor Permanen, dan lain-lain;

- Reklasifikasi Keluar sebesar Rp131.789.553.484,00 di antaranya terdapat pada satker Kantor Wilayah Kalimantan Timur sebesar Rp30.685.301.225,00 berupa Bangunan Gedung Lapas Lainnya, Rutan Raha Sulawesi Tenggara sebesar Rp11.588.164.911,00 berupa Bangunan Gedung Rutan, satker Kanwil Bengkulu sebesar Rp7.173.000.000,00 dan Bapas Jayapura sebesar Rp4.478.963.000,00 masing-masing berupa Bangunan Gedung Kantor Permanen, dan lain-lain;
- Koreksi Pencatatan sebesar Rp21.667.782.523,00 diantaranya terdapat pada Kanim Ngurah Rai sebesar Rp5.468.036.000,00 berupa Bangunan Gedung Kantor Permanen, Lapas Abepura Papua sebesar Rp4.524.482.000,00 berupa Bangunan Gedung Lapas lainnya, Kanim Pemalang Jawa Tengah sebesar Rp3.199.635.800,00 dan Kanim Muara Enim Sumatera Selatan sebesar Rp1.104.649.000,00 masing-masing berupa Bangunan Gedung Kantor Permanen, Lapas Kupang NTT sebesar Rp859.847.000,00 berupa Bangunan Gedung Lapas, dan lain-lain;
- Penghentian Aset Dari Penggunaan sebesar Rp2.892.726.198,00 diantaranya terdapat pada Kanim Nunukan Kalimantan Timur sebesar Rp1.045.697.889,00 berupa Bangunan Gedung Kantor Permanen dan Gedung Tahanan Karantina, Lapas Permisan Jawa Tengah sebesar Rp419.000.000,00 berupa Bangunan Gedung Kantor Permanen, Lapas Batu Jawa Tengah sebesar Rp153.270.926,00 berupa Bangunan Gedung Lapas, Rutan Makasar sebesar Rp146.656.000,00 berupa Bangunan Gedung Tempat Kerja lainnya permanen, dan lain-lain;
- Transaksi Normalisasi BMN Aset Tetap berkurang sebesar Rp11.879.161.485,00 diantaranya terdapat pada Lapas Bau-Bau sebesar Rp3.194.083.000,00, Lapas Wanita Palembang sebesar Rp2.702.518.000,00, masing-masing berupa Bangunan Gedung Lapas, Lapas Singkawang Kalimantan Barat sebesar Rp1.694.566.000,00 Kanim Ambon sebesar Rp1.451.590.000,00, Bapas Palembang sebesar Rp628.696.000,00 masing-masing berupa Bangunan Gedung Kantor Permanen, dan lain-lain; dan
- Pada tahun 2013 terdapat kejadian kebakaran pada satker-satker antara lain pada Lapas Tanjung Gusta Medan, Lapas Labuhan Ruku, Lapas Palopo Sulawesi Selatan, dan pada Februari 2014 di Lapas Lhokseumawe, aset gedung dan bangunan yang terbakar telah diinventarisir namun terhadap penghapusan barang dilakukan pada tahun 2014.

LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2013 - AUDITED

Jalan, Irigasi dan Jaringan C.2.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia per 31 Desember 2013 sebesar Rp187.832.116.877,00 bila dibandingkan dengan per 31 Desember 2012 sebesar Rp161.477.026.260,00 terjadi kenaikan sebesar Rp26.355.090.617,00 atau naik 16,32% dari tahun 2012. Nilai akumulasi penyusutan jalan, irigasi, dan jaringan per 31 Desember 2013 sebesar Rp63.772.394.301,00 sehingga nilai buku jalan, irigasi, dan jaringan per 31 Desember 2013 sebesar Rp124.059.722.576,00. Perbandingan jalan, irigasi dan jaringan per 31 Desember 2013 dengan periode sebelumnya per wilayah dan eselon I sebagai berikut:

**Tabel 60. Nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2013
Pada Kanwil dan Unit Eselon I**

No	Kanwil/ Eselon I	31 Desember 2013 (Rp,00)	31 Desember 2012 (Rp,00)	Kenaikan / (Penurunan) (Rp,00)
1	DKI Jakarta	4.034.616.815	3.869.088.815	165.528.000
2	Jawa Barat	10.167.683.990	8.168.923.890	1.998.760.100
3	Jawa Tengah	8.569.504.800	8.264.945.898	304.558.902
4	Yogyakarta	1.973.851.865	1.569.274.975	404.576.890
5	Jawa Timur	6.455.972.144	6.113.119.164	342.852.980
6	Aceh	4.530.429.950	4.519.009.950	11.420.000
7	Sumatera Utara	692.879.516	800.305.166	(107.425.650)
8	Sumatera Barat	7.016.050.422	6.971.781.137	44.269.285
9	Riau	1.520.424.900	1.321.014.900	199.410.000
10	Jambi	1.914.625.568	1.861.655.568	52.970.000
11	Sumatera Selatan	1.661.468.471	1.019.737.614	641.730.857
12	Lampung	6.837.624.533	6.654.601.529	183.023.004
13	Kalimantan Barat	2.526.518.492	2.403.440.092	123.078.400
14	Kalimantan Tengah	2.275.364.480	2.275.364.480	-
15	Kalimantan Selatan	2.280.789.499	1.118.618.249	1.162.171.250
16	Kalimantan Timur	11.880.618.166	7.051.217.232	4.829.400.934
17	Sulawesi Utara	2.906.470.501	2.906.470.501	-
18	Sulawesi Tengah	6.050.430.011	6.016.647.011	33.783.000
19	Sulawesi Selatan	1.287.849.004	1.071.449.004	216.400.000
20	Sulawesi Tenggara	989.305.815	731.313.815	257.992.000
21	Maluku	11.100.862.399	11.100.862.399	-
22	Bali	304.600.350	154.810.850	149.789.500
23	Nusa Tenggara Barat	1.720.405.414	1.481.825.573	238.579.841
24	Nusa Tenggara Timur	5.975.995.467	5.311.123.467	664.872.000
25	Papua	11.848.216.982	11.626.869.682	221.347.300
26	Bengkulu	1.748.414.825	1.467.716.113	280.698.712
27	Maluku Utara	2.378.250.742	2.378.250.742	-
28	Banten	14.782.359.067	5.943.328.867	8.839.030.200
29	Bangka Belitung	1.970.616.408	1.970.616.408	-
30	Gorontalo	2.496.157.969	2.496.157.969	-
31	Kepulauan Riau	3.559.625.436	3.522.925.436	36.700.000
32	Papua Barat	6.873.745.770	6.873.745.770	-

LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2013 - AUDITED

33	Sulawesi Barat	2.198.424.689	1.308.036.318	890.388.371
34	Perwakilan Imigrasi di Luar Negeri	112.376.010	-	112.376.010
35	Setjen (Biro Umum & Pusjianbang)	4.606.859.870	4.606.859.870	-
36	Inspektorat Jenderal	-	-	-
37	Ditjen Administrasi Hukum Umum	587.150.644	587.150.644	-
38	Ditjen Pemasyarakatan	27.500.000	27.500.000	-
39	Ditjen Imigrasi	26.095.841.162	22.311.232.431	3.784.608.731
40	Ditjen HKI	-	-	-
41	Ditjen PP	968.500.000	968.500.000	-
42	Ditjen HAM	-	-	-
43	BPHN	-	-	-
44	Balitbang HAM	-	-	-
45	BPSDM	2.903.734.731	2.631.534.731	272.200.000
Jumlah		187.832.116.877	161.477.026.260	26.355.090.617

Penambahan saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar Rp26.355.090.617,00 karena beberapa transaksi sebagai berikut:

Tabel 61. Rincian Mutasi Akun Jalan, Irigasi dan Jaringan Per Jenis Transaksi Tahun 2013

Keterangan	Jumlah (Rp,00)
Saldo per 31 Desember 2012	161.477.026.260
A. Mutasi Tambah	
Penambahan saldo awal	1.984.556.635
Pembelian	6.557.964.837
Transfer Masuk	4.675.399.891
Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	10.889.438.711
Reklasifikasi Masuk	5.086.414.712
Pertukaran	23.653.000
Penyelesaian Pembangunan Langsung	115.548.000
Pengembangan Nilai Aset	301.294.938
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas (+)	2.464.253.893
Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset (+)	1.527.414.000
Perolehan Lainnya	811.801.857
Pengembangan Melalui KDP	2.975.000.200
Jumlah Mutasi Tambah	37.412.740.674
B. Mutasi Kurang	
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas (-)	192.155.900
Transfer Keluar	7.202.813.891
Reklasifikasi Keluar	2.659.948.150
Koreksi Pencatatan	71.634.420
Penghentian aset dari penggunaan	6.495.896
Transaksi Normalisasi BMN Aset Tetap (-)	924.601.800
Jumlah Mutasi Kurang	11.057.650.057
Jumlah Mutasi	26.355.090.617
Saldo per 31 Desember 2013	187.832.116.877
Akumulasi Penyusutan	63.772.394.301
Nilai Buku per 31 Desember 2013	124.059.722.576

LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2013 - AUDITED

Penjelasan Transaksi:

Mutasi Tambah

- Penambahan saldo awal sebesar Rp1.984.556.635,00 diantaranya terdapat pada satker Kanwil Gorontalo sebesar Rp514.047.000,00 berupa Jalan Khusus Kompleks, pada satker Sekretariat Jenderal sebesar masing-masing Rp500.000.000,00 berupa instalasi air bersih dan instalasi air kotor, pada Lapas Yogyakarta sebesar Rp321.593.800,00 berupa Jalan Khusus lainnya, dan lain-lain;
- Pembelian sebesar Rp6.557.964.837,00 diantaranya terdapat pada Ditjen Imigrasi sebesar Rp3.755.859.731,00 berupa delapan unit Jaringan Telepon lainnya dan sebesar Rp10.549.000 berupa Jaringan Pipa Distribusi lainnya, pada Lapas Narkotika Samarinda sebesar Rp575.180.650,00 terdiri dari Rp196.113.500,00 berupa instalasi lain-lain, dan Rp379.067.150,00 berupa jaringan satelit dan jaringan radio, pada Lapas Serang sebesar Rp379.172.000,00 terdiri dari Rp256.577.000,00 berupa Jalan Khusus lainnya dan Rp122.595.000,00 berupa Saluran *Drainage*, pada BPSDM sebesar Rp272.200.000,00 terdiri dari Rp223.250.000,00 berupa instalasi gardu listrik distribusi kapasitas kecil dan Rp48.950.000,00 berupa instalasi lain-lain, pada satker Kanwil Jawa Timur sebesar Rp198.600.000,00 berupa jaringan listrik lainnya dan lain-lain;
- Transfer Masuk sebesar Rp4.675.399.891,00 diantaranya terdapat pada Cabang Rutan Bintuni Papua Barat sebesar Rp2.912.028.600,00 berupa jalan khusus kompleks, pada Lapas Anak Bandar Lampung sebesar Rp772.998.500,00 berupa bangunan pompa, saluran air, jaringan listrik dan instalasi lain-lain, pada Lapas Banyuasin Sumatera Selatan sebesar Rp280.853.000,00 berupa jaringan air minum dan jaringan listrik, pada Lapas Narkotika Pangkal Pinang sebesar Rp262.500.000,00, dan lain-lain;
- Penyelesaian Pembangunan dengan KDP sebesar Rp10.889.438.711,00 diantaranya terdapat pada Lapas Cilegon sebesar Rp5.403.093.000,00, pada Lapas Warungkiara Jawa Barat sebesar Rp1.841.539.100,00 berupa jalan khusus kompleks dan sumur gali, pada Rutan Pasangkayu Sulawesi Barat sebesar Rp890.388.371,00 berupa saluran pembuangan air, pada satker Kanwil Kalimantan Selatan sebesar Rp812.212.000,00 berupa saluran drainage, dan lain-lain;
- Reklasifikasi Masuk sebesar Rp5.086.414.712,00 diantaranya terdapat pada Lapas Narkotika Samarinda sebesar Rp4.335.659.000,00, satker Kanwil Bengkulu sebesar Rp279.798.712,00, Rutan Raha Sulawesi Tenggara sebesar Rp257.992.000,00, Bapas Jayapura sebesar Rp188.990.000,00, dan lain-lain;
- Pertukaran sebesar Rp23.653.000,00 terdapat pada satker Kanwil Yogyakarta berupa Jalan Khusus Kompleks;
- Penyelesaian Pembangunan Langsung sebesar Rp115.548.000,00 terdapat pada

LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2013 - AUDITED

Kanim Tangerang sebesar Rp81.765.000,00 berupa Bangunan Gorong-Gorong dan Lapas Palu sebesar Rp33.783.000,00 berupa Bak Penyimpanan/Tower Air;

- Pengembangan Nilai Aset sebesar Rp301.294.938,00 diantaranya terdapat pada Kanim Jakarta Timur sebesar Rp80.630.000,00, Kanim Cirebon sebesar Rp53.223.000,00, Kanim Kalianda Lampung sebesar Rp49.900.000,00, Kanim Yogyakarta sebesar Rp48.959.700,00, Lapas Wanita Semarang sebesar Rp27.966.658,00, dan lain-lain;
- Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas sebesar Rp2.464.253.893,00 terdapat pada Lapas Narkotika Samarinda sebesar Rp2.380.678.284,00 berupa saluran drainase dan pada Lapas Slawi Jawa Tengah sebesar Rp83.575.609,00 berupa jalan khusus kompleks;
- Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset sebesar 1.527.414.000,00 terdapat pada satker Sekretariat Jenderal yang terdiri dari Rp824.048.000,00 dan Rp703.366.000,00 yang masing-masing berupa instalasi air bersih dan instalasi air kotor;
- Perolehan Lainnya sebesar Rp811.801.857,00 diantaranya terdapat pada satker Kanwil Sumatera Selatan sebesar Rp530.718.857,00 berupa jalan khusus perorangan, Lapas Kembanguning Jawa Tengah sebesar Rp110.000.000,00 berupa instalasi air tanah kapasitas sedang, Kanim Cirebon sebesar Rp96.378.000,00 berupa instalasi gardu listrik induk kapasitas sedang, satker Kanwil Kalimantan Timur sebesar Rp41.855.000,00 berupa jaringan listrik lainnya, Lapas Narkotika Nusakambangan sebesar Rp32.100.000,00 berupa bangunan pengambilan dari sumber air dan Rutan Samarinda sebesar Rp750.000,00 berupa jaringan telepon lainnya; dan
- Pengembangan Melalui KDP sebesar Rp2.975.000.200,00 terdapat pada Lapas Cilegon yang terdiri dari Rp1.951.548.800,00 dan Rp1.023.451.400,00 masing-masing berupa jalan khusus lainnya dan saluran drainase.

Mutasi Kurang

- Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas berkurang sebesar Rp192.155.900,00 terdapat pada Rutan Prabumulih Sumatera Selatan sebesar Rp188.113.800,00 berupa bak penyimpanan/tower air baku dan satker Kanwil Jawa Timur sebesar Rp4.042.100,00 berupa jaringan listrik lainnya;
- Transfer Keluar sebesar Rp7.202.813.891,00 diantaranya terdapat pada satker Kanwil Papua Barat sebesar Rp2.912.028.600,00 berupa jalan khusus kompleks, satker Sekretariat Jenderal sebesar Rp2.527.414.000,00 berupa instalasi air kotor dan instalasi air bersih, satker Kanwil Lampung sebesar Rp996.355.500,00, satker Kanwil Sumatera Selatan sebesar Rp389.690.300,00 berupa jaringan listrik dan jaringan air minum, satker Kanwil Bangka Belitung sebesar Rp262.500.000,00 berupa jaringan listrik dan lain-lain;
- Reklasifikasi Keluar sebesar Rp2.659.948.150,00 diantaranya terdapat pada Lapas

LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2013 - AUDITED

Narkotika Samarinda sebesar Rp2.509.952.000,00, Lapas Lubuk Pakam sebesar Rp126.021.150,00, Lapas Narkotika Muara Beliti Sumatera Selatan sebesar Rp23.975.000,00,

- Koreksi Pencatatan sebesar Rp71.634.420,00 terdapat pada Lapas Terbuka Mataram berupa Jaringan Telepon Lainnya;
- Penghentian Aset dari Penggunaan sebesar Rp6.495.896,00 terdapat pada Lapas Kalianda Lampung sebesar Rp2.625.896,00, Kanim Nunukan Kalimantan Timur sebesar Rp2.370.000,00 dan Lapas Brebes sebesar Rp1.500.000,00; dan
- Transaksi Normalisasi BMN Aset Tetap berkurang sebesar Rp924.601.800,00 diantaranya terdapat pada satker Kanwil Gorontalo sebesar Rp514.047.000,00 berupa jalan khusus kompleks, Lapas Yogyakarta sebesar Rp321.593.800,00 berupa jalan khusus lainnya, Lapas Pemuda Tangerang sebesar Rp83.561.000,00 berupa jalan khusus lainnya, Rutan Wonogiri sebesar Rp5.400.000,00 berupa bak/menara penampungan.

C.2.5. Aset Tetap Lainnya

*Aset
Lainnya*

Tetap

Saldo Aset Tetap Lainnya Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia per 31 Desember 2013 sebesar Rp77.596.821.685,00 bila dibandingkan dengan per 31 Desember 2012 sebesar Rp44.614.453.012,00 terjadi kenaikan sebesar Rp32.982.368.673,00 atau naik 73,93%. Nilai akumulasi penyusutan aset tetap lainnya per 31 Desember 2013 sebesar Rp7.424.820.963,00 sehingga nilai buku peralatan dan mesin per 31 Desember 2013 sebesar Rp70.172.000.722,00. Termasuk sebagai aset tetap lainnya adalah aset tetap dalam renovasi.

Posisi perbandingan Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2013 dan 2012 sebagai berikut:

**Tabel 62. Nilai Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2013
pada Kanwil dan Unit Eselon I**

No	Kanwil/ Eselon I	31 Desember 2013 (Rp,00)	31 Desember 2012 (Rp,00)	Kenaikan / (Penurunan) (Rp,00)
1	DKI Jakarta	1.094.683.093	1.165.746.093	(71.063.000)
2	Jawa Barat	706.207.256	692.395.356	13.811.900
3	Jawa Tengah	3.571.808.832	3.330.837.772	240.971.060
4	Yogyakarta	498.078.622	385.217.222	112.861.400
5	Jawa Timur	2.482.499.512	1.690.964.992	791.534.520
6	Aceh	1.076.091.507	474.630.430	601.461.077
7	Sumatera Utara	864.215.812	666.464.709	197.751.103
8	Sumatera Barat	414.472.670	365.646.795	48.825.875
9	Riau	370.757.621	364.447.022	6.310.599
10	Jambi	594.432.089	254.981.858	339.450.231
11	Sumatera Selatan	313.624.947	271.786.627	41.838.320
12	Lampung	171.591.595	131.091.595	40.500.000
13	Kalimantan Barat	584.643.354	628.264.354	(43.621.000)
14	Kalimantan Tengah	167.613.035	157.613.035	10.000.000
15	Kalimantan Selatan	72.327.271	72.327.271	-
16	Kalimantan Timur	1.616.154.617	3.417.725.617	(1.801.571.000)

LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2013 - AUDITED

17	Sulawesi Utara	296.577.714	288.107.714	8.470.000
18	Sulawesi Tengah	166.777.324	161.777.324	5.000.000
19	Sulawesi Selatan	545.393.052	536.026.002	9.367.050
20	Sulawesi Tenggara	53.158.820	53.158.820	-
21	Maluku	856.913.387	874.013.887	(17.100.500)
22	Bali	362.753.275	344.289.575	18.463.700
23	Nusa Tenggara Barat	291.469.752	279.020.294	12.449.458
24	Nusa Tenggara Timur	1.176.278.422	187.120.022	989.158.400
25	Papua	1.764.420.103	1.744.685.113	19.734.990
26	Bengkulu	71.600.869	61.800.869	9.800.000
27	Maluku Utara	225.939.516	178.836.716	47.102.800
28	Banten	336.672.434	358.036.186	(21.363.752)
29	Bangka Belitung	118.878.199	115.893.199	2.985.000
30	Gorontalo	65.633.792	60.673.542	4.960.250
31	Kepulauan Riau	4.345.451.370	4.345.451.370	-
32	Papua Barat	112.466.148	107.466.148	5.000.000
33	Sulawesi Barat	78.959.746	79.559.746	(600.000)
34	Perwakilan Imigrasi di Luar Negeri	180.271.711	180.271.711	-
35	Setjen (Biro Umum & Pujianbang)	37.194.219.048	9.321.860.425	27.872.358.623
36	Inspektorat Jenderal	26.057.824	26.057.824	-
37	Ditjen Administrasi Hukum Umum	2.487.086.500	329.197.500	2.157.889.000
38	Ditjen Pemasyarakatan	179.846.831	181.389.056	(1.542.225)
39	Ditjen Imigrasi	5.324.533.929	4.623.527.929	701.006.000
40	Ditjen HKI	453.592.045	324.383.565	129.208.480
41	Ditjen PP	230.729.732	135.029.732	95.700.000
42	Ditjen HAM	287.811.800	225.761.800	62.050.000
43	BPHN	1.275.048.900	1.176.012.964	99.035.936
44	Balitbang HAM	2.168.671.151	1.924.496.773	244.174.378
45	BPSDM	2.320.406.458	2.320.406.458	-
Jumlah		77.596.821.685	44.614.453.012	32.982.368.673

Penambahan saldo Aset Tetap Lainnya sebesar Rp32.982.368.673,00 karena beberapa transaksi sebagai berikut:

Tabel 63. Rincian Mutasi Akun Aset Tetap Lainnya Per Jenis Transaksi Tahun 2013

Keterangan	Jumlah (Rp,00)
Saldo per 31 Desember 2012	44.614.453.012
A. Mutasi Tambah	
Penambahan saldo awal	180.766.360
Pembelian	32.126.194.643
Transfer Masuk	1.076.174.837
Hibah (Masuk)	964.074.600
Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	950.965.648
Reklasifikasi Masuk	192.857.310
Perolehan Lainnya	995.016.620
Penyelesaian Pembangunan Langsung	84.843.720
Pengembangan Nilai Aset	181.650.000
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas (+)	3.530.000
Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset (+)	90.993
Pengembangan Melalui KDP	666.252.000
Transaksi Normalisasi BMN Aset Tetap (+)	3.915.600

LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2013 - AUDITED

Jumlah Mutasi Tambah	37.426.332.331
B. Mutasi Kurang	
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas (-)	27.237.977
Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset (-)	3.239.000
Penghapusan	19.907.356
Transfer Keluar	717.597.026
Reklasifikasi Keluar	3.381.983.000
Koreksi Pencatatan	87.070.032
Penghentian aset dari penggunaan	149.678.267
Transaksi Normalisasi BMN Aset Tetap (-)	57.251.000
Jumlah Mutasi Kurang	4.443.963.658
Jumlah Mutasi	32.982.368.673
Saldo per 31 Desember 2013	77.596.821.685
Akumulasi Penyusutan	7.424.820.963
Nilai Buku per 31 Desember 2013	70.172.000.722

Penjelasan Transaksi:

Mutasi Tambah

- Penambahan Saldo Awal sebesar Rp180.766.360,00 diantaranya terdapat pada Lapas Siborong-borong Sumatera Utara sebesar Rp43.571.850,00 berupa monografi/buku, Rutan Tarutung Sumatera Utara sebesar Rp25.359.600,00 berupa monografi/buku Pusjianbang sebesar Rp9.432.000,00 berupa buku lainnya, Lapas Padang Sidempuan Sumatera Utara sebesar Rp6.512.250,00 berupa monografi/buku, Lapas Batu Jawa Tengah sebesar Rp6.139.200,00 berupa buku lainnya dan lain-lain;
- Pembelian sebesar Rp32.126.194.643,00 diantaranya terdapat pada satker Sekretariat Jenderal sebesar Rp27.724.335.800,00 berupa Gedung dan Bangunan dalam renovasi serta Jalan, Irigasi, Jaringan dalam renovasi, yang mana merupakan pengeluaran atas penambahan aset bukan milik satker sendiri, Ditjen AHU sebesar Rp2.059.189.000,00 berupa Gedung dan Bangunan dalam renovasi, Ditjen Imigrasi sebesar Rp870.440.000,00 berupa monografi/buku, maket foto dokumen serta alat musik modern/band, dan lain-lain;
- Transfer Masuk sebesar Rp1.076.174.837,00 diantaranya terdapat pada satker Kanwil Pekan Baru sebesar Rp349.777.000,00, Lapas Narkotika Muara Sabak Sumatera Selatan sebesar Rp311.557.522,00, satker Sekretariat Jenderal sebesar Rp175.260.800,00, Lapas Cilegon sebesar Rp82.200.000,00 berupa miniatur/replika; Lapas Anak Mataram sebesar Rp12.331.750,00 berupa monografi/buku, dan lain-lain;
- Hibah Masuk sebesar Rp964.074.600,00 diantaranya terdapat pada Lapas Anak Blitar sebesar Rp61.255.200,00, Lapas Madiun sebesar Rp60.590.800,00, Lapas Pamekasan Jawa Timur sebesar Rp60.580.400,00, Lapas Ngawi sebesar Rp60.566.600,00, Lapas Singaraja sebesar Rp60.491.600,00 berupa buku lainnya; Lapas Kuala Tungkal Jambi sebesar Rp5.760.000,00, dan lain-lain;

LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2013 - AUDITED

- Penyelesaian Pembangunan dengan KDP sebesar Rp950.965.648,00 diantaranya terdapat pada Kanim Sabang Aceh sebesar Rp601.188.648,00 dan Kanim Pekan Baru sebesar Rp349.777.000,00 masing-masing berupa Gedung dan Bangunan dalam renovasi;
- Perolehan Lainnya sebesar Rp995.016.620,00 diantaranya terdapat pada Lapas Atambua dan Lapas Wanita Kupang NTT masing-masing sebesar Rp471.028.000,00 berupa buku lainnya, Lapas Kalabahi sebesar Rp47.102.400,00, Kanim Cirebon sebesar Rp4.973.900,00 berupa buku lainnya, dan Lapas Madiun sebesar Rp884.320,00 berupa ukiran kayu dan sejenisnya;
- Pengembangan Nilai Aset sebesar Rp181.650.000,00 terdapat pada Ditjen AHU sebesar Rp98.700.000,00 berupa 2 unit Gedung dan Bangunan dalam renovasi dan pada Kanim Tanjung Redeb Kalimantan Timur sebesar Rp82.950.000,00 berupa Gedung dan Bangunan dalam renovasi;
- Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas bertambah sebesar Rp3.530.000,00 terdapat pada Lapas Lubuk Linggau Sumatera Selatan sebesar Rp2.430.000,00 dan Lapas Polewali Mandar Sulawesi Barat sebesar Rp1.100.000,00;
- Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset bertambah sebesar Rp90.993,00 terdapat pada Lapas Panyabungan Sumatera Utara berupa bahan kartografi lainnya;
- Pengembangan Melalui KDP sebesar Rp666.252.000,00 terdapat pada Kanim Tanjung Redeb Kalimantan Timur berupa Gedung dan Bangunan dalam renovasi; dan
- Transaksi Normalisasi BMN Aset Tetap bertambah sebesar Rp3.915.600,00 terdapat pada Kanim Denpasar berupa monografi/buku.

Mutasi Kurang

- Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas berkurang sebesar Rp27.237.977,00 terdapat pada satker Sekretariat Jenderal berupa koreksi atas nilai Gedung dan Bangunan dalam renovasi;
- Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset berkurang sebesar Rp3.239.000,00 terdapat pada Lapas Wanita Semarang berupa alat musik modern/band;
- Penghapusan sebesar Rp19.907.356,00 terdapat pada Lapas Sumbawa Besar NTB sebesar Rp18.365.131,00 berupa monografi/buku dan pada Ditjen Pemasarakatan sebesar Rp1.542.225,00 berupa alat musik modern/band;
- Transfer Keluar sebesar Rp717.597.026,00 diantaranya terdapat pada Kanim Pekanbaru sebesar Rp349.777.000,00, Ditjen Pemasarakatan sebesar Rp175.260.800,00, satker Kanwil Yogyakarta sebesar Rp97.998.900,00, satker Kanwil Banten sebesar Rp82.200.000,00, dan lain-lain;
- Reklasifikasi Keluar sebesar Rp3.381.983.000,00 diantaranya terdapat pada Lapas Narkotika Samarinda sebesar Rp2.535.918.000,00, satker Kanwil Pekanbaru sebesar

LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2013 - AUDITED

Rp349.777.000,00, Kanim Tasikmalaya sebesar Rp177.540.000,00 berupa monografi/buku; Ditjen HAM sebesar Rp43.000.000,00, dan lain-lain;

- Koreksi Pencatatan sebesar Rp87.070.032,00 diantaranya terdapat pada Lapas Terbuka Mataram sebesar Rp25.453.780,00 berupa koreksi atas alat musik modern/band, Lapas Batu Jawa Tengah sebesar Rp30.000.000,00 berupa sapi potong, Rutan Gianyar Bali sebesar Rp27.343.500,00 berupa monografi/buku, satker Kanwil Banten sebesar Rp4.164.752,00 berupa monografi/buku, dan Badan Pembinaan Hukum Nasional sebesar Rp108.000,00 berupa monografi/buku;
- Penghentian Aset dari Penggunaan sebesar Rp149.678.267,00 diantaranya terdapat pada Rupbasan Pekanbaru sebesar Rp48.709.000,00 berupa monografi/buku, Bapas Jakarta Pusat sebesar Rp27.450.000,00 berupa alat musik modern/band, Lapas Anak Pria Tangerang sebesar Rp25.000.000,00 berupa lukisan kanvas dan alat musik modern/band, Lapas Balikpapan sebesar Rp19.855.000,00 berupa alat musik modern/band, dan lain-lain;
- Transaksi Normalisasi BMN Aset Tetap berkurang sebesar Rp57.251.000,00 diantaranya terdapat pada Kanim Soekarno Hatta sebesar Rp46.473.000,00 berupa monografi/buku, Pujianbang sebesar Rp9.432.000,00 berupa buku lainnya dan Bapas Sumbawa Besar sebesar Rp1.346.000,00 berupa monografi/buku; dan

Pada tahun 2013 terdapat kejadian kebakaran pada satker-satker antara lain pada Lapas Tanjung Gusta Medan, Lapas Labuhan Ruku, Lapas Palopo Sulawesi Selatan, dan pada Februari 2014 di Lapas Lhokseumawe, aset tetap lainnya yang terbakar telah diinventarisir namun terhadap penghapusan barang dilakukan pada tahun 2014.

Konstruksi Dalam Pengerjaan C.2.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia per 31 Desember 2013 sebesar Rp513.912.932.922,00 bila dibandingkan dengan per 31 Desember 2012 sebesar Rp587.006.702.669,00 terjadi penurunan sebesar Rp73.093.769.747,00 atau turun 12,45% dari tahun 2012. Perbandingan Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2013 dengan periode sebelumnya per wilayah dan eselon I sebagai berikut:

Tabel 64. Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2013 Pada Kanwil dan Unit Eselon I

No	Kanwil/ Eselon I	31 Desember 2013 (Rp,00)	31 Desember 2012 (Rp,00)	Kenaikan / (Penurunan) (Rp,00)
1	DKI Jakarta	-	-	-
2	Jawa Barat	204.083.789.565	89.958.398.093	114.125.391.472
3	Jawa Tengah	19.238.839.864	19.238.839.864	-
4	Yogyakarta	3.487.877.500	3.487.877.500	-
5	Jawa Timur	30.975.012.297	17.518.197.697	13.456.814.600
6	Aceh	42.960.111.550	40.770.928.198	2.189.183.352
7	Sumatera Utara	32.536.940.774	9.076.339.774	23.460.601.000
8	Sumatera Barat	48.402.801.006	39.866.136.835	8.536.664.171
9	Riau	-	1.624.166.400	(1.624.166.400)

LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2013 - AUDITED

10	Jambi	9.558.871.199	26.820.398.571	(17.261.527.372)
11	Sumatera Selatan	-	-	-
12	Lampung	79.869.000	309.869.000	(230.000.000)
13	Kalimantan Barat	192.725.259	192.725.259	-
14	Kalimantan Tengah	12.256.861.243	55.102.715.689	(42.845.854.446)
15	Kalimantan Selatan	29.625.253.033	26.901.388.033	2.723.865.000
16	Kalimantan Timur	1.508.068.800	30.682.536.225	(29.174.467.425)
17	Sulawesi Utara	-	-	-
18	Sulawesi Tengah	-	12.196.575.765	(12.196.575.765)
19	Sulawesi Selatan	3.758.686.619	13.852.136.809	(10.093.450.190)
20	Sulawesi Tenggara	-	-	-
21	Maluku	-	-	-
22	Bali	22.000.010.450	16.921.889.510	5.078.120.940
23	Nusa Tenggara Barat	1.147.116.392	1.147.116.392	-
24	Nusa Tenggara Timur	772.823.800	-	772.823.800
25	Papua	5.800.331.237	2.018.982.275	3.781.348.962
26	Bengkulu	551.668.237	-	551.668.237
27	Maluku Utara	-	-	-
28	Banten	-	46.017.913.816	(46.017.913.816)
29	Bangka Belitung	-	-	-
30	Gorontalo	560.499.800	560.499.800	-
31	Kepulauan Riau	16.489.446.975	1.244.627.775	15.244.819.200
32	Papua Barat	1.643.863.300	1.643.863.300	-
33	Sulawesi Barat	-	3.830.846.000	(3.830.846.000)
34	Perwakilan Imigrasi di Luar Negeri	-	-	-
35	Setjen (Biro Umum & Pusjianbang)	26.281.465.022	88.764.680.589	(62.483.215.567)
36	Inspektorat Jenderal	-	-	-
37	Ditjen Administrasi Hukum Umum	-	-	-
38	Ditjen Pemasarakatan	-	-	-
39	Ditjen Imigrasi	-	37.257.053.500	(37.257.053.500)
40	Ditjen HKI	-	-	-
41	Ditjen PP	-	-	-
42	Ditjen HAM	-	-	-
43	BPHN	-	-	-
44	Balitbang HAM	-	-	-
45	BPSDM	-	-	-
	Jumlah	513.912.932.922	587.006.702.669	(73.093.769.747)

Penurunan saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp73.093.769.747,00 karena beberapa transaksi sebagai berikut:

Tabel 65. Rincian Mutasi Akun Konstruksi Dalam Pengerjaan Per Jenis Transaksi Tahun 2013

Keterangan	Jumlah (Rp,00)
Saldo per 31 Desember 2012	587.006.702.669
A. Mutasi Tambah	
Penambahan saldo awal	5.854.718.000
Perolehan KDP	27.541.891.700
Pengembangan KDP	268.036.350.263
Koreksi Nilai KDP (+)	3.594.130.100
Transfer Masuk KDP	242.797.780.046
Reklas KDP Menjadi Barang Jadi (+)	95.559.030
Jumlah Mutasi Tambah	547.920.429.139

LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2013 - AUDITED

B. Mutasi Kurang	
Koreksi Nilai KDP (-)	95.273.198
Penghapusan/Penghentian KDP	46.418.211.096
Transfer Keluar KDP	242.797.780.046
Reklas KDP Menjadi Barang Jadi (-)	331.702.934.546
Jumlah Mutasi Kurang	621.014.198.886
Jumlah Mutasi	(73.093.769.747)
Saldo per 31 Desember 2013	513.912.932.922
Akumulasi Penyusutan	-
Nilai Buku per 31 Desember 2013	513.912.932.922

Penjelasan Transaksi:

Mutasi Tambah

- Penambahan Saldo Awal sebesar Rp5.854.718.000,00 diantaranya terdapat pada satker Kanwil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Tengah sebesar Rp18.500.000,00, Kanim Tanjung Redeb Kalimantan Timur sebesar Rp424.809.300,00, Kanim Sambas Kalimantan Barat sebesar Rp560.531.700,00, Lapas Denpasar sebesar Rp577.772.000,00, dan Rupbasan Indramayu sebesar Rp2.012.517.100,00;
- Perolehan KDP sebesar Rp27.541.891.700,00 diantaranya terdapat pada Lapas Cilegon sebesar Rp2.380.081.800,00, Kanim Polonia sebesar Rp5.345.252.750,00, satker Kanwil Bali sebesar Rp953.636.200,00, Kanim Medan sebesar Rp817.000.000,00, Rutan Samarinda sebesar Rp703.199.500,00, Lapas Kotabumi Lampung sebesar Rp650.400.000,00, dan lain-lain;
- Pengembangan KDP sebesar Rp268.036.350.263,00 diantaranya terdapat pada satker Kanwil Sumatera Utara sebesar Rp16.972.216.800,00, Lapas Cilegon sebesar Rp10.388.069.200,00, Lapas Bekasi sebesar Rp4.983.373.585,00, Lapas Narkotika Pamekasan sebesar Rp8.783.599.100,00, satker Kanwil Sumatera Utara sebesar Rp4.243.054.200,00, dan lain-lain;
- Koreksi Nilai KDP bertambah sebesar Rp3.594.130.100,00 diantaranya terdapat pada Rupbasan Indramayu sebesar Rp2.012.517.100,00, Lapas Denpasar sebesar Rp577.772.000,00, Kanim Sambas Kalimantan Barat sebesar Rp560.531.700,00, satker Kanim Tanjung Redeb Kalimantan Timur sebesar Rp424.809.300,00, dan satker Kanwil Kalimantan Tengah sebesar Rp18.500.000,00;
- Transfer Masuk KDP sebesar Rp242.797.780.046,00 diantaranya terdapat pada satker Kanwil Jawa Barat sebesar Rp62.483.215.567,00, Lapas Gunung Sindur sebesar Rp31.319.307.969,00, Rutan Gunung Sindur sebesar Rp31.163.907.598,00, Lapas Bekasi sebesar Rp26.069.372.312,00, Lapas Anak Bandung sebesar Rp24.964.343.100,00, Lapas Narkotika Karang Intan Kalimantan Selatan sebesar Rp15.112.688.315,00, dan lain-lain; dan

LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2013 - AUDITED

- Reklas KDP menjadi Barang Jadi bertambah sebesar Rp95.559.030,00 terdapat pada Rutan Makasar.

Mutasi Kurang

- Koreksi Nilai KDP berkurang sebesar Rp95.273.198,00 terdapat pada Kanim Singaraja sebesar Rp 52.212.160,00, Rutan Surabaya sebesar Rp22.946.450,00, Lapas Abepura sebesar Rp16.304.588,00, dan Kanim Labuan Bajo NTT sebesar Rp3.810.000,00;
- Penghapusan/Penghentian KDP sebesar Rp46.418.211.096,00 terdapat pada satker Kanwil Kalimantan Tengah sebesar Rp42.740.654.446,00, Rupbasan Indramayu sebesar Rp1.460.697.100,00, Kanim Sambas Kalimantan Barat sebesar Rp683.063.150,00, Lapas Denpasar sebesar Rp680.736.400,00, dan Kanim Tasikmalaya sebesar Rp177.540.000,00;
- Transfer keluar KDP sebesar Rp242.797.780.046,00 diantaranya terdapat pada satker Kanwil Jawa Barat sebesar Rp88.552.587.879,00 dan satker Sekretariat Jenderal sebesar Rp31.319.307.969,00, Lapas Wanita Bandung sebesar Rp24.964.343.100,00, satker Kanwil Kalimantan Selatan sebesar Rp15.112.688.315,00, Lapas Serang sebesar Rp46.017.913.816,00, Rutan Tanjung Pura Sumatera Utara sebesar Rp5.036.699.774,00, satker Kanwil Gorontalo sebesar Rp560.499.800,00, dan satker Kanwil Jambi sebesar Rp69.831.795,00, dan
- Reklas KDP menjadi Barang Jadi berkurang sebesar Rp331.702.934.546,00 diantaranya terdapat pada Lapas Cilegon sebesar Rp66.032.651.616,00, Ditjen Imigrasi sebesar Rp37.257.053.500,00, satker Kanwil Kalimantan Timur sebesar Rp31.361.952.725,00, Lapas Palu sebesar Rp13.943.875.142,00, Rutan Pinrang Sulawesi Selatan sebesar Rp11.520.902.624,00, satker Kanwil Bengkulu sebesar Rp7.173.000.000,00, Kanim Ngurah Rai sebesar Rp6.490.633.000,00, dan lain-lain.

Akumulasi Penyusutan

C.2.7. Akumulasi Penyusutan

Pada tahun anggaran 2013, pemerintah memberlakukan akuntansi penyusutan bagi Aset BMN. Hal ini berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 4/KML.06/2013 tentang Perubahan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 53/KMK.06/2012 tentang Penerapan Penyusutan BMN Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Pelaksanaan penyusutan aset tetap berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara yang berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Saldo Akumulasi Penyusutan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia per 31 Desember 2013 adalah sebesar minus Rp3.871.595.364.317,00 sedangkan per 31 Desember 2012 sebesar Rp0,00 (NIHIL).

Tabel 66. Rincian Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2013

No	Uraian	Nilai Bruto (Rp,00)	Penyusutan (Rp,00)	Nilai Netto (Rp,00)
1	Peralatan Dan Mesin	3.026.289.712.192	1.846.849.675.041	1.179.440.037.151

LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2013 - AUDITED

2	Gedung Dan Bangunan	6.428.886.350.375	1.953.548.474.012	4.475.337.876.363
3	Jalan , Irigasi, dan Jaringan	187.832.116.877	63.772.394.301	124.059.722.576
4	Aset Tetap Lainnya	77.596.821.685	7.424.820.963	70.172.000.722
Jumlah		9.720.605.001.129	3.871.595.364.317	5.849.009.636.812

Piutang Jangka Panjang C.3. PIUTANG JANGKA PANJANG

C.3.1. Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Tagihan TP/TGR

Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian Negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya.

Saldo Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia per 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp1.065.108.739,00. Sedangkan periode 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp1.512.747.503,00 sehingga terjadi penurunan sebesar minus Rp447.638.764,00 atau turun minus 29,59%.

Tabel 67. Rincian Tagihan TP/TGR

No	Eselon I/Kanwil	Tagihan TP/TGR (Rp,00)	Keterangan
1.	Sekretariat Jenderal	75.012.424	Tagihan TGR atas nama Nuras Rp70.712.424,00; Budiman sisa TGR sebesar Rp4.300.000,00
2.	Ditjen AHU	16.090.125	Tagihan TP/TGR atas nama Dedy A Kusnandi sebesar Rp11.290.125,00; dan Fajar Ari Saputra sebesar Rp4.800.000,00.
3.	Ditjen Imigrasi	6.351.000	TP/TGR a/n Sahala Pasaribu pada satker Ditjen Imigrasi.
4.	BPHN	6.800.000	TP/TGR a/n Suhandha
5.	Jawa Barat	12.250.008	
6.	Jawa Timur	110.000.000	
7.	Sumatera Selatan	93.257.146	Tagihan TP/TGR a/n Kepala Divisi Imigrasi Kanwil Sumatera Selatan
8.	Kalimantan Barat	11.500.000	TP/TGR atas nama Marhaen Hary Prasetyo, mantan pegawai Kanim Entikong yang telah diberhentikan dengan tidak hormat pada bulan Januari 2013.
9.	NTT	116.425.000	TP/TGR a/n Servasius P. Suni Rp22.320.000,00 dan I Gusti Ngurah Kadek Susila Rp94.105.000,00.
10.	Papua	37.667.500	TP/TGR a/n Demianus Rumbiak pada satker Kanwil.
11.	Maluku Utara	443.535.990	TP/TGR atas nama Husen Sepa (dahulu Kabapas Ambon) saat ini Kabapas Ternate sebesar Rp44.326.750,00 dan a/n Aisyah Arsad, bendahara Kanim Ternate sebesar Rp399.209.240,00.
12.	Banten	38.595.000	
13.	Maluku	97.624.546	Koreksi atas temuan BPK 2013
Total		1.065.108.739	

Penyisihan Tagihan TP/TGR

C.3.2. Penyisihan Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Saldo Penyisihan Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) Tidak Tertagih Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia per 31 Desember 2013 adalah sebesar minus Rp89.696.707,00 sedangkan per 31 Desember 2012 adalah sebesar minus Rp77.474.849,00.

LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2013 - AUDITED

Tabel 68. Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Tagihan TP/TGR

No	Eselon I/Kanwil	TP/TGR (Rp,00)	Penyisihan TP/TGR (Rp)	Keterangan
1.	Sekretariat Jenderal	75.012.424	(73.303.724)	Tagihan TGR atas nama Nuras (Rp73.282.224,00), Budiman sisa TGR sebesar (Rp21.500,00).
2.	Ditjen AHU	16.090.125	(80.451)	Penyisihan tagihan TP/TGR atas nama Dedy A Kusnandi sebesar (Rp56.451,00); dan Fajar Ari Saputra sebesar (Rp24.000,00).
3.	Ditjen Imigrasi	6.351.000	(31.755)	TP/TGR a/n Sahala Pasaribu pada satker Ditjen Imigrasi.
4.	BPHN	6.800.000	(34.000)	Penyisihan TP/TGR a/n Suhanda.
5.	Jawa Barat	12.250.008	(61.250)	
6.	Jawa Timur	110.000.000	(550.000)	
7.	Sumatera Selatan	93.257.146	(466.286)	Penyisihan tagihan TP/TGR a/n Kepala Divisi Imigrasi Kanwil Sumatera Selatan.
8.	Kalimantan Barat	11.500.000	(11.500.000)	TP/TGR atas nama Marhaen Hary Prasetyo, mantan pegawai Kanim Entikong yang telah diberhentikan dengan tidak hormat pada bulan Januari 2013.
9.	NTT	116.425.000	(582.125)	Penyisihan TP/TGR a/n Servasius P. Suni (Rp 111.600,00) dan I Gusti Ngurah Kadek Susila (Rp470.525,00).
10.	Papua	37.667.500	(188.338)	TP/TGR a/n Demianus Rumbiak pada satker Kanwil.
11.	Maluku Utara	443.535.990	(2.217.680)	TP/TGR atas nama Husen Sepa (dahulu Kabapas Ambon) saat ini Kabapas Ternate sebesar (Rp221.634,00) dan a/n Aisyah Arsad, bendahara Kanim Ternate sebesar (Rp1.996.046,00).
12.	Banten	38.595.000	(192.975)	
13.	Maluku	97.624.546	(488.123)	Koreksi atas temuan pemeriksaan BPK 2013
Total		1.065.108.739	(89.696.707)	

C.3.3. Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (*Netto*)

Tagihan TP/TGR (*Netto*)

Saldo Penyisihan Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (*Netto*) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia per 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp975.412.032,00 sedangkan per 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp1.435.272.654,00. Terjadi penurunan sebesar minus Rp459.860.622,00 atau turun minus 32,04%.

Tabel 69. Rincian Tagihan TP/TGR (*Netto*)

No	Eselon I/Kanwil	TP/TGR (Rp,00)	Penyisihan TP/TGR (Rp,00)	TP/TGR (<i>Netto</i>) (Rp,00)	Keterangan
1.	Sekretariat Jenderal	75.012.424	(73.303.724)	1.708.700	Bagian lancar Tagihan TGR atas nama Nuras (Rp2.569.800,00), Budiman sisa TGR sebesar Rp4.278.500,00
2.	Ditjen AHU	16.090.125	(80.451)	16.009.674	Bagian lancar TP/TGR <i>Netto</i> atas nama Dedy A Kusnandi sebesar Rp11.233.674,00; dan Fajar Ari Saputra sebesar Rp4.776.000,00,.
3.	Ditjen Imigrasi	6.351.000	(31.755)	6.319.245	TP/TGR a/n Sahala Pasaribu pada satker Ditjen Imigrasi
4.	BPHN	6.800.000	(34.000)	6.766.000	Bagian lancar TP/TGR a/n Suhanda

LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2013 - AUDITED

5.	Jawa Barat	12.250.008	(61.250)	12.188.758	
6.	Jawa Timur	110.000.000	(550.000)	109.450.000	
7.	Sumatera Selatan	93.257.146	(466.286)	92.790.860	Bagian lancar TP/TGR a/n Kepala Divisi Imigrasi Kanwil Sumatera Selatan
8.	Kalimantan Barat	11.500.000	(11.500.000)	-	TP/TGR atas nama Marhaen Hary Prasetyo, mantan pegawai Kanim Entikong yang telah diberhentikan dengan tidak hormat pada bulan Januari 2013.
9.	NTT	116.425.000	(582.125)	115.842.875	Bagian lancar TP/TGR a/n Servasius P. Suni, Zony Ndapa, Ferizal, S.Sos, I Gusti Ngurah Kadek Susila.
10.	Papua	37.667.500	(188.338)	37.479.162	TP/TGR a/n Demianus Rumbiak pada satker Kanwil.
11.	Maluku Utara	443.535.990	(2.217.680)	441.318.310	Bagian lancar TP/TGR a.n Husen Sepa (dahulu Kabapas Ambon) saat ini Kabapas Ternate sebesar Rp44.105.116,00 dan a/n Aisyah Arsad, bendahara Kanim Ternate sebesar Rp397.213.194,00.
12.	Banten	38.595.000	(192.975)	38.402.025	
13.	Maluku	97.624.546	(488.123)	97.136.423	Koreksi atas temuan pemeriksaan BPK 2013
Total		1.065.108.739	(89.696.707)	975.412.032	

Piutang Jangka Panjang Lainnya

C.3.4. Piutang Jangka Panjang Lainnya (Brutto)

Saldo Piutang Jangka Panjang Lainnya (Brutto) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia per 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp17.340.500.000,00 sedangkan per 31 Desember 2012 adalah NIHIL atau Rp0.00. Saldo Piutang Jangka Panjang Lainnya sebesar Rp17.340.500.000,00 berasal dari pengakuan secara akrual atas piutang atas sewa tanah oleh PT Paramita Bangun yang belum dibayar terhitung untuk masa sewa mulai Bulan Januari 2015 s.d. Bulan Juni 2025.

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Panjang Lainnya

C.3.5. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Jangka Panjang Lainnya

Saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Jangka Panjang Lainnya Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia per 31 Desember 2013 adalah sebesar minus Rp86.702.500,00 sedangkan per 31 Desember 2012 adalah NIHIL atau Rp0.00.

Piutang Jangka Panjang Lainnya (Netto)

C.3.6. Piutang Jangka Panjang Lainnya (Netto)

Saldo Piutang Bukan Pajak (*Netto*) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia per 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp17.253.797.500,00 dan per 31 Desember 2012 sebesar Rp0,00. Jika dilihat dari saldo 2012, maka per 31 Desember 2013 terjadi peningkatan sebesar Rp17.253.797.500,00 atau naik 100%.

C.3.7. Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia per 31 Desember

LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2013 - AUDITED

Aset Tak Berwujud 2013 sebesar Rp333.848.538.055,00 bila dibandingkan dengan per 31 Desember 2012 sebesar Rp288.291.861.880,00 terjadi kenaikan sebesar Rp45.556.676.175,00 atau naik 15,80% dari tahun 2012.

**Tabel 70. Nilai Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2013
pada Kanwil dan Unit Eselon I**

No	Kanwil/Eselon I	31 Desember 2013 (Rp,00)	31 Desember 2012 (Rp,00)	Kenaikan / (Penurunan) (Rp,00)
1	DKI Jakarta	2.284.450.698	655.484.998	1.628.965.700
2	Jawa Barat	1.663.831.486	1.105.008.186	558.823.300
3	Jawa Tengah	461.134.651	367.413.151	93.721.500
4	Yogyakarta	87.032.501	85.692.301	1.340.200
5	Jawa Timur	1.473.371.400	1.303.743.175	169.628.225
6	Aceh	9.900.000	9.900.000	-
7	Sumatera Utara	105.496.776	96.572.050	8.924.726
8	Sumatera Barat	165.884.450	164.306.225	1.578.225
9	Riau	118.866.655	76.588.430	42.278.225
10	Jambi	17.305.775	17.305.775	-
11	Sumatera Selatan	42.143.275	42.143.275	-
12	Lampung	88.008.325	66.008.325	22.000.000
13	Kalimantan Barat	74.535.075	74.535.075	-
14	Kalimantan Tengah	7.365.050	7.365.050	-
15	Kalimantan Selatan	46.547.175	46.547.175	-
16	Kalimantan Timur	247.083.000	187.823.000	59.260.000
17	Sulawesi Utara	20.440.725	20.440.725	-
18	Sulawesi Tengah	9.940.725	9.940.725	-
19	Sulawesi Selatan	79.112.225	79.112.225	-
20	Sulawesi Tenggara	17.305.775	17.305.775	-
21	Maluku	-	-	-
22	Bali	93.922.175	29.822.175	64.100.000
23	Nusa Tenggara Barat	258.184.675	68.184.675	190.000.000
24	Nusa Tenggara Timur	40.158.518	35.609.000	4.549.518
25	Papua	17.800.000	17.800.000	-
26	Bengkulu	18.303.225	18.303.225	-
27	Maluku Utara	-	-	-
28	Banten	834.039.414	642.399.414	191.640.000
29	Bangka Belitung	57.357.550	7.365.050	49.992.500
30	Gorontalo	7.365.050	7.365.050	-
31	Kepulauan Riau	467.993.950	253.493.950	214.500.000
32	Papua Barat	950.000	-	950.000
33	Sulawesi Barat	-	-	-
34	Perwakilan Imigrasi di Luar Negeri	54.362.385	38.862.402	15.499.983
35	Setjen (Biro Umum & Pusjianbang)	1.171.526.400	878.156.400	293.370.000
36	Inspektorat Jenderal	893.937.000	893.937.000	-
37	Ditjen Administrasi Hukum Umum	11.945.673.862	10.024.122.962	1.921.550.900
38	Ditjen Pemasarakatan	1.353.400.410	1.166.565.410	186.835.000
39	Ditjen Imigrasi	299.351.004.453	259.923.070.494	39.427.933.959
40	Ditjen HKI	9.820.025.832	9.463.790.832	356.235.000
41	Ditjen PP	129.498.500	129.498.500	-
42	Ditjen HAM	171.955.200	171.955.200	-
43	BPHN	25.905.000	-	25.905.000
44	Balitbang HAM	64.825.214	37.731.000	27.094.214
45	BPSDM	50.593.500	50.593.500	-
	JUMLAH	333.848.538.055	288.291.861.880	45.556.676.175

LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2013 - AUDITED

Penambahan saldo Aset Tak Berwujud sebesar Rp45.556.676.175,00 karena beberapa transaksi sebagai berikut:

Tabel 71. Rincian Mutasi Akun Aset Tak Berwujud Per Jenis Transaksi Tahun 2013

Keterangan	Jumlah (Rp,00)
Saldo per 31 Desember 2012	288.291.861.880
A. Mutasi Tambah	
Penambahan saldo awal	19.992.500
Pembelian	41.354.719.025
Transfer Masuk	11.329.875
Hibah (Masuk)	6.595.200
Reklasifikasi Masuk	48.005.000
Perolehan Lainnya	130.500.000
Pengembangan Nilai Aset	3.930.671.163
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas (+)	286.079.200
Jumlah Mutasi Tambah	45.787.891.963
B. Mutasi Kurang	
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas (-)	175.020.588
Transfer Keluar	6.595.200
Penghentian aset dari penggunaan	49.600.000
Jumlah Mutasi Kurang	231.215.788
Jumlah Mutasi	45.556.676.175
Saldo per 31 Desember 2013	333.848.538.055
Akumulasi Penyusutan	-
Nilai Buku per 31 Desember 2013	333.848.538.055

Penjelasan Transaksi:

Mutasi Tambah

- Penambahan Saldo Awal sebesar Rp19.992.500,00 yang terdapat pada Kanim Pangkal Pinang;
- Pembelian sebesar Rp41.354.719.025,00 diantaranya terdapat pada Ditjen Imigrasi sebesar Rp37.176.255.084,00, Kanim Jakarta Barat sebesar Rp942.305.500,00, Ditjen HKI sebesar Rp356.235.000,00, Kanim Jakarta Selatan sebesar Rp302.335.000,00, satker Sekretariat Jenderal sebesar Rp293.370.000,00;
- Transfer Masuk sebesar Rp11.329.875,00, diantaranya terdapat pada Lapas Cipinang sebesar Rp6.595.200,00, Rutan Siak Sri Indrapura Riau sebesar Rp1.578.225,00, Lapas Bukit Tinggi sebesar Rp1.578.225,00, Lapas Trenggalek Jawa Timur sebesar Rp1.578.225,00;
- Hibah Masuk sebesar Rp6.595.200,00, terdapat pada Ditjen Pemasarakatan;
- Reklasifikasi Masuk sebesar Rp48.005.000,00 diantaranya terdapat pada Ditjen HAM sebesar Rp43.000.000,00 dan Kanim Depok sebesar Rp5.005.000,00;
- Perolehan Lainnya sebesar Rp130.500.000,00 terdapat pada kanim Cirebon;
- Pengembangan Nilai Aset sebesar Rp3.930.671.163,00 diantaranya terdapat pada

LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2013 - AUDITED

Ditjen Imigrasi sebesar Rp2.140.620.263,00 dan Ditjen AHU sebesar Rp1.790.050.900,00, dan

- Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas bertambah sebesar Rp286.079.200,00 terdapat pada Ditjen Imigrasi.

Mutasi Kurang

- Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas berkurang sebesar Rp175.020.588,00 terdapat pada Ditjen Imigrasi;
- Transfer Keluar sebesar Rp6.595.200,00 terdapat pada Ditjen Pemasarakatan; dan
- Penghentian Aset dari Penggunaan sebesar Rp49.600.000,00 diantaranya terdapat pada Ditjen HAM sebesar Rp43.000.000,00 dan Kanim Jakarta Utara sebesar Rp6.600.000,00.

Aset Lain-lain

C.3.8. Aset Lain-lain

Aset Lain-lain Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia per 31 Desember 2013 terdiri dari Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Saldo Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia per 31 Desember 2013 sebesar Rp84.276.630.562,00 bila dibandingkan dengan per 31 Desember 2012 sebesar Rp64.318.557.468,00 terjadi kenaikan sebesar Rp19.958.073.094,00 atau naik 31,03% dari tahun 2012. Nilai akumulasi penyusutan aset lain-lain per 31 Desember 2013 sebesar Rp70.752.067.429,00 sehingga nilai aset lain-lain per 31 Desember 2013 sebesar Rp13.524.563.133,00.

**Tabel 72. Nilai Aset Lain-Lain per 31 Desember 2013
pada Kanwil dan Unit Eselon I**

No	Kanwil/Eselon I	31 Desember 2013 (Rp,00)	31 Desember 2012 (Rp,00)	Kenaikan / (Penurunan) (Rp,00)
1	DKI Jakarta	5.141.783.284	5.355.118.023	(213.334.739)
2	Jawa Barat	5.209.606.813	4.492.912.551	716.694.262
3	Jawa Tengah	6.548.383.114	4.076.542.091	2.471.841.023
4	Yogyakarta	2.173.448.094	1.941.582.265	231.865.829
5	Jawa Timur	4.329.322.554	3.573.545.339	755.777.215
6	Aceh	3.108.928.265	1.886.110.385	1.222.817.880
7	Sumatera Utara	1.921.359.406	3.224.235.880	(1.302.876.474)
8	Sumatera Barat	1.948.010.362	941.356.462	1.006.653.900
9	Riau	924.915.622	966.825.653	(41.910.031)
10	Jambi	1.196.563.240	936.504.181	260.059.059
11	Sumatera Selatan	1.020.614.704	620.803.334	399.811.370
12	Lampung	1.466.845.619	1.014.651.461	452.194.158
13	Kalimantan Barat	1.312.059.377	1.769.498.087	(457.438.710)
14	Kalimantan Tengah	727.085.409	297.818.713	429.266.696
15	Kalimantan Selatan	810.113.583	637.854.404	172.259.179
16	Kalimantan Timur	1.258.090.419	612.850.394	645.240.025
17	Sulawesi Utara	1.049.424.263	282.035.250	767.389.013

LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2013 - AUDITED

18	Sulawesi Tengah	6.356.695.572	6.356.695.572	-
19	Sulawesi Selatan	4.828.963.532	4.476.139.122	352.824.410
20	Sulawesi Tenggara	687.602.831	714.975.175	(27.372.344)
21	Maluku	432.623.657	259.678.000	172.945.657
22	Bali	710.987.715	2.528.785.565	(1.817.797.850)
23	Nusa Tenggara Barat	1.750.045.061	375.196.791	1.374.848.270
24	Nusa Tenggara Timur	2.507.255.033	1.949.150.351	558.104.682
25	Papua	2.793.337.702	4.953.091.488	(2.159.753.786)
26	Bengkulu	751.288.662	484.674.000	266.614.662
27	Maluku Utara	1.190.309.882	616.967	1.189.692.915
28	Banten	828.187.130	246.913.008	581.274.122
29	Bangka Belitung	735.519.749	322.553.883	412.965.866
30	Gorontalo	48.250.000	48.250.000	-
31	Kepulauan Riau	3.359.348.045	2.237.330.845	1.122.017.200
32	Papua Barat	558.834.124	555.084.124	3.750.000
33	Sulawesi Barat	684.725.836	316.130.700	368.595.136
34	Perwakilan Imigrasi di Luar Negeri	498.439.716	-	498.439.716
35	Setjen (Biro Umum & Pusjianbang)	718.000	-	718.000
36	Inspektorat Jenderal	-	168.348.000	(168.348.000)
37	Ditjen Administrasi Hukum Umum	11.377.610.879	550.538.309	10.827.072.570
38	Ditjen Pemasarakatan	345.271.258	513.946.888	(168.675.630)
39	Ditjen Imigrasi	146.908.000	146.908.000	-
40	Ditjen HKI	1.305.630.000	1.305.406.000	224.000
41	Ditjen PP	607.906.000	607.906.000	-
42	Ditjen HAM	246.867.000	636.689.750	(389.822.750)
43	BPHN	338.876.000	1.076.604.771	(737.728.771)
44	Balitbang HAM	-	-	-
45	BPSDM	1.037.875.050	856.699.686	181.175.364
	Jumlah	84.276.630.562	64.318.557.468	19.958.073.094

Penambahan saldo Aset Lain-Lain sebesar Rp19.958.073.094,00 karena beberapa transaksi sebagai berikut:

Tabel 73. Rincian Mutasi Saldo Aset Lain-Lain Per Jenis Transaksi Tahun 2013

Keterangan	Jumlah (Rp,00)
Saldo per 31 Desember 2012	64.318.557.468
A. Mutasi Tambah	
Reklas dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	46.577.521.164
Transaksi Normalisasi BMN (BMN Yang Dihentikan)	80.927.216
Penghapusan (BMN Yang Dihentikan)	2.457.000
Jumlah Mutasi Tambah	46.660.905.380
B. Mutasi Kurang	
Transaksi Normalisasi BMN (BMN Yang Dihentikan)	2.016.291.901
Penghapusan (BMN Yang Dihentikan)	14.211.622.340
Transfer Keluar (BMN Yang Dihentikan)	33.242.000
Reklasifikasi Keluar (BMN Yang Dihentikan)	139.625.971
Koreksi Pencatatan (BMN Yang Dihentikan)	103.757.500
Usulan Barang Rusak Berat ke Pengelola (BMN Yang Dihentikan)	7.510.853.205
Usulan Barang Hilang ke Pengelola (BMN Yang Dihentikan)	14.900.000

LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2013 - AUDITED

Penggunaan Kembali BMN Yang Sudah Dihentikan	2.672.539.369
Jumlah Mutasi Kurang	26.702.832.286
Jumlah Mutasi	19.958.073.094
Saldo per 31 Desember 2013	84.276.630.562
Akumulasi Penyusutan	70.752.067.429
Nilai Buku per 31 Desember 2013	13.524.563.133

Penjelasan Transaksi:

Mutasi Tambah

- Reklas dari Aset Tetap ke Aset Lainnya sebesar Rp46.577.521.164,00 diantaranya terdapat pada Ditjen AHU sebesar Rp3.745.164.000,00 berupa *Fire Alarm System* dan sebesar Rp3.624.519.000,00 berupa *Concrete Lift*, Lapas Denpasar sebesar Rp800.000.000,00 berupa Alat Detektor Barang Terlarang/*X Ray*, Kanim Nunukan Kalimantan Timur sebesar Rp520.542.800,00 berupa Bangunan Gedung Kantor Permanen, dan lain-lain;
- Transaksi Normalisasi BMN (BMN Yang Dihentikan) sebesar Rp80.927.216,00 diantaranya terdapat pada satker Lapas Terbuka Jakarta sebesar Rp26.715.000,00 berupa PC Unit, Rp19.037.294 berupa *Dental Hand Instruments Set*, Rp4.307.000,00 berupa *Suction Pump*, dan Rp2.021.000,00 berupa *Diagnostik Set*, Lapas Kota Agung Lampung sebesar Rp2.176.000,00 berupa Printer dan lain-lain; dan
- Penghapusan (BMN Yang Dihentikan) sebesar Rp2.457.000,00 diantaranya terdapat pada Ditjen Pemasarakatan sebesar Rp1.580.000,00 berupa *Filling Cabinet* Besi dan sebesar Rp877.000,00 berupa Lemari Besi/Metal.

Mutasi Kurang

- Transaksi Normalisasi BMN (BMN Yang Dihentikan) sebesar Rp2.016.291.901,00 diantaranya terdapat pada Lapas Wamena sebesar Rp781.796.276,00 berupa Bangunan Gedung Lapas, Kanim Jakarta Pusat sebesar Rp83.124.000,00 berupa Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah), Lapas Kota Agung Lampung sebesar Rp35.000.500,00 berupa Mobil Unit Tahanan, Kanim Bengkulu sebesar Rp26.944.000,00 berupa P.C Unit, Kanim Dumai Riau sebesar Rp16.518.000,00 berupa Brankas, dan lain-lain;
- Penghapusan (BMN Yang Dihentikan) sebesar Rp14.211.622.340,00 diantaranya terdapat pada Lapas Abepura Papua sebesar Rp810.800.000,00 berupa Bangunan Gedung Kantor Permanen, sebesar Rp202.600.000,00 berupa Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen, Kanim Sanggau sebesar Rp352.900.000,00 berupa Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah), Ditjen AHU sebesar Rp196.020.000,00 berupa *Stationary Water Pump*, Ditjen HAM sebesar Rp195.484.000,00 berupa *Gordin/Kray*, dan lain-lain;
- Transfer Keluar (BMN yang dihentikan) sebesar Rp33.242.000,00 diantaranya

LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2013 - AUDITED

terdapat pada satker Lapas Kota Agung sebesar Rp29.738.000,00 berupa Asrama Permanen dan Kanim Bogor sebesar Rp3.504.000,00 berupa Meja Kerja Kayu;

- Reklasifikasi Keluar (BMN yang dihentikan) sebesar Rp139.625.971,00 diantaranya terdapat pada Rutan Wonosobo sebesar Rp19.898.000,00 berupa Alat Khusus Keamanan Lainnya, sebesar Rp2.414.000,00 berupa *Camera Electronic*, sebesar Rp1.260.000,00 berupa *Vacuum Cleaner*, Lapas Pekanbaru sebesar Rp95.448.000,00 berupa Mobil *Ambulance*, Lapas Brebes sebesar Rp3.142.971,00 berupa *Stationary Generating Set*, dan lain-lain;
- Koreksi Pencatatan (BMN yang dihentikan) sebesar Rp103.757.500,00 diantaranya terdapat pada Lapas Gorontalo sebesar Rp45.000.000,00 berupa Rumah Negara Golongan III Tipe D Permanen, Kanim Tanjung Balai Karimun sebesar Rp31.334.000,00 berupa *Station Wagon*, Rutan Kefamenanu NTT sebesar Rp22.423.500,00 berupa Senapan Semi Otomatis, sebesar Rp5.000.000,00 berupa Pistol, dan lain-lain;
- Usulan Barang Rusak Berat ke Pengelola (BMN Yang Dihentikan) sebesar Rp7.510.853.205,00 diantaranya terdapat pada Lapas Denpasar sebesar Rp800.000.000,00 berupa Alat Detektor Barang Terlarang/*X Ray*, Rp187.000.000,00 berupa CCTV, sebesar Rp70.235.000,00 berupa Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor Lainnya, Kanim Nunukan sebesar Rp868.280.629,00 berupa Bangunan Gedung Kantor Permanen, sebesar Rp177.417.260,00 berupa Gedung Tahanan Karantina, dan lain-lain;
- Usulan Barang Hilang ke Pengelola (BMN Yang Dihentikan) sebesar Rp14.900.000,00 terdapat pada satker Kanim Tangerang berupa satu unit Sepeda Motor; dan
- Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan sebesar Rp2.672.539.369,00 diantaranya terdapat pada Lapas Gunung Sitoli sebesar Rp998.710.000,00 berupa Bangunan Gedung Lapas, Kanim Merauke sebesar Rp602.872.000,00 berupa Gedung Pos Jaga Permanen, Lapas Pekanbaru sebesar Rp162.305.000,00 berupa *Gastro Instestinal Set*, Rutan Kendari sebesar Rp136.400.000,00 berupa Genset, Akademi Ilmu Pemasarakatan sebesar Rp107.707.000,00 berupa Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah), dan lain-lain.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menguasai aset bersejarah sebanyak 18 unit dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 74. Daftar Aset Bersejarah

No	Jenis	Jumlah
1	Tugu Peringatan Prasasti	1 unit
2	Alat Kantor	1 unit
3	Alat Rumah Tangga	3 unit
4	Eksakta	13 unit

LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2013 - AUDITED

Akumulasi Penyusutan Lainnya

C.3.9. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

Aset Pada tahun anggaran 2013, pemerintah memberlakukan akuntansi penyusutan bagi Aset BMN. Hal ini berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 4/KML.06/2013 tentang Perubahan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 53/KMK.06/2012 tentang Penerapan Penyusutan BMN Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Pelaksanaan penyusutan aset tetap berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara yang berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Saldo Akumulasi Penyusutan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia per 31 Desember 2013 adalah sebesar minus Rp70.752.067.429,00 sedangkan per 31 Desember 2012 sebesar Rp0,00 (NIHIL).

Tabel 75. Perbandingan Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2013 dan 2012

Akun	Per 31 Desember 2013 (Rp,00)	Per 31 Desember 2012 (Rp,00)	Kenaikan / (penurunan) (Rp,00)	%
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	70.752.067.429	-	70.752.067.429	-

Kewajiban

C.4. KEWAJIBAN

Utang Kepada Pihak Ketiga

C.4.1 Utang Kepada Pihak Ketiga

Utang kepada Pihak Ketiga merupakan utang yang timbul akibat adanya operasional kegiatan satker di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dimana haknya sudah diterima Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tetapi belum dilakukan pembayaran sampai dengan tanggal Neraca. Saldo Utang Kepada Pihak Ketiga Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia per 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp53.078.687.737,00. Sedangkan periode 31 Desember 2012 sebesar Rp53.795.140.417,00 atau menurun sebesar minus Rp716.452.680,00 atau turun minus 1,33% dari tahun 2012. Rincian utang kepada pihak ketiga berdasarkan unit Eselon I dan Kanwil disajikan sebagai berikut:

Tabel 76. Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga Berdasarkan Unit Eselon I dan Kanwil

No	Eselon I/Kanwil	Saldo (Rp,00)
1	Sekretariat Jenderal	1.870.019.045
2	Inspektorat Jenderal	7.316.196
3	Ditjen AHU	269.444.665
4	Ditjen PAS	4.382.298
5	Ditjen HKI	1.839.001
6	BPHN	2.651.688.000
7	B P S D M	1.534.320
8	DKI Jakarta	3.840.798.826
9	Jawa Barat	331.416.835
10	Jawa Tengah	5.631.437.500
11	Yogyakarta	21.591.110
12	Jawa Timur	4.123.466.540
13	Aceh	5.030.171.302
14	Sumatera Utara	3.082.623.110
15	Sumatera Barat	229.362.094
16	Riau	1.714.280.009

LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2013 - AUDITED

17	Jambi	427.613.735
18	Sumatera Selatan	1.478.231.066
19	Lampung	2.321.734.423
20	Kalimantan Barat	466.330.527
21	Kalimantan Tengah	980.781.411
22	Kalimantan Selatan	4.012.668.596
23	Kalimantan Timur	1.498.754.018
24	Sulawesi Utara	1.276.079.506
25	Sulawesi Tengah	808.172.092
26	Sulawesi Selatan	2.069.164.014
27	Sulawesi Tenggara	602.873.104
28	Maluku	294.710.532
29	Bali	597.450.426
30	NTB	34.568.249
31	NTT	1.372.556.447
32	Papua	1.110.126.563
33	Bengkulu	281.577.861
34	Maluku Utara	468.010.859
35	Banten	2.124.432.573
36	Bangka Belitung	1.211.856.199
37	Gorontalo	373.987.556
38	Kepulauan Riau	388.481.306
39	Papua Barat	3.736.300
40	Sulawesi Barat	63.419.523
	Jumlah	53.078.687.737

Rincian utang kepada pihak ketiga per jenis utang disajikan sebagai berikut:

Tabel 77. Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga per Jenis

No	Uraian Jenis Utang	Nilai (Rp,00)
1	Bahan Makanan (Bama)	14.851.792.794
2	Beras	22.353.799.182
3	Langganan Daya dan Jasa	5.415.569.920
4	Pegawai dan Lain-Lain	10.457.525.841
	Jumlah	53.078.687.737

Pendapatan Diterima Dimuka

C.4.2. Pendapatan Diterima Dimuka

Saldo Pendapatan diterima dimuka Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia per 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp63.865.505.500,00. Sedangkan per 31 Desember 2012 saldo Pendapatan diterima dimuka sebesar Rp0,00. Saldo Pendapatan diterima dimuka per 31 Desember 2013 sebesar Rp63.865.505.500,00 merupakan:

Tabel 78. Rincian Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2013

No	Satker	Saldo (Rp)	Keterangan
1.	Rupbasan Pangkal Pinang	7.990.000	Sewa aset untuk warung pecel lele dan bakso
2.	Lapas Balikpapan	132.500.000	Sewa aset untuk penempatan tower
3.	Kanim Jakarta Selatan	119.899.999	Koreksi atas pemanfaatan aset
4.	Ditjen AHU	20.015.644.500	Menerbitkan BT/TBN dari pengajuan nama perseroan
5.	Ditjen HKI	42.729.867.500	Pembayaran pemeliharaan Paten
		169.599.597	Sewa lahan untuk operasional kantor bank dan ATM BRI
6.	Setjen	321.180.118	Sewa atas pemanfaatan lahan untuk operasional kantor Bank BNI'46
		102.423.786	Sewa atas pemanfaatan lahan untuk

LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2013 - AUDITED

		operasional	pewaralaba	Double	Dibs
			Coffee		
		266.400.000	Sewa lahan oleh Koperasi Pengayoman di Cikokol Tangerang		
Jumlah		63.865.505.500			

Uang Muka Dari KPPN

C.4.3. Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka KPPN Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia per 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp2.137.424.659,00. Sedangkan saldo per 31 Desember 2012 sebesar Rp4.905.638.455,00 atau menurun sebesar minus Rp2.768.213.796,00 atau turun minus 56,43% dari tahun 2012. Uang Muka dari KPPN merupakan UP/TUP yang masih berada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Uang muka KPPN merupakan kontra akun Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp2.137.424.659,00.

Pendapatan Yang Ditangguhkan

C.4.4. Pendapatan Yang Ditangguhkan

Pendapatan yang ditangguhkan merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang belum disetorkan ke Kas Negara pada tanggal pelaporan. Saldo Pendapatan Yang Ditangguhkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia per 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp6.223.207.404,00, sedangkan per 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp11.790.073.012,00 menurun sebesar minus Rp5.566.865.608,00 atau turun minus 47,22% dari tahun 2012. Saldo Pendapatan Yang Ditangguhkan periode 31 Desember 2013 sebesar Rp6.223.207.404,00 merupakan rincian dari akun Kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp5.739.408.169,00 dan Kas Lainnya Setara Kas sebesar Rp491.686.819,00.

EKUITAS

Ekuitas Dana Lancar Cadangan Piutang

C.5. Ekuitas Dana Lancar

C.5.1. Cadangan Piutang

Saldo Cadangan Piutang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia periode 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp184.623.775.611,00. Sedangkan periode 31 Desember 2012 sebesar Rp25.005.268.366,00. Meningkat sebesar Rp159.618.507.245,00 atau naik 638,34% dari tahun 2012. Cadangan piutang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ini merupakan jumlah ekuitas dana lancar dalam bentuk piutang setelah dikurangi dengan penyisihan piutang tak tertagih. Saldo Cadangan Piutang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia periode 31 Desember 2013 sebesar Rp184.623.775.611,00 merupakan kontra akun dari:

Tabel 79. Rincian Cadangan Piutang per 31 Desember 2013

No	Uraian	Jumlah (Rp0,00)
1	Piutang Bukan Pajak (netto)	184.243.575.469
2	Bagian Lancar TP/TGR (netto)	380.200.142
Total		184. 623.775.611

LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2013 - AUDITED

Cadangan Persediaan

C.5.2. Cadangan Persediaan

Saldo Cadangan Persediaan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia periode 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp426.696.399.246,00. Sedangkan periode 31 Desember 2012 sebesar Rp324.101.005.634,00. Meningkatkan sebesar Rp102.595.393.612,00 atau naik 31,66% dari tahun 2012. Cadangan persediaan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia merupakan jumlah ekuitas dana lancar dalam bentuk persediaan.

Dana Yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jk Pendek

C.5.3. Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek

Saldo Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia periode 31 Desember 2013 adalah sebesar minus Rp52.785.095.244,00. Sedangkan periode 31 Desember 2012 sebesar minus Rp53.001.421.876,00. Akun tersebut merupakan bagian dari ekuitas dana yang disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek.

Ekuitas Dana Lancar Lainnya

C.5.4. Ekuitas Dana Lancar Lainnya

Saldo Dana Lancar Lainnya Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia periode per 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp9.532.358.282,00. Sedangkan periode 31 Desember 2012 sebesar Rp13.638.206.727,00 menurun sebesar minus Rp4.105.848.445,00 atau turun minus 30,11% dari tahun 2012.

Brg/Jasa Yang Masih Harus Diterima

C.5.5. Barang/Jasa Yang Masih Harus Diterima

Barang/Jasa Yang Masih Harus Diterima merupakan pengakuan kewajiban oleh pihak ketiga kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia akibat dari belanja yang sudah direalisasikan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sementara barang/jasa belum diterima. Saldo Barang/Jasa Yang Masih Harus Diterima Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia periode per 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp10.840.825.002,00. Sedangkan periode 31 Desember 2012 sebesar Rp0,00. Saldo Barang/Jasa yang masih harus diterima per 31 Desember 2013 sebesar Rp10.840.825.002,00 adalah kontra akun belanja dibayar dimuka sebesar Rp10.840.825.002,00, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 80. Rincian Barang dan Jasa yang Masih Harus Diterima
per 31 Desember 2013**

No	Satker	Jumlah (Rp0,00)	Uraian
1	Ditjen AHU	521.842.449	Sewa <i>Bandwith</i>
2	Lapas Wamena	150.000	Bayar Listrik PLN
3	Kanim Jakarta Utara	9.408.967.482	Sewa ruko
4	Kanim Jakarta Selatan	75.135.677	Sewa ruko
		834.729.394	Sewa kendaraan dinas
Total		10.840.825.002	

Brg/Jasa Yang Masih Harus Diserahkan

C.5.6. Barang/Jasa Yang Masih Harus Diserahkan

Barang/Jasa Yang Harus Diserahkan merupakan pengakuan kewajiban atas pendapatan yang sudah diterima oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia namun barang/jasa belum diserahkan kepada pemohon pelayanan.

LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2013 - AUDITED

Saldo Barang/Jasa Yang Masih Harus Diserahkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia periode per 31 Desember 2013 adalah sebesar minus Rp63.865.505.500,00. Sedangkan periode 31 Desember 2012 sebesar Rp0,00. Saldo Barang/Jasa yang masih harus diserahkan per 31 Desember 2013 sebesar minus Rp63.865.505.500,00 adalah kontra akun dari pendapatan diterima dimuka sebesar Rp63.865.505.500,00.

Ekuitas Dana Investasi

C.6. Ekuitas Dana Investasi

Diinvestasikan Dalam Aset Tetap

C.6.1. Diinvestasikan Dalam Aset Tetap

Saldo Dana Diinvestasikan dalam Aset Tetap Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia periode 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp18.725.036.167.992,00. Sedangkan periode 31 Desember 2012 sebesar Rp20.619.401.370.243,00. Menurun sebesar minus Rp1.894.365.202.251,00 atau turun minus 9,19% dari tahun 2012. Akun ini merupakan jumlah ekuitas dana yang diinvestasikan dalam bentuk Aset Tetap.

Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya

C.6.2. Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya

Saldo Dana Diinvestasikan dalam Aset Lainnya Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia periode 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp365.602.310.720,00. Sedangkan periode 31 Desember 2012 sebesar Rp354.045.692.002,00. Meningkatkan sebesar Rp11.556.612.973,00 atau naik 3,26% dari tahun 2012. Akun ini merupakan jumlah ekuitas dana yang diinvestasikan oleh pemerintah pusat dalam bentuk Aset Lainnya dan Piutang Jangka Panjang.

Pengungkapan Penting Lainnya

D. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA

D.1. Kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca

a. Bencana Banjir di Manado

Pada hari Selasa Tanggal 14 Januari 2014 s.d 15 Januari 2014 di daerah Sulawesi Utara, khususnya Daerah Minahasa (Tondano dan Tomohon) Manado, terjadi curah hujan yang cukup tinggi, lalu pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2014 sekitar jam 09.00 WITA mulai terjadi peningkatan arus sungai yang terdapat di Kota Manado dan sekitar jam 10.00 WITA merupakan puncak terjadinya banjir akibat kiriman dari Tondano dan Tomohon ditambah lagi terjadinya Hujan Lebat di Manado. Satuan Kerja yang terkena dampak banjir adalah Rutan Klas IIA Manado serta beberapa rumah dinas jabatan dan rumah pegawai. Namun secara keseluruhan tidak terjadi kerusakan berat pada barang-barang yang terkena banjir.

b. Lapas Lhokseumawe

Pada tanggal 15 Februari 2014 sekitar pukul 24.00 WIB telah terjadi kebakaran pada Lapas Lhokseumawe Aceh. Kejadian tersebut mengakibatkan terbakarnya seluruh gedung perkantoran dan fasilitas lainnya. Namun sampai saat laporan ini dibuat belum dapat disajikan secara rinci aset atau barang-barang milik negara yang terbakar/rusak berat. Sampai saat ini operasional kantor sehari-hari dilakukan di

LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2013 - AUDITED

pelataran halaman kantor.

c. **Rumah Dinas di Tanah Tinggi Tangerang**

Terdapat Rumah Dinas yang berlokasi di Tanah Tinggi Tangerang yaitu Rumah Dinas Blok C9 Nomor 86 yang ditempati oleh Sdr. Arief Hanafi, Kasie Wasdakim Tasikmalaya dan Rumah Dinas Blok C9 Nomor 87 ditempati oleh Fadli Ramli, Pensiunan Imigrasi. Kedua Rumah Dinas tersebut pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2013 telah terjadi kebakaran dan saat ini dalam proses penanganan Direktorat Jenderal Imigrasi untuk penyelesaian tindak lanjut.

d. **Lapas Labuhan Ruku**

Pada tanggal 18 Agustus 2013 sekitar pukul 16.00 WIB telah terjadi kebakaran pada Lapas Labuhan Ruku. Kejadian tersebut mengakibatkan terbakarnya sebagian gedung dan fasilitas lainnya. Berdasarkan laporan dari satuan kerja Lapas Labuhan Ruku kerugian berupa peralatan dan mesin diperkirakan sekitar Rp4.004.879.423,00 dan sudah dilakukan usul penghapusan terhadap aset yang terbakar.

e. **Lapas Palopo**

Pada tanggal 14 Desember 2013 telah terjadi kerusakan yang menyebabkan gedung kantor Lapas kelas IIA Palopo terbakar. Kejadian tersebut mengakibatkan masalah serius dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat. Jaringan komputer, instalasi listrik, dan berbagai peralatan kantor terbakar. Untuk menanggulangi hal tersebut Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan telah membentuk tim untuk mengidentifikasi kerusakan dan kerugian yang diakibatkan oleh kerusakan tersebut.

D.2. **Temuan Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan**

Badan Pemeriksa Keuangan **telah** memeriksa Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia TA 2013 - *Unaudited*. Dari pemeriksaan tersebut ditemukan ketidaksesuaian akun-akun pada Laporan Neraca Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia TA 2013. Atas temuan dimaksud, Sekretariat Jenderal telah menindaklanjuti dengan melakukan koreksi sebagaimana terlampir dan merupakan laporan neraca pada Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia TA 2013 *Audited*.

D.3. **Informasi Pendapatan dan Belanja Akrual**

Sesuai dengan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor SEK.KU.05.01-185 tanggal 18 Desember 2012 Tentang Penyajian Aset dan Kewajiban Dalam Neraca Berdasarkan Basis Akrual dalam Penyusunan Laporan Keuangan Semester II Tahun 2012, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia TELAH melaksanakan basis akrual, sebagaimana terlampir.

D.4. **Hibah**

Tahun anggaran 2013 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menerima hibah

LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2013 - AUDITED

dalam bentuk uang sebesar Rp2.841.720.000,00 dan USD155.000,00 serta dalam bentuk barang senilai Rp9.753.443.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 81. Hibah Uang dan Barang Tahun 2013

No	Satker	Donor	Jumlah	Bentuk Hibah
1	Setjen	PT Holcim Indonesia	Rp9.322.500.000	Barang
2	Ditjen Pemasarakatan	HCPI		Uang
3	Ditjen Pemasarakatan	UNICEF	USD 155.000	Uang
4	Ditjen Pemasarakatan	ICITAP	Rp33.502.200	Barang
5	Lapas Cianjur	Pemda	Rp50.000.000	Uang
6	Lapas Cianjur	Pemda	Rp50.000.000	Uang
7	Kanim Jayapura	Pemda Prov. Papua	Rp534.000.000	Uang
8	Lapas Klas I Semarang	Rumah Sakit Islam Amal Sehat Sragen	Rp73.255.800	Barang
9	Lapas Klas I Semarang	Rumah Sakit Islam Amal Sehat Sragen	Rp98.465.000	Barang
10	Lapas Klas I Semarang	PT. Bank Rakyat Indonesia	Rp123.870.000	Barang
11	Lapas Klas I Semarang	PT. Bank Rakyat Indonesia	Rp83.850.000	Barang
12	Kanwil Banten	Sekretariat Daerah Provinsi Banten	Rp2.000.000.000	Uang
13	Kanim Tungal	PT.LPPPI, PT. Petrochina Int, PT.Huabei Petroleum Service	Rp18.000.000,00	Barang
		Jumlah	Rp9.753.443.000	Barang
			Rp2.841.720.000,00	
			USD150.000,00	Uang

Adapun hibah yang telah mendapatkan registrasi adalah sebagai berikut:

Tabel 82. Hibah yang Telah Mendapat Registrasi

No	Satker	No. Registrasi	Nilai	Keterangan
1	Setjen	73752601	Rp9.322.500.000	--
2	Ditjen Pemasarakatan	71454001		Sisa dana di Rekening khusus penampung hibah pada tanggal 31 Desember 2013 sebesar Rp61.226.206,00 dilaporkan sebagai Kas lainnya dan setara kas pada neraca
3	Ditjen Pemasarakatan	70725701	USD 155.000	Sisa dana di Rekening khusus penampung hibah pada tanggal 31 Desember 2013 sebesar Rp785.326,00 dilaporkan sebagai Kas lainnya dan setara kas pada neraca
4	Ditjen Pemasarakatan	73720201	Rp33.502.200	--
5	Lapas Cianjur	73589501	Rp50.000.000	--
6	Lapas Cianjur	74575701	Rp50.000.000	--
7	Kanim Jayapura	73508801	Rp534.000.000	--
8	Lapas Klas I Semarang	73922601	Rp73.255.800	Terdapat koreksi perubahan kode Belanja pada Memo Pencatatan Hibah Langsung, karena kesalahan input pada Aplikasi SPM
9	Lapas Klas I Semarang	74420201	Rp98.465.000	Terdapat koreksi perubahan kode Belanja pada Memo Pencatatan Hibah Langsung, karena kesalahan input pada Aplikasi SPM
10	Lapas Klas I Semarang	74419501	Rp123.870.000	--
11	Lapas Klas I Semarang	74429501	Rp83.850.000	--
12	Kanwil Banten	74255701	Rp2.000.000.000	Hibah tersebut baru disahkan dan direalisasikan pada Tahun 2013 sebesar Rp1.282.960.000,00 dan sisanya sebesar Rp717.040.000,00 akan dilakukan pengesahan dan direalisasikan di Tahun 2014
		Jumlah	Rp12.369.443.000,00	

LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2013 - AUDITED

	USD150.000,00	
--	----------------------	--

Informasi Terkait Pengelolaan Hibah Barang

Terkait Hibah barang dari International Organization for Migration (IOM) ke Satuan Kerja Rumah Detensi Imigrasi, sesuai dengan Nota Kesepahaman antara Ditjen Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan IOM tentang Proyek Pengelolaan dan Perawatan Imigran Non Reguler Tahap II yang berada di Wilayah RI Nomor IMI-UM.01.01-5008 tanggal 21 September 2012, bahwa permohonan nomor registrasi dan pengesahan atas barang hibah akan dilaksanakan pada tahun 2014.

D.5. SKPA

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia TA 2013 menerbitkan Surat Kuasa Pengguna Anggaran (SKPA) untuk belanja barang sebesar Rp64.845.505,00 dan belanja modal sebesar Rp15.147.247,00 atau total sebesar Rp79.992.752,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 83. Penerbitan SKPA Selama Tahun 2013

(dalam ribuan rupiah)

No	Unit Kerja	Belanja Barang (Rp,00)			Belanja Modal (Rp,00)		
		Pagu	Realisasi	Sisa	Pagu	Realisasi	Sisa
1	DKI	7.816.057	7.371.717	444.340	-	-	-
2	Jabar	4.512.705	4.511.113	1.592	-	-	-
3	Jateng	2.430.002	2.383.075	46.926	-	-	-
4	Yogya	276.104	274.946	1.158	-	-	-
5	Jatim	7.022.410	7.022.310	100	-	-	-
6	Aceh	2.730.997	2.719.419	11.579	-	-	-
7	Sumut	6.459.668	6.386.236	73.431	799.788	783.753	16.035
8	Sumbar	1.555.114	1.552.208	2.906	-	-	-
9	Riau	3.367.824	3.316.698	51.126	-	-	-
10	Jambi	3.084.353	3.083.396	957	496.595	493.610	2.985
11	Sumsel	3.836.627	3.836.399	228	-	-	-
12	Lampung	929.891	926.341	3.550	-	-	-
13	Kalbar	1.693.171	1.683.149	10.022	-	-	-
14	Kalteng	975.872	958.881	16.991	-	-	-
15	Kalsel	3.002.721	2.919.287	83.434	-	-	-
16	Kaltim	370.706	351.261	19.445	-	-	-
17	Sulut	703.846	669.520	34.326	-	-	-
18	Sulteng	810.140	810.133	7	-	-	-
19	Sulsel	3.025.628	2.955.332	70.295	438.692	403.800	34.892
20	Sultra	1.142.935	1.137.520	5.415	-	-	-
21	Maluku	344.641	344.543	99	3.729.601	3.708.412	21.189
22	Bali	664.426	642.980	21.446	10.000.000	9.757.672	242.328
23	NTB	492.830	486.538	6.292	-	-	-
24	NTT	1.128.311	1.128.302	9	-	-	-
25	Papua	761.858	755.141	6.717	-	-	-
26	Bengkulu	1.218.401	1.218.401	0	-	-	-
27	Malut	524.551	524.551	-	-	-	-
28	Banten	3.391.597	3.386.427	5.170	-	-	-
29	Babel	807.466	786.087	21.378	-	-	-
30	Gorontalo	78.895	37.756	41.139	-	-	-
31	Kepri	328.980	327.878	1.102	-	-	-
32	Sulbar	338.228	337.956	272	-	-	-
	Jumlah	65.826.957	64.845.505	981.451	15.464.676	15.147.247	317.429

D.6. PNBP Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum

1. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum telah menginventarisasi data piutang PNBP atas pemesanan nama perseroan yang dilakukan oleh notaris dari Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2012. Selanjutnya, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum telah melakukan pemberitahuan kepada notaris untuk menyelesaikan

LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2013 - AUDITED

kewajiban pembayaran PNBPN pesan nama melalui Surat Nomor AHU.KU.02.02-23 tanggal 10 April 2013. Sampai saat ini, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum masih melakukan verifikasi dan klarifikasi terhadap data piutang PNBPN pemesanan nama perseroan kepada para Notaris. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2013, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum telah memverifikasi adanya pembayaran 5.834 notaris dari total 6.665 Notaris yang memiliki kewajiban PNBPN pesan nama perseroan. Dari verifikasi tersebut, Notaris telah memenuhi kewajiban pesan nama perseroan sebesar Rp 15.104.200.000,00 dari total kewajiban sebesar Rp16.775.000.000,00, sehingga masih terdapat kewajiban PNBPN pesan nama perseroan senilai Rp1.520.800.000,00 yang belum diselesaikan.

Selain itu berdasarkan data dari Sistem Administrasi Badan Hukum, terdapat nama perseroan untuk tahun 2013 sebanyak 29.178 nama perseroan yang telah mendapat persetujuannya namun belum dilakukan pembayaran PNBPN oleh notaris senilai Rp5.835.600.000,00. Dengan demikian pada Tahun 2014, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum akan melakukan verifikasi kewajiban pesan nama perseroan sebanyak Rp7.356.400.000,00 (Rp1.520.800.000,00 + Rp5.835.600.000,00) dan menetapkan piutang PNBPN bagi Notaris yang belum melakukan pemenuhan kewajiban pada Februari 2015.

2. Sebagai upaya penatausahaan kewajiban PNBPN pesan Nama perseroan, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum akan menetapkan piutang pesan nama pada bulan Februari 2015 dengan pertimbangan sebagai berikut :
 - a. Verifikasi yang dilakukan pada tahun 2014 dapat mengarahkan Notaris untuk memenuhi kewajiban PNBPN pesan nama perseroan;
 - b. Pada periode yang sama, antara April s/d Desember 2013, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dapat menyelesaikan kewajiban pesan nama sebesar 92% dari total kewajiban Rp16.775.000.000,00 dengan sisa piutang yang belum diselesaikan pada 31 Desember 2013 senilai Rp 1.520.800.000,00;
 - c. Berdasarkan hal tersebut, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum menargetkan kewajiban PNBPN pesan nama dapat diselesaikan sebelum 31 Desember 2014;
 - d. Apabila upaya penyelesaian kewajiban PNBPN pesan nama belum selesai dilakukan sampai dengan tanggal 31 Desember 2014, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum akan memberitahukan kepada Notaris bahwa pada Februari 2015 Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum akan melakukan penetapan piutang PNBPN; dan
 - e. Agar para Notaris yang belum menyelesaikan kewajiban untuk menjalankan proses penatausahaan piutang PNBPN sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2013 - AUDITED

3. Atas hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Ditjen AHU periode 31 Desember 2013 mengenai kewajiban Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum untuk menerbitkan Tambahan Berita Negara (TBN) yayasan dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - a. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum telah menganggarkan pagu anggaran dalam DIPA untuk melakukan pencetakan BN/TBN pendirian perseroan melalui perum PNRI. Hingga 31 Desember 2013, masih terdapat 35.023 permohonan yang masih belum diterbitkan atau senilai Rp20.015.644.500,00. Sampai Tahun 2013, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum belum dapat melakukan pencetakan TBN yayasan terhadap 37.644 permohonan. Kendala tersebut disebabkan karena hal-hal sebagai berikut:
 - Didalam mekanisme pengumuman BN/TBN, seharusnya terdapat alokasi biaya BN kemudian TBN, akan tetapi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2009 hanya terdapat biaya PNBPN untuk pengumuman TBN; dan
 - Perum PNRI belum dapat menentukan biaya produksi yang dapat mengakomodir kebutuhan cetakan TBN yayasan. Biaya produksi pengumuman BN/TBN lebih mahal bila dibandingkan dengan biaya pengumuman BN/TBN perseroan dikarenakan pencetakan harus dilakukan sebanyak 10 eksemplar.
 - b. Untuk menangani kendala dalam pencetakan TBN yayasan, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut :
 - 1) Sejak tahun 2011, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum bersama dengan unit Eselon I di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mengajukan perubahan tarif pada Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2009 kepada Direktorat PNBPN Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan berdasarkan Surat Nomor AHU.1.KU.02.02-05 tanggal 25 Januari 2013 tentang permintaan justifikasi usulan perubahan PP 38 Tahun 2009. Dalam usulan perubahan tersebut, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum mengajukan untuk menghapuskan tarif PNBPN untuk penerbitan BN/TBN. Dengan penghapusan tarif pengumuman BN/TBN, Notaris dapat langsung melakukan pembayaran kepada Perum PNRI untuk mencetak BN/TBN pendirian perseroan;
 - 2) Terkait dengan adanya pasal 30 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum akan menerbitkan Surat Kuasa kepada Notaris agar dapat melakukan pencetakan BN/TBN secara langsung kepada Perum PNRI;
 - 3) Selain mengusulkan tarif PNBPN atas penerbitan BN/TBN perseroan, Direktorat

LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2013 - AUDITED

Jenderal Administrasi Hukum Umum mengusulkan adanya penghapusan tarif TBN yayasan. Dengan demikian, Notaris dapat langsung melakukan pembayaran kepada Perum PNRI untuk melakukan pencetakan TBN yayasan; dan

- 4) Pada tahun 2014, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum melalui Surat Nomor AHU.1.PW.04.01-1 tanggal 28 April 2014 tentang pengumuman yayasan dalam TBN RI. telah mengajukan perubahan Peraturan Menteri yang mengatur mengenai jumlah eksemplar TBN yayasan agar informasi yang dicantumkan dalam TBN yayasan dapat disesuaikan dengan besaran tarif PNPB dan yang semula 10 eksemplar menjadi 3 eksemplar.

D.7. Pengungkapan Lain-lain

1. Dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual menggunakan aplikasi dari *World Intellectual Property Organization* (WIPO) yang bernama *WIPO Industrial Property Automation System* (IPAS) dengan Memorandum of Understanding (MoU) tertanggal 17 Oktober 2011. Aplikasi ini selanjutnya dikembangkan sesuai dengan kepentingan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual;
2. Pencatatan Transfer BMN Setjen dan Ditjen Administrasi Hukum Umum ke Satuan Kerja di Jajaran Kantor Wilayah dan Eselon I
Sebagian besar BMN Hasil Transfer pada tahun 2013 masih tercatat di Satuan Kerja Pengirim karena terkait dengan dibutuhkannya Arsip Data Komputer (ADK) dalam proses transfer tersebut yang belum dapat dilakukan di tahun 2013 namun fisik barang sudah berada pada satuan kerja penerima barang sesuai peruntukannya, dengan rincian:

Tabel 84. Daftar Satker yang Belum Menyerahkan ADK BMN

No	Satker Pengirim	Nilai Barang yang Belum Ditransfer Keluar (Rp0,00)
1	Ditjen AHU	5.355.806.650
2	Setjen	11.620.229.109
	Jumlah	16.976.035.759

3. Penatausahaan BMN Satuan Kerja Perwakilan Imigrasi di Luar Negeri
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai sebanyak 18 satker perwakilan imigrasi di luar negeri, yaitu:

Tabel 85. Daftar Perwakilan Imigrasi di Luar Negeri

No	Kode Satker	Satuan Kerja
1	408328	Perwakilan Imigrasi di Bangkok
2	539142	Perwakilan Imigrasi di Beijing
3	408371	Perwakilan Imigrasi di Berlin
4	408359	Perwakilan Imigrasi di Davao
5	408365	Perwakilan Imigrasi di Denhaag
6	666522	Perwakilan Imigrasi di Guangzhou
7	408334	Perwakilan Imigrasi di Hongkong
8	408711	Perwakilan Imigrasi di Jeddah
9	621801	Perwakilan Imigrasi di Johor Baru
10	408303	Perwakilan Imigrasi di Kuala Lumpur
11	408396	Perwakilan Imigrasi di Kuching

LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2013 - AUDITED

12	408416	Perwakilan Imigrasi di Los Angeles
13	408312	Perwakilan Imigrasi di Penang
14	408292	Perwakilan Imigrasi di Singapura
15	408380	Perwakilan Imigrasi di Sydney
16	408400	Perwakilan Imigrasi di Tawau
17	627339	Perwakilan Imigrasi di Timor Leste
18	408340	Perwakilan Imigrasi di Tokyo

Terkait dokumen keimigrasian pada satker luar negeri, pengadaan barang dilakukan oleh Ditjen Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia namun transfer barang dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri, kemudian pada satker luar negeri barang-barang dokumen keimigrasian tersebut dicatat secara manual pada Buku Persediaan.

Sampai saat ini Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia belum membuat MOU dengan Kementerian Luar Negeri atas distribusi dokumen keimigrasian di Perwakilan Imigrasi Luar Negeri, berkenaan dengan hal tersebut Sekretariat Jenderal akan berkoordinasi dengan Ditjen Imigrasi agar membuat MOU dengan Kementerian Luar Negeri terkait hal tersebut.

4. Terdapat perbedaan realisasi anggaran belanja modal pada aplikasi SAK dengan penambahan aset dalam aplikasi SIMAK BMN:

Tabel 86. Daftar Perwakilan Imigrasi di Luar Negeri

Realisasi Belanja/SAK (Rp,00)	Penambahan Aset/SIMAK BMN (Rp,00)	Selisih (Rp,00)
888.707.275.466	857.683.714.862	31.023.560.604

Selisih sebesar Rp31.023.560.604,00 belum diketahui secara pasti dan lengkap terhadap selisih penggunaan anggaran belanja modal tersebut. Asumsi awal selisih tersebut kemungkinan dibelanjakan belanja barang (persediaan).

5. Kebakaran di Lembaga Pemasyarakatan:

- a. LP. Labuhan Ruku

Pada tanggal 18 Agustus 2013 sekitar pukul. 16.00 WIB telah terjadi kebakaran pada LP. Labuhan Ruku, dan kejadian tersebut mengakibatkan terbakarnya sebagian gedung dan fasilitas lainnya. Berdasarkan laporan dari satuan kerja LP Labuhan Ruku kerugian berupa peralatan dan mesin diperkirakan sekitar Rp4.004.879.423, dan sudah dilakukan usul penghapusan terhadap aset yang terbakar.

- b. LP. Palopo

Pada tanggal 14 Desember 2013 telah terjadi kerusakan yang menyebabkan gedung kantor Lapas kelas Ila Palopo terbakar. Kejadian tersebut mengakibatkan masalah serius dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat. Jaringan komputer, Instalasi listrik, dan berbagai peralatan kantor ludes terbakar. Untuk menanggulangi hal tersebut Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan telah membentuk tim untuk untuk mengidentifikasi kerusakan dan kerugian yang diakibatkan oleh kerusakan

LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2013 - AUDITED

tersebut;

6. Terdapat uang sebesar Rp120.000.000,00 atas hasil audit Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terhadap laporan gratifikasi pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU). Sambil menunggu proses lebih lanjut, uang tersebut pada tanggal 18 Oktober 2013 dititipkan pada brangkas Bendahara Inspektorat Jenderal dengan Berita Acara terlampir;
7. Pada tanggal 6 – 8 Februari 2014, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum melaksanakan kegiatan rekonsiliasi barang milik negara antara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kegiatan tersebut dimaksudkan untuk memenuhi tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) yang telah dilaksanakan selama Tahun Anggaran 2013 berupa transfer Barang Persediaan dan Barang Modal dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dari kegiatan tersebut terdapat dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut;
8. Pada TA 2013, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia memperoleh anggaran yang berasal dari DIPA Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. anggaran tersebut mencakup Belanja Barang (52) dan Belanja Modal (53) yang mengharuskan pencatatan juga dilakukan dalam aplikasi Simak BMN. Akibat adanya kurang koordinasi antara panitia pengadaan dengan petugas pencatatan BMN pada Kantor Wilayah dengan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum sehingga menimbulkan kendala pada proses pencatatan BMN oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum ketika akan melakukan pemindahbukuan Barang Milik Negara;
9. Transfer keluar BMN yang belum dibukukan oleh Kantor Wilayah akan dibukukan kembali oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;
10. Proses transfer keluar oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum akan dilakukan pada semester I TA 2014 dengan menyertakan Berita Acara Serah Terima Barang dan Arsip Data Komputer dari aplikasi Barang Milik Negara;
11. Selain terkait dengan barang yang terdapat pada Kantor Wilayah, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum juga melakukan pemeliharaan yang dilakukan pada aset yang dimiliki Sekretariat Jenderal dan Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Belanja pemeliharaan tersebut telah memenuhi nilai kapitalisasi dan mengharuskan untuk dicatat dalam aplikasi Simak BMN. Atas arahan Biro Perlengkapan dan Inspektorat Jenderal yang melakukan reviu atas Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, pencatatan tersebut akan dilakukan pada semester I Tahun Anggaran 2014. Dengan mekanisme transfer antar

LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2013 - AUDITED

aplikasi Simak BMN, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum akan mentransfer keluar nilai pemeliharaan yang dikapitalisasi tersebut untuk dicatat oleh Sekretariat Jenderal dan Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

12. Barang Titipan Pihak Ketiga

Sampai dengan periode 31 Desember 2013, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia memiliki barang titipan pihak ketiga yaitu berupa barang sitaan dan barang rampasan yang tersimpan pada Rumah Penyimpanan Barang Sitaan (Rupbasan) dan Balai Harta Peninggalan (BHP) di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Barang titipan pihak ketiga di Rumah Penyimpanan Barang Sitaan (Rupbasan) dan Balai Harta Peninggalan (BHP) periode 31 Desember 2013 disajikan sebagai berikut;

Tabel 86. Barang Titipan Pihak Ketiga yang Dikelola Rupbasan

No.	Jenis Barang Rampasan/Sitaan		
	Uraian Barang	Jumlah	
1	UANG TUNAI	Rp	5.766.054.700
2	BARANG		8.298.328
1.a	UANG TUNAI		5.766.054.700
	Uang Asli	5.765.464.700	
		80.838.400	Brankas Kantor
		4.584.820.000	Bank BRI
		1.099.806.300	BI cab. Palu
	Uang Palsu	590.000	Brankas Kantor
2.a	KENDARAAN		6.301
	Kendaraan tak bermesin	383	unit
	Kendaraan roda 2	4.958	unit
	Kendaraan roda 4	731	unit
	kendaraan roda ≥ 4	190	unit
	Kendaraan alat berat	18	unit
	Kendaraan air tidak bermotor	20	unit
	Kendaraan air bermotor	1	unit
2.b	KAYU		4.082.164
	Kayu	81.773	batang
	Kayu	3.993.547	M ³
	Kayu	3.546	lembar
	Kayu	18	ton
	Rotan	3.280	batang
2.c	BAHAN BAKAR		358.304
	BBM	310.389	liter
	BBM	7.103	jerigen
	BBM	1.936	drum
	BBM	54	galon
	BBM	37.602	botol
	BBM	452	Kardus
	BBG	735	Kg
	Batubara	22	ton
	Batubara	11	kantong
2.d	NARKOBA/OBAT-OBATAN/HERBAL		14.744
	Narkoba	36	bungkus

LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2013 - AUDITED

	Narkoba	8	Paket
	Narkoba	75,0887	gram
	Miras	4.884	botol
	Miras	15	jerigen
	Obat-obatan	144	dus
	Obat-obatan	28	karung
	Obat-obatan	3.055	butir
	Jamu	4.839	bungkus
	Jamu	362	dus
	Jamu	40	sak
	Jamu	1.258	botol
2.e	PERALATAN MESIN DAN LAINNYA		3.836.815
	Alat Elektronik	3.071	unit
	Mesin Lainnya	665	unit
	Furniture	954	unit
	Pupuk	8.818	sak
	Pupuk	4.668	ton
	Logam	2.465	buah
	Senjata tajam	176	buah
	Senjata api	135	buah
	Alat bengkel	2.137	buah
	Textile	27.040	potong
	Textile	5.446	bal
	Dokumen/barang berharga	1.946	buah
	Bahan peledak	3.090.046	buah
	Barang titipan lainnya	689.248	buah

D.8. Produk Unggulan

1. Ditjen AHU

Pelayanan Ditjen AHU Online adalah merupakan upaya nyata Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat dalam membangun *good governance* menuju *clean government* dengan mengutamakan pelayanan yang profesional, cepat, tepat, efisien murah dan bebas pungli. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia memiliki beberapa layanan jasa hukum yaitu: Pelayanan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas, Yayasan dan Perkumpulan, Pelayanan Kenotariatan, Pelayanan Pendaftaran Jaminan Fidusia, Pelayanan Laporan Wasiat, Pelayanan Partai Politik serta Pelayanan Kewarganegaraan. Dalam memberikan layanan kepada satkeholder tersebut Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum senantiasa bekerja sama untuk dapat memberikan layanan jasa hukum bermanfaat, berkepastian hukum dan prima kepada para pemohon sehingga perlu senantiasa dilakukan peningkatan pelayanan dengan memperhatikan perkembangan serta kebutuhan masyarakat dan dunia usaha.

Dalam rangka mendukung optimalisasi pelayanan publik dengan didasari keinginan untuk dapat memberikan pelayanan jasa hukum yang profesional, cepat, murah dan bebas pungli serta menjamin kepastian hukum maka perlu perubahan dalam memberikan pelayanan jasa hukum yaitu perlunya *online system* dalam pelayanan publik. Reformasi pelayanan publik yang dilakukan Direktorat Jenderal Administrasi

LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2013 - AUDITED

Hukum Umum dimulai dengan diberlakukannya Sistem Pendaftaran Jamina Fidusia Online pada tanggal 5 Maret 2013. Perubahan pelayanan fidusia yang sebelumnya desentralisasi menjadi sentralisasi dengan memanfaatkan teknologi berbasis IT. Dengan maskot “Si Fidu”, sistem fidusia online membawa dampak positif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat penggunanya. Dari sisi pelayanan, masyarakat hanya memerlukan waktu 7 menit untuk melakukan pendaftaran jaminan fidusia, disamping itu Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di bidang pendaftaran jaminan fidusia meningkat tajam dari tahun sebelumnya. Bahkan perubahan sistem pendaftaran jaminan fidusia telah diakui dan masuk dalam 9 inovasi terbaik dari 1500 instansi yang mengikuti kompetisi inovasi terbaik dalam pelayanan kementerian/lembaga di Indonesia.

Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum membangun aplikasi ini untuk memberikan pelayanan yang lebih baik lagi dengan latar belakang sebagai berikut :

- a. Ketentuan *one day service* dalam pendaftaran jaminan fidusia yang tidak dapat dilaksanakan;
- b. Permohonan pengesahan badan hukum dan yayasan yang masih manual;
- c. Proses persetujuan pesan nama yang memerlukan 3 – 7 hari kerja;
- d. Formasi penempatan notaris yang belum transparan dan keinginan setiap notaris untuk ditempatkan di kota-kota besar;
- e. Laporan notaris tentang wasiat masih dilakukan secara manual.

Pelayanan-pelayanan berbasis AHU *Online* antara lain: Fidusia; Pesan Nama; Perseroan Terbatas; Yayasan dan Perkumpulan; Wasiat; Notaris; dan Pembayaran PNBP.

2. Ditjen Pemasarakatan

Pada tahun anggaran 2013, Direktorat Jenderal Pemasarakatan meluncurkan Sistem Database Pemasarakatan (SDP). Sistem Database Pemasarakatan (SDP) adalah suatu Sistem Informasi Pemasarakatan dengan pemanfaatan Teknologi Informasi yang mendukung tertib pelaksanaan Tugas dan Fungsi kelembagaan agar dapat beroperasi secara profesional berlandaskan standar pelayanan masyarakat yang prima, akuntabel dan transparan.

Manfaat penggunaan SDP adalah sebagai berikut:

- a. Mengakomodir pencatatan masalah Keamanan dan Pengamanan
- b. Pemberian sanksi pelanggaran WBP dapat langsung di berlakukan dalam Sistem
- c. Monitoring Pemetaan Blok dan Kamar Hunian
- d. Monitoring over kapasitas suatu UPT di tingkat Wilayah maupun Pusat
- e. Monitoring Sarana dan Prasarana Keamanan suatu UPT di tingkat Wilayah maupun Pusat

3. Ditjen Imigrasi

Sistem Pelayanan Penerbitan Paspor Terpadu (SPPT) atau yang dikenal dengan sistem One Stop Services (OSS) ini menggantikan sistem one day services yang sebelumnya dilaksanakan di kantor imigrasi dengan proses penerbitan paspor. Sistem baru ini bertujuan untuk meningkatkan kecepatan layanan pembuatan paspor untuk meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat serta memotong birokrasi dalam pelayanan penerbitan paspor RI. Implementasi OSS dilaksanakan di 9 (sembilan) kantor imigrasi yaitu: Kantor Imigrasi Klas I Khusus Jakarta Selatan; Jakarta Barat; Soekarno-Hatta; Batam; Medan; Surabaya; Kantor Imigrasi Klas I Jakarta Pusat; Bandung; dan Denpasar.

4. Ditjen HKI

a. *Industrial Property Automation System (IPAS)*

Pembangunan dan pengembangan *e-government* yang dilaksanakan oleh DJHKI di tahun 2013 adalah dengan diwujudkan pengembangan sistem IPAS (*Industrial Property Automation System*) dalam proses permohonan pendaftaran Desain Industri dan Paten, mulai dari proses di loket, sertifikat serta pasca permohonan pendaftaran hak-hak tersebut. Pemberlakuan sistem IPAS diharapkan dapat mengoptimalkan peran DJHKI selaku pelayan publik dalam memberikan pelayanan prima bagi masyarakat dalam mengakses hak di bidang hak kekayaan intelektual, baik dari proses pendaftaran hingga mendapatkan. Dengan sistem yang telah terautomasi, diharapkan penggunaan sistem IPAS ini dapat lebih menjamin kepastian hukum bagi masyarakat yang mengakses hak di bidang kekayaan intelektual, khususnya bagi desain industri dan hak cipta.

Pemberlakuan sistem IPAS bagi permohonan Desain Industri dan Hak Paten ini mulai dilaksanakan sejak Bulan Oktober 2013. Hasil capaian ini sebagai lanjutan dari telah diselenggarakannya sistem IPAS sebelumnya yang telah diterapkan pada pengajuan Permohonan Pendaftaran Merek hingga tahap penyelesaian yang mulai diberlakukan sejak tanggal 1 Agustus 2012.

b. Pemberian Anugerah Kawasan Berbudaya HKI 2013

Dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah melalui perlindungan HKI, DJHKI berinisiatif untuk memberikan penghargaan bagi para pihak yang berdasarkan kriteria tertentu dianggap telah memberikan kontribusi yang cukup besar dalam lingkup HKI serta memberikan sosialisasi HKI untuk meningkatkan pemahaman tentang HKI para pihak yang menjadi target/sasaran di daerah penerima anugerah kawasan berbudaya HKI dan sekitarnya. Penetapan Kawasan Berbudaya HKI (KBHKI) mempunyai tujuan untuk memberikan apresiasi terhadap pihak-pihak yang telah memberikan peran dalam meningkatkan

LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2013 - AUDITED

produktivitas masyarakat, meningkatkan kesadaran dan pemahaman terhadap HKI dalam perekonomian, kebudayaan dan kemajuan masyarakat di suatu wilayah.

Program Pemberian Anugerah Kawasan Berbudaya HKI dimaksudkan sebagai bukti bahwa pemerintah tidak tinggal diam dan menginginkan kerja sama yang baik dengan pihak-pihak lain yang selama ini juga melakukan tugas-tugas terkait Hak Kekayaan Intelektual yang secara langsung atau tidak langsung telah membantu DJHKI dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Penetapan suatu wilayah/kawasan agar layak disebut sebagai Kawasan Berbudaya HKI adalah dengan memenuhi kriteria sebagai berikut:

- Adanya komitmen pimpinan kawasan dalam pengembangan HKI;
- Sosialisasi HKI yang dilakukan secara sistemik dan kontinyu;
- Adanya iklim kondusif yang mendukung peningkatan inovasi, kreatifitas dan pendaftaran HKI;
- Adanya upaya penegakan Hukum yang sistemik dan konsisten berupa penanggulangan pelanggaran HKI yang preventif dan represif;
- KBHKI dapat ditetapkan untuk kota, perguruan tinggi, lembaga riset, komunitas warisan budaya, sentra industri, dan mal/pusat belanja; dan
- Selain kriteria tersebut, pemetaan dan identifikasi terhadap berbagai hasil penelitian dan pengembangan produk inovatif berbasis masyarakat juga dapat dijadikan dasar penetapan KBHKI.

Pada tahun 2013, DJHKI telah menetapkan beberapa instansi dan lembaga sebagai Kawasan Berbudaya HKI, yaitu sebagai berikut:

a. Penetapan Kawasan Berbudaya HKI Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Penetapan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai Kawasan Berbudaya HKI ditetapkan melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No. M.HH-15.KP.07.05 Tahun 2013 tentang Penetapan Kawasan Berbudaya HKI (9 kawasan) yaitu: Kraton Yogyakarta; Universitas Gadjah Mada (UGM), Universitas Islam Indonesia (UII), Institut Seni Indonesia (ISI), Pemerintah Kota Yogyakarta, Pemerintah Kabupaten Sleman, Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul, Pemerintah Kabupaten Bantul dan Pemerintah Kabupaten Kulonprogo. Pemberian Anugerah KBHKI kepada para pihak tersebut dilaksanakan di Bangsal Srimanganti Kraton Yogyakarta pada tanggal 27-28 Agustus 2013 oleh Menteri Hukum dan HAM, Amir Syamsudin.

Selain menetapkan Kawasan Berbudaya HKI juga diserahkan sertifikat/penghargaan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia kepada pihak-pihak berikut:

LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2013 - AUDITED

- 1) Kraton Yogyakarta, dengan adanya Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dimana substansi Perda ini dapat mendukung kebijakan dibidang HKI;
- 2) Universitas Gadjah Mada (UGM);
- 3) Universitas Islam Indonesia (UII);
- 4) Institut Seni Indonesia (ISI) Yogyakarta;
- 5) Penyerahan Sertifikat Indikasi Geografis Salak Pondoh Sleman; dan
- 6) Penghargaan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai Kanwil Peduli HKI karena memiliki jumlah tertinggi angka pendaftaran HKI nya khususnya melalui jalur insentif Ditjen HKI.

Selain itu juga dilaksanakan Penyerahan Sertifikat dan Plakat Kawasan Berbudaya HKI oleh Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta oleh Menkumham Amir Syamsudin kepada: Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten Bantul, dan Kabupaten Kulon Progo. Selanjutnya juga diberikan penghargaan Penyerahan Piagam Anubhawa Sasana Desa oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia kepada : Gubernur D.I. Yogyakarta, Walikota D.I. Yogyakarta, Bupati Bantul, Bupati Kulon Progo, Bupati Gunung Kidul, dan Bupati Sleman.

- b. Penetapan Kawasan Berbudaya HKI Propinsi Jawa Barat diselenggarakan di Bandung, 21-22 Oktober 2013 di Gedung Sate Bandung oleh Menteri Hukum dan HAM, Amir Syamsudin. Penetapan kawasan berbudaya HKI dan penyerahan sertifikat/penghargaan diserahkan langsung oleh Menteri Hukum dan HAM kepada:
 - 1) Gubernur Provinsi Jawa Barat dan Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Kekayaan Intelektual sebagai Provinsi Peduli HKI;
 - 2) Bupati Sumedang sebagai kawasan Peduli Indikasi Geografis, di Sumedang telah terdapat 3 IG yang terdaftar yaitu (Ubi Cilembu, Tembakau Mole, Tembakau Hitam);
 - 3) Walikota Bandung Ridwan Kamil sebagai inovator bidang Arsitektur karena karya-karya telah banyak dikenal di tingkat nasional dan internasional;
 - 4) Universitas Padjadjaran dan Institut Teknologi Bandung sebagai Kawasan Berbudaya HKI klasifikasi A serta kampus kreator inovator;
 - 5) Universitas Pasundan sebagai Kawasan Berbudaya HKI klasifikasi B;
 - 6) Sertifikat Indikasi Geografis Java Coffee Preanger;

LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2013 - AUDITED

- 7) Sertifikat Indikasi Geografis Ubi Cilembu;
- 8) Sertifikat HKI Universitas Padjadjaran; dan
- 9) Sertifikat HKI Institut Teknologi Bandung.

Dengan pemberian penghargaan tersebut diharapkan para pemangku kepentingan seperti instansi pemerintah dan lembaga pendidikan dapat memelihara dan memajukan budaya HKI di lingkungan masing-masing dengan cara semakin berkreasi dan berinovasi serta memiliki cara-cara untuk memberi perlindungan hukum terhadap karya intelektual.

5. Ditjen HAM

- a. Melaksanakan penanganan komunikasi masyarakat sesuai dengan SOP pelayanan komunikasi masyarakat;
- b. Melaksanakan sosialisasi dan mengimplementasikan peraturan bersama Menteri Hukum dan HAM dan Menteri Dalam Negeri tentang parameter HAM dalam pembentukan produk hukum;
- c. Kriteria penilaian kabupaten/ kota peduli HAM; dan
- d. Modul SPPA (Sistem Penanganan Pengadilan Anak).

6. Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN)

Kegiatan Desa Sadar Hukum/ Kelurahan Sadar Hukum adalah Desa atau Kelurahan yang telah dibina atau karena swakarsa dan swadaya, memenuhi kriteria sebagai desa/ kelurahan sadar hukum. Di Indonesia terdapat 76.665 desa/kelurahan/pekon/kampung. Di tahun 2011 diresmikan 402 Desa Sadar Hukum (DSH), tahun 2012 sebanyak 342 DSH dan tahun 2013 sebanyak 393 DSH. Untuk tahun 2013 ditargetkan sebanyak 250 desa/kelurahan, dan telah terwujud sebanyak 393 desa/kelurahan. Dalam kurun waktu 3 tahun sebanyak 1.137 desa telah mendapat predikat Desa Sadar Hukum atau 1,48% dari keseluruhan desa/kelurahan/kampung di Indonesia. Adapun kriteria yang harus dipenuhi untuk menjadi Desa Sadar Hukum (DSH), antara lain:

- 1) Penerimaan pajak mencapai mencapai 90% lebih;
- 2) Tidak adanya perkawinan di bawah umur;
- 3) Angka kriminalitas rendah;
- 4) Rendahnya kasus narkoba;
- 5) Tingginya kepedulian kebersihan lingkungan; dan
- 6) Kriteria lain yang ditentukan daerah yang bersangkutan.

7. Badan Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia (Balitbang HAM)

Dalam rangka memperingati Hari Hak Asasi Manusia se-Dunia ke-65, Badan Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia menyelenggarakan kegiatan, **Penganugerahan Bung Hatta Award Untuk Hak asasi Manusia kepada Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**. Tahun ini merupakan kegiatan yang ke-

LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2013 - AUDITED

lima kalinya, sejak awal kegiatan ini dilaksanakan pada tahun 2009 lalu.

Tim Pelaksana Kegiatan Penganugerahan Bung Hatta *Award* untuk Hak Asasi Manusia Balitbang HAM menggunakan substansi Hak Pendidikan dan Hak Kesehatan sebagai indikator utama dalam penilaian kandidat penerima *Award* terhadap Kabupaten/Kota seluruh Indonesia.

Kedua hak tersebut merujuk kepada Komentar Umum PBB diperoleh indikator kunci untuk Hak Pendidikan, yaitu ketersediaan, akses, dapat diterima dan dapat diadaptasi (Komentar Umum Nomor 13, Pasal 13 Kovenan Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya); sedangkan untuk Hak Kesehatan, indikator kuncinya, yaitu ketersediaan, akses, dapat diterima dan kualitas (Komentar Umum Nomor 14, Pasal 12 Kovenan Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya).

Selanjutnya, digunakan pula indikator penilaian kemajuan pelaksanaan HAM, yang terdiri dari aspek struktur, proses, dan hasil. Indikator tersebut merujuk pada Modul yang disusun *Danish Institute for Human Rights (DIHR)* "Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan HAM".